

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS

**(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012-2016)**

SKRIPSI

Disusun untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MOHAMAD FAATHIR AL HAKIM
NIM. 145030201111084**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2018

Pukul : 08:00 WIB

Skripsi atas nama : Mohamad Faathir Al Hakim

Judul : Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Nila Firdausi Nuzula, Ph.D
NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota

Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota

Sri Sulasmiyati, S.Sos., M.AP
NIP. 19770420 200502 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 31 Mei 2018



Mohamad Faathir Al Hakim

145030201111084

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identity

Nama : Mohamad Faathir Al Hakim
 Email : mohfathiralhakim48@gmail.com
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Februari 1996
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 No. HP : 081217342106
 Alamat : Jalan Agung Wilis no 27 RT 01
 RW 02, Temenggungan,
 Banyuwangi (68412)



II. Latar Belakang Pendidikan

1. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang (2014-2018)
2. SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi (2011-2014)
3. SMP Negeri 3 Tulungagung (2008-2011)
4. SD Negeri 2 Kenayan Tulungagung (2003-2008)

III. Prestasi yang diperoleh

1. 1st Winner GEMASTIK 10 KEMENRISTEK DIKTI tingkat Nasional Kategori Pengembangan Bisnis di Universitas Indonesia 2017
2. 1st Winner ESPRIEX *Business Model and Lean Canvas Competition* tingkat ASEAN di Universitas Brawijaya 2018
3. Finalist pada *International Business Model Competition* di Provo Utah USA 2018

IV. Pengalaman Organisasi

1. Manager Expertise di Ei Lab FIA UB (Periode 2017)
2. Staff Internal di Administration English Club FIA UB (Periode 2016)
3. Staff HR di Administration English Club FIA UB (Periode 2015)

V. Pengalaman Magang

1. PT. Arwana Citra Mulia Tbk Plant 3 Gresik (10 Juli - 30 Agustus 2017)

VI. Sertifikat Keahlian

Microsoft Office (Skor *Good Grade* TRUST Training Partners)

Demikian *Curriculum Vitae* yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 1 Mei 2018

Mohamad Faathir Al Hakim

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dunia memicu setiap aktivitas ekonomi untuk menciptakan sebuah persaingan bisnis bagi seluruh perusahaan. Persaingan bisnis secara global dibutuhkan sebagai penghasil laba *optimum* atau laba yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan bagi pemegang saham. Upaya dalam peningkatan kesejahteraan pemegang saham (*shareholder*), ditemukan perbedaan kepentingan antara pihak pengelola perusahaan (*agent*) dengan pihak pemodal dan pemegang saham (*principals*) dalam menjalankan aktivitas pengelolaan usaha. Perbedaan kepentingan ini disebut dengan *agency problem*. Cara untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Konteks penerapan mekanisme GCG masih sering ditemukan adanya kecurangan (*fraud*), terutama kecurangan pada laporan keuangan yang mengakibatkan asimetri informasi termasuk pada perolehan profitabilitas. Perolehan profitabilitas juga dipengaruhi oleh kondisi struktur modal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep *Corporate Governance* yang diprosikan oleh variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_1), Dewan Direksi (X_2), Komite Audit (X_3), Kepemilikan Institusional (X_4) dan konsep Struktur Modal yang diprosikan oleh *Debt To Asset Ratio* (X_5) dan *Debt To Equity Ratio* (X_6) sebagai variabel independen terhadap konsep profitabilitas yang diprosikan oleh variabel dependen *Return On Asset* (Y_1) dan *Return On Equity* (Y_2).

Kata Kunci: Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Return On Asset*, dan *Return On Equity*.

ABSTRACT

The development of world economy triggers economic activities to create a business competition for the whole companies. Global business competition is needed as a producer of high profit or optimum profit and increased prosperity for shareholders. Efforts to improve shareholder's prosperity, found that difference of interest between the manager of the company called agent with the investor and shareholders that they called principals to execute business management. This difference of interest is called agency problem. The way to solved the conflict of agency problem needed the existence of good corporate governance. The context of implementation of Good Corporate Governance mechanism is still often found the existence of cheating or called (fraud), especially fraud on financial statements that result in information asymmetry including get profitability. The companies in getting profitability also influenced by capital structure condition. This research attempts to identify the influence of Corporate Governance which is proxied by independent variabel Proportion of Board of Commissioners Independent(X_1), Board of Directors(X_2), Audit Committee(X_3), Institutional Ownership(X_4), and concept of Capital Structure which is proxied by independent variable Debt To Asset Ratio(X_5) and Debt To Equity Ratio(X_6) to concept of profitability which is proxied by dependent variable Return On Asset(Y_1) and Return On Equity(Y_2).

Keywords: *Proportion of Board of Commissioners Independent, Board of Directors, Audit Committee, Institutional Ownership, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, dan Return On Equity.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Rasio *Financial Leverage* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah meridhoi peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta, nenek saya, kedua adik saya Firman dan Nissa dan seluruh keluarga besar, terimakasih telah menjadi inspirasi dan ikhlas memberikan dukungan materi, motivasi, semangat, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya.
3. Bapak Dr. Bambang Supriyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis;

5. Ibu Nila Firdausi Nuzula., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis dan selaku dosen pembimbing saya;
6. Bapak Ari Darmawan, Dr., S.AB., M.AB selaku Sekertaris Program Studi Administrasi Bisnis;
7. Ibu Nila Firdausi Nuzula., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan terhadap penelitian skripsi ini dengan sabar dan juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dari awal maba hingga akhir perkuliahan yaitu Keluarga Besar Pejuang Toga (Puspita, Isti, Nana, Umu, Tyok, Deasy, Rio, Andre, Galang, Avit, Bentaro, Cendy dan Rauf);
9. Para sahabat *teammate* saya NYSM Aan Suryana dan Deszlaria P.N yang senantiasa mengingatkan, memberikan semangat dan dukungan untuk selalu berprogres dalam proses penyusunan skripsi;
10. Para penghuni Kos KPT 300 (Victor Cornellius, Aldho Ikhsan, Anggar Syaiful, Rheno Fakhri, Mas Satria, Rauzan Naufal dan Pak Yus) yang telah setia menemani dan mengganggu pengerjaan skripsi saya di kossan dalam hal positif;
11. Keluarga Besar Pengurus Ei Lab FIA UB 2016-2018 yang selalu senantiasa mengingatkan untuk mengerjakan skripsi setiap hari;
12. Gesti Utariyanti yang telah mendoakan kelancaran pengerjaan skripsi dan selalu menanyakan kapan segera ujian akhir;

13. Partner seperbimbingan Miftachul Cholifah yang telah banyak membantu dalam pelengkapan data;
14. Pratiwi Lestari dan Melly Setya Haryanti sebagai teman SMP yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi;
15. Keluarga Ruang Perintis (Mas Faza, Mas Rama dan Mas Satrio) yang bersedia memberikan tempat untuk mengerjakan skripsi serta diskusi;
16. Teman-teman seperbimbingan anak-anak Ibu Nila yang menjadi motivasi dan pemberi semangat;
17. Keluarga Besar AEC 2015-2017 (Alvin, Irfan, Sahid, Yusdar, Aji, Atika, Yasmin, Didil, Aura, Idel, Nova, Ani, Kiky, Tasha, Ilham dan Ryan);
18. Kakak-kakak tingkat terbaik (Mbak Tias, Mbak Klara, Mbak Duhita, Mbak Selvy, Mbak Rossi, Mbak Dea, Mas Irvan, dan Bang Hara).

Penulis menyadari semaksimal mungkin apapun usaha yang telah dilakukan untuk menyusun penelitian skripsi ini, tetap ada kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kedepannya yang lebih baik. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa terutama Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya masyarakat luas pada umumnya.

Malang, 1 juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL / COVER	i
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kontribusi Penelitian.....	21
E. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Landasan Teori	35
1. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	35
a. <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	35
b. <i>Stakeholder Theory</i> (Teori Pemangku Kepentingan).....	37
2. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	38
3. Prinsip <i>Good Corporate Governanve</i>	40
a. <i>Transparency</i> (Keterbukaan Informasi)	40
b. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	41
c. <i>Responsibility</i> (Bertanggungjawab)	41
d. <i>Independency</i> (Kemandirian)	42
e. <i>Fairness</i> (Kewajaran).....	42
4. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	43
5. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	44
6. Pihak-Pihak yang terkait dalam <i>Good Corporate Governance</i>	45
a. Rapat Umum Pemegang Saham.....	45
b. Dewan Komisaris	46
c. Dewan Direksi.....	46
d. Komite Audit.....	46
e. Komite Kebijakan Resiko	47
f. Komite Remunerasi dan Nominasi	47



7. Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	47
a. Tahap Persiapan	48
b. Tahap Implementasi	49
c. Tahap Evaluasi	49
8. Mekanisme Penerapan Organ <i>Corporate Governance</i>	50
a. Dewan Komisaris Independen.....	51
b. Dewan Direksi.....	53
c. Komite Audit.....	55
d. Kepemilikan Institusional	57
C. Struktur Modal	58
1. Teori Struktur Modal.....	58
a. <i>Trade-Off Theory</i>	58
b. <i>Pecking Order Theory</i>	59
2. Pengertian Struktur Modal	60
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal	62
4. Pengukuran Struktur Modal	65
a. <i>Debt To Asset Ratio</i> (DAR).....	65
b. <i>Debt To Equity Ratio</i> (DER)	66
D. Profitabilitas	66
1. Pengertian Profitabilitas	66
2. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas	67
a. <i>Gross Profit Margin</i> (GPM).....	67
b. <i>Operating Profit Margin</i> (OPM).....	68
c. <i>Net Profit Margin</i> (NPM).....	68
d. <i>Total Asset Turn Over</i> (TATO).....	69
e. <i>Return On Assets</i> (ROA).....	69
f. <i>Return On Equity</i> (ROE).....	70
E. Pengaruh Antar Variabel	71
F. Kerangka Model Konseptual dan Hipotesis	77
1. Model Konsep	77
2. Model Hipotesis	78

BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian.....	81
B. Lokasi Penelitian.....	82
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	82
1. Definisi Konseptual Variabel.....	82
2. Definisi Operasional Variabel.....	87
D. Populasi dan Sampel	93
1. Populasi	93
2. Sampel.....	94
E. Teknik Pengumpulan Data	99
F. Metode Analisis Data.....	100
1. Analisis Statistik Deskriptif	100
2. Analisis Statistik Inferensial	101

a. Uji Asumsi Klasik.....	101
1) Uji Normalitas.....	101
2) Uji Multikolinieritas.....	102
3) Uji Heteroskedastisitas.....	102
4) Uji Autokorelasi.....	103
b. Uji Linier Berganda.....	104
c. Uji Hipotesis.....	105
1) Koefisien Determinasi (R^2).....	105
2) Uji F.....	106
3) Uji t.....	107

BAB IV PEMBAHASAN.....	109
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	109
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia.....	109
2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia.....	111
B. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian.....	111
C. Penyajian Data.....	131
D. Analisis Data.....	147
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	147
2. Analisis Statistik Inferensial.....	152
a. Uji Asumsi Klasik.....	152
1) Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi 1 ($Y_1 = ROA$).....	153
a) Uji Normalitas.....	153
b) Uji Multikolinieritas.....	156
c) Uji Heteroskedastisitas.....	157
d) Uji Autokorelasi.....	158
2) Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi 2 ($Y_2 = ROE$).....	160
a) Uji Normalitas.....	160
b) Uji Multikolinieritas.....	163
c) Uji Heteroskedastitas.....	165
d) Uji Autokorelasi.....	166
b. Uji Linier Berganda.....	168
1) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1.....	169
2) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2.....	173
c. Uji Hipotesis.....	177
1) Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 1 ($Y_1 = ROA$).....	177
a) Koefisien Determinasi (R^2).....	177
b) Uji F.....	178
c) Uji t.....	180
2) Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 2 ($Y_2 = ROE$).....	183
a) Koefisien Determinasi (R^2).....	183
b) Uji F.....	184
c) Uji t.....	185
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	188



BAB V PENUTUP	223
A. Kesimpulan	223
B. Saran.....	226
DAFTAR PUSTAKA	228
LAMPIRAN	236



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	30
2.	Tabel Definisi Konseptual Variabel.....	83
3.	Tabel Definisi Operasional Variabel.....	92
4.	Sampel Penelitian (<i>Purposive Sampling</i>).....	95
5.	Hasil Pemilihan Sampel	98
6.	Daftar Sampel.....	99
7.	Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	104
8.	Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2012-2016	132
9.	Jumlah Dewan Direksi Tahun 2012-2016	134
10.	Jumlah Komite Audit Tahun 2012-2016.....	136
11.	Presentase Kepemilikan Institusional Tahun 2012-2016.....	138
12.	Nilai <i>Debt to Asset Ratio</i> Tahun 2012-2016	140
13.	Nilai <i>Debt to Equity Ratio</i> Tahun 2012-2016	141
14.	Nilai <i>Return On Assets</i> Tahun 2012-2016	143
15.	Nilai <i>Return On Equity</i> Tahun 2012-2016.....	145
16.	Analisis Statistik Deskriptif	148
17.	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji Normalitas Model Regresi 1) ...	155
18.	Hasil Uji Multikolinearitas (Model Regresi 1)	156
19.	Hasil Uji <i>Durbin Watson</i> (Model Regresi 1)	159
20.	Hasil Uji <i>Run Test</i> (Model Regresi 1).....	160
21.	Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (Uji Normalitas Model Regresi 2) ...	163
22.	Hasil Uji Multikolinearitas (Model Regresi 2)	164
23.	Hasil Uji <i>Durbin Watson</i> (Model Regresi 2)	167
24.	Hasil Uji <i>Run Test</i> (Model Regresi 2).....	168
25.	Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1.....	169
26.	Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2.....	173
27.	Koefisien Determinasi Model Regresi 1	178
28.	Hasil Uji Statistik F Model Regresi 1	179
29.	Hasil Uji Statistik t Model Regresi 1	180
30.	Koefisien Determinasi Model Regresi 2	183
31.	Hasil Uji Statistik F Model Regresi 2	184
32.	Hasil Uji Statistik t Model Regresi 2	186



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	<i>Asian CG Watch Market Score</i>	3
2.	<i>Corporate Governance Perception Index</i> di ASEAN.....	4
3.	Skor <i>Indeks Corporate Governance</i> Perusahaan Publik di Indonesia .	13
4.	Grafik Perbandingan Total Utang dan Total Ekuitas Perbankan	16
5.	Model Konsep	77
6.	Model Hipotesis	78
7.	Grafik Histogram (Uji Normalitas Model Regresi 1)	153
8.	Grafik Normal <i>Probability Plot</i> (Uji Normalitas Model Regresi 1)....	154
19.	Uji Heteroskedastitas <i>Scatterplot</i> (Model Regresi 1).....	158
10.	Grafik Histogram (Uji Normalitas Model Regresi 2)	161
11.	Grafik Normal <i>Probability Plot</i> (Uji Normalitas Model Regresi 2)....	162
12.	Uji Heteroskedastitas <i>Scatterplot</i> (Model Regresi 2).....	166



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia memicu setiap aktivitas ekonomi untuk menciptakan sebuah persaingan bisnis bagi seluruh perusahaan. Persaingan bisnis secara global dibutuhkan untuk mengembangkan eksistensi perusahaan dalam perluasan pasar dan penghasil laba *optimum* atau laba yang tinggi serta menarik minat investor dan calon pemegang saham agar tertarik berinvestasi pada perusahaan potensial. Sebagai organisasi pencari laba, persaingan bisnis dilakukan setiap perusahaan agar memperoleh laba maksimum jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan bagi pemegang saham (*shareholder*) sebagai upaya tujuan utama perusahaan (Tampubolon, 2013:3).

Upaya dalam peningkatan kesejahteraan *shareholder*, pada perusahaan ditemukan perbedaan kepentingan antara pihak pengelola perusahaan (*agent*) dengan pihak pemodal dan pemegang saham (*principals*) dalam menjalankan aktivitas pengelolaan usaha. Perbedaan kepentingan ini disebut dengan *agency problem* yang terjadi pada saat pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada pihak profesional dalam hal ini direksi atau manajer yang mana pihak manajer berusaha meningkatkan keuntungan pribadi dan tidak lagi mementingkan kepentingan para pemegang saham (Sitanggang, 2014:9). Cara untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate*

Governance atau GCG berfungsi sebagai alat dan landasan dalam pengelolaan perusahaan agar para organ didalamnya bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama (Hamdani, 2016:31).

Istilah *good corporate governance* tidak asing bagi perusahaan terbuka publik. Istilah ini pertama kali dipublikasikan oleh Cadbury Committee, Inggris pada tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang hingga saat ini disebut sebagai *Cadbury Report* (Agoes, 2014:101). Banyak pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian *Good Corporate Governance*, namun inti dari *Good Corporate Governance* mengacu pada kajian *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur hubungan antara *stakeholder* dan *shareholder* perusahaan berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka yang menjadi landasan dalam pengendalian perusahaan (Effendi, 2016:3). Pengimplementasian *Good Corporate Governance* diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengendalian dan pengelolaan perusahaan.

Nampaknya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan. Padahal Indonesia tergabung didalam sebuah organisasi independen non-profit di asia *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dan memiliki lembaga khusus dibidang GCG yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) (Hamdani, 2016:111). Berdasarkan hasil laporan ACGA dalam *Asean Corporate Governance Watch 2016* (CG Watch) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-11 dalam laporan CG

Watch Market Score 2010 – 2016. Peringkat ini menandakan ketertinggalan dan masih buruknya tata kelola perusahaan Indonesia dibandingkan dengan negara – negara Asia lainnya. Berikut ditampilkan hasil peringkat pada Gambar 1:

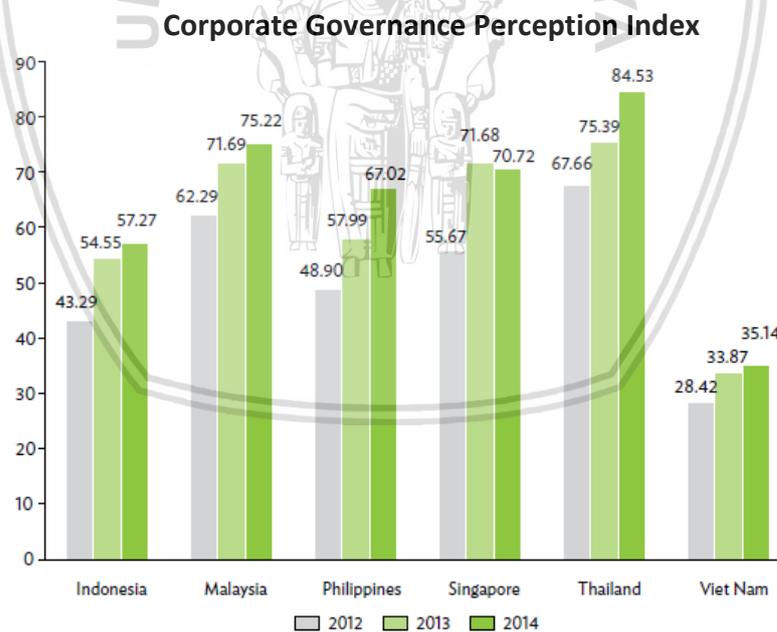
CG Watch market scores: 2010 to 2016				
(%)	2010	2012	2014	2016
Australia	-	-	-	78
1. Singapore	67	69	64	67
2. Hong Kong	65	66	65	65
3. Japan	57	55	60	63
4. Taiwan	55	53	56	60
5. Thailand	55	58	58	58
6. Malaysia	52	55	58	56
7. India	49	51	54	55
8. Korea	45	49	49	52
9. China	49	45	45	43
10. Philippines	37	41	40	38
11. Indonesia	40	37	39	36

Gambar 1: Asian CG Watch Market Score 2010 – 2016

Sumber: Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan Commission on Law and Social Action (CLSA) dalam CG Watch Special Report 2016

Berdasarkan Gambar 1, hasil survey indeks *Corporate Governance* yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA) menunjukkan bahwa indeks Asian Corporate Governance Association (ACGA) di Asia masih tergolong rendah. Menurut penelitian Asian Development Bank (ADB), berkaitan dengan rendahnya indeks *corporate governance* di Indonesia terjadi karena imbas dampak krisis ekonomi moneter yang melanda negara Asia pada tahun 1997 – 1998. Penyebab krisis ekonomi ini salah satunya disebabkan mekanisme pengawasan antara dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit dalam perusahaan tidak dapat bekerja secara profesional dan belum berfungsi efektif dalam melindungi pemegang saham (Sutedi, 2012:2). Faktor lainnya pada saat

yang bersamaan Indonesia belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* karena keterlambatan masuknya implementasi GCG di Indonesia (Effendi, 2016:23). Minimnya kesadaran tentang fungsi penerapan dan perbaikan *corporate governance* masih rendah pada saat itu. Dampak dari keterlambatan perbaikan *corporate governance* di Indonesia juga masih dirasakan pada periode 2012-2014, dimana perolehan nilai indeks *corporate governance* Indonesia lebih rendah bila dibandingkan negara di ASEAN atau Asia Tenggara lainnya. Fenomena ini didukung oleh data lain dari hasil survey *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dilakukan oleh Asean Development Bank ditunjukkan oleh Gambar 2 dengan sajian grafik dibawah ini



Source: ACMF Working Group D Secretariat 2014.

Gambar 2: Corporate Governance Perception Index di ASEAN
Sumber: Asean Development Bank Survey 2014

Berdasarkan gambar 2 grafik *Corporate Governance Perception Index* di Asean menunjukkan bahwa nilai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

di Indonesia hanya dapat mengungguli satu negara di ASEAN saja yaitu Vietnam selama tiga tahun periode 2012, 2013, dan 2014 secara berturut-turut sebesar 43,29 ; 54,55 ; dan 57,27. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan *go-public* memerlukan upaya perbaikan fungsi dan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih besar dan lebih ketat.

Upaya perbaikan *corporate governance* di Indonesia baru dimulai awal tahun 2000 ketika pendatangannya Nota Kesepakatan antara Indonesia dengan IMF disertai dengan dibentuknya lembaga dibawah pemerintah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) dan untuk sektor swasta diwakili oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagai perkumpulan asosiasi bisnis. Dibentuknya kedua organisasi ini sebagai upaya agar terlaksananya mekanisme dan fungsi dari *Good Corporate Governance* melalui pemantau perbaikan secara berkala (Sutedi, 2012:72).

Tujuan dan fungsi lain perlunya penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan melalui pengambilan keputusan yang bijak dan pengelolaan bisnis secara profesional. Tujuan ini tercantum sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* yang mengatakan bahwa untuk memaksimalkan nilai perusahaan terbuka dan meningkatkan kinerja perusahaan diperlukan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional (Effendi, 2016:7).

Pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja keuangan juga diatur pada perusahaan perbankan dalam Surat Edaran No. 15 /15/DPNP/ 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus mematuhi lima prinsip dasar GCG (Hamdani, 2016:187).. Pencapaian tujuan GCG diperlukan mekanisme penerapan yang tersistem secara profesional untuk mengontrol setiap aktivitas dan kebijakan yang diterapkan. Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* didasarkan pada susunan struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang melibatkan organ-organ perusahaan di dalamnya. Organ-organ perusahaan dalam struktur GCG antara lain terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Kebijakan Resiko, Komite Remurasi dan Nominasi (Hamdani, 2016:80).

Susunan struktur *Good Corporate Governance* yang dianut di Indonesia adalah model *two board system* atau pemisahan fungsi antara dewan komisaris dan dewan direksi (Agoes, 2014:102). Di dalam model *two board system* terdapat empat organ penting sebagai pendukung terlaksananya mekanisme *Good Corporate Governance*. Organ-organ perusahaan yang terlibat antara lain pemegang saham institusi yang tercantum dalam RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi. Tanpa adanya hubungan RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi yang baik maka perusahaan akan kesulitan mencapai tujuan perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Agoes, 2014:102).

Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan tugas dengan aturan dan pedoman keuangan

secara baik dan benar. Kinerja keuangan yang baik akan memudahkan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit (Fahmi, 2012:2). Kemampuan manajemen dalam manajemen kinerja keuangan perusahaan untuk memperoleh laba disebut dengan profitabilitas (Utari dkk, 2014:63). Dalam pengukuran laba atau profit dapat dilihat dari laporan keuangan menggunakan rasio keuangan (Syamsuddin, 2011:37).

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Alasan memilih Rasio *Return On Asset* (ROA) adalah karena rasio ROA dapat secara detail menjelaskan berapa laba yang berhasil diperoleh dari penggunaan aktiva. Rasio ROA mampu memberikan pengukuran laba perusahaan yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan (Horne dan Wachowiz, 2009:215). Rasio ROA dapat berguna untuk mengetahui keadaan posisi perusahaan dan berguna sebagai kepentingan kontrol maupun perencanaan perusahaan (Munawir, 2007:85). Alasan memilih rasio *Return On Equity* (ROE) karena perusahaan dapat mengukur laba yang dihasilkan berdasarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan yang ditanamkan oleh para pemegang saham preferen (Syamsuddin, 2011:64). Rasio ROE dapat menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi yang ditanamkan berdasarkan nilai buku para pemegang saham yang digunakan untuk membandingkan kinerja dua perusahaan dalam sebuah industri yang sama. Rasio ROE yang tinggi mencerminkan peluang investasi yang baik dan manajemen biaya efektif (Munawir, 2007:101). Menurut penelitian Zabri (2015) kedua rasio ini ROA dan ROE mudah dipahami oleh para

investor dan sering dijadikan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi untuk memperoleh profitabilitas

Pada penelitian ini mengkaji pengaruh mekanisme organ *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham institusional terhadap kinerja keuangan yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan *Rasio Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Alasan dipilihnya keempat organ GCG adalah karena berdasarkan model *two board system* pada perusahaan perbankan dan sesuai dengan Pedoman GCG Perbankan 2014 RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi adalah sebagai top manajemen yang memiliki fungsi pengawas, pelaksana, dan pengontrol jalannya perusahaan untuk tercapainya tujuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham mengatur porsi kepemilikan saham institusi perusahaan untuk mengontrol kinerja dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya wajib dibantu oleh dewan komisaris independen dan komite audit. Pengawasan kinerja dewan direksi oleh dilakukan oleh komisaris independen sedangkan tugas pengkoreksian hasil laporan keuangan dilakukan oleh komite audit. Dewan Direksi dalam salah satu tugasnya adalah mengelola perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Fungsi organ GCG ini tercantum dalam UU No. 40 thn 2007 Perusahaan Terbatas.

Penelitian mengenai penerapan *corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan ini telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan masing – masing organ GCG dapat berpengaruh terhadap

profitabilitas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Javeed (2015) dan Ong dkk (2015) yang meneliti pengaruh *board size* (dewan direksi) dan *board independence* (komisaris independen) sementara indikator kinerja keuangan diproyeksikan dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Hasil penelitian Javeed (2015) yang dilakukan di Pakistan menunjukkan *board size* dan *board independence* memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Begitu juga dengan hasil penelitian Ong dkk (2015) yang dilakukan di Malaysia yang menunjukkan *board size* dan *board independence* berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE.

Dalam hal ini dewan direksi dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan karena direksi dan komisaris independen dipandang sebagai kunci utama keberhasilan *Good Corporate Governance* karena dua hal yaitu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan pengambilan keputusan yang baik dan berusaha mengembalikan kepercayaan investor (Sutedi, 2012:125-126). Berkaitan dengan variabel kepemilikan institusional, menurut studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* menemukan bahwa di Indonesia, rata-rata lima pemegang saham terbesar perusahaan (istitusi) memegang kontrol 57% - 65% dari saham perusahaan yang menentukan keuntungan bagi perusahaan (Sutedi, 2012:6). Sedangkan komite audit dianggap penting dalam mempengaruhi profitabilitas karena komite audit memiliki peranan penting dalam pengawasan dan penyajian laporan keuangan yang fit (Sutedi, 2012:164).

Penelitian yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Rimardhani (2016) meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* dengan variabel yang diprosikan

oleh dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan oleh ROA. Penelitian serupa dilakukan oleh Arifani (2013) yang meneliti pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas. Penelitian Arifani (2013) hampir sama dengan penelitian Rimardhani (2016) yang membedakan adalah pada indikator *Good Corporate Governance* tidak menggunakan variabel dewan direksi dan menggunakan variabel ROE untuk profitabilitas. Hasil penelitian Arifani (2013) menunjukkan terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *Return On Equity* (ROE). Kedua hasil penelitian ini menunjukkan *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

Upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba atau peningkatan profitabilitas adalah apabila perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendanai biaya operasional dan tambahan modal. Apabila kebutuhan dana terpenuhi maka perusahaan tidak perlu memotong tingkat keutungan atau profitabilitasnya atau menahan laba untuk menutupi biaya operasional perusahaan. Dana dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Menurut Bringham dan Gapenski (2003) dalam Rodoni (2014:129) dana kebutuhan belanja perusahaan dapat terpenuhi dengan cara menggunakan proporsi perbandingan utang jangka panjang, ekuitas dan penerbitan saham. Perimbangan kebutuhan dana belanja perusahaan ini diatur di dalam struktur modal.

Permasalahan utama dalam struktur modal adalah bagaimana agar perusahaan dengan cepat memadukan komposisi dana permanen yang

meminimumkan biaya modal dan biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham (Rodoni, 2014:129). Kaitannya dengan peningkatan laba perusahaan dan nilai bagi pemegang saham maka permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara pembentukan struktur modal optimal. Perusahaan pada umumnya mempelajari situasi untuk mengambil kesimpulan tentang struktur modal optimal dengan menentukan struktur modal sasaran (*target capital structure*). Penentuan struktur modal sasaran dapat dilihat apabila jika struktur modal menunjukkan rasio utang dengan ekuitas diatas tingkat sasaran maka perusahaan akan menggunakan ekuitas atau modal sendiri sebagai pembiayaan, sementara jika rasio utang berada dibawah tingkat sasaran maka perusahaan akan menghimpun dana dengan menerbitkan utang (Brigham dan Houston, 2011:155). Pencapaian struktur modal optimal dalam melakukan pendanaan melalui utang diharapkan mampu meningkatkan laba atau profitabilitas perusahaan.

Pendanaan dengan utang atau disebut juga *leverage* dalam struktur modal dapat diukur dengan rasio utang. Rasio utang dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan kemampuan seberapa besar jumlah aktiva perusahaan diperoleh yang dibiayai oleh utang sedangkan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan seberapa besar jumlah modal sendiri perusahaan diperoleh yang dibiayai oleh utang atau menghitung perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Syamsuddin, 2011:71). Kedua rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat utang perusahaan yang sering digunakan

sebagai bahan pertimbangan investor mewakili rasio utang lainnya dalam melihat kinerja keuangan perusahaan. Pendanaan dengan utang memiliki keunggulan bagi laba atau profitabilitas perusahaan. Apabila perusahaan dalam kondisi struktur modal yang baik maka pengembalian atas utang dapat menutupi biaya operasional dan laba perusahaan akan cenderung tetap atau meningkat (Bringham dan Houston, 2011:153).

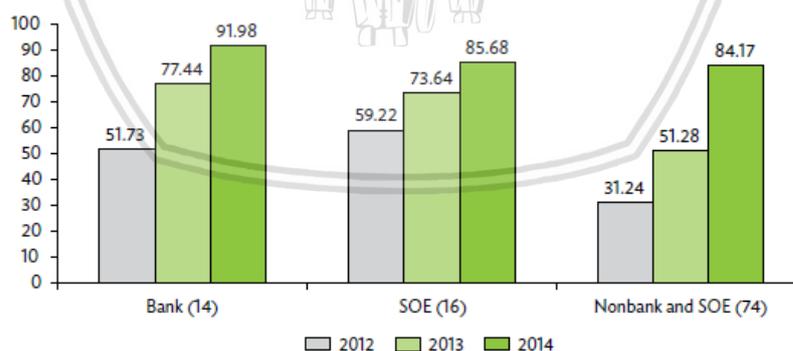
Penelitian mengenai pengaruh struktur modal dilakukan oleh Pratheepkanth (2011) dengan judul *Capital Structure and Financial Performance: Evidence From Selected Business Companies In Colombo Stock Exchange Sri Lanka*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh *Debt Equity Ratio* (DER) terhadap profitabilitas perusahaan baik menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) ataupun terhadap *Return on Equity* (ROE). Di Indonesia penelitian serupa tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas dilakukan oleh Bonatua (2015). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara *Debt to Assets Ratio* (DAR) terhadap *Return on Asset* (ROA) maupun terhadap *Return on Equity* (ROE) dan *Debt Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Penelitian yang menggabungkan pengaruh konsep *corporate governance* dan struktur modal masih jarang ditemukan. Terdapat satu penelitian yang hampir mirip dengan konsep penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukasa (2016) namun variabel *corporate governance* diprosikan menggunakan *corporate governance index* (CGPI).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun pada periode 2012 – 2016. Alasan

melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga tempat diterbitkannya laporan keuangan perusahaan yang sahamnya telah *go-public* dengan kelengkapan data yang akurat. Di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercantum variabel-variabel yang dibutuhkan sebagai objek peneliti.

Perusahaan – perusahaan yang dipilih menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016. Ada beberapa faktor dan pertimbangan yang menjadi alasan dalam memilih perusahaan perbankan menjadi objek penelitian. Faktor atau alasan pertama adalah karena sektor perbankan memiliki nilai indeks capaian *Corporate Governance* yang lebih baik bila dibandingkan dengan sektor lainnya seperti yang dijelaskan oleh Gambar 3 dalam sajian grafik dibawah ini

Indonesia-Corporate Governance Scores for Highly Regulated Publicly Listed Companies Other



SOE = state-owned enterprise.

Source: Indonesian Institute of Corporate Directorship 2014.

Gambar 3: Skor Indeks *Corporate Governance* untuk perusahaan publik di Indonesia

Sumber: Asean Development Bank Survey 2014

Berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan oleh Asian Development Bank skor nilai indeks *corporate governance* perusahaan perbankan Indonesia menunjukkan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan *State Owned Enterprise* (SEO) atau yang disebut juga dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan non-perbankan. Perolehan skor indeks *corporate governance* perbankan yang lebih unggul daripada perusahaan lainnya ini berlangsung selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 sebesar 77,44 dan di tahun 2014 sebesar 91,98. Hasil ini disebabkan karena baik perusahaan perbankan peraturan yang mengatur tata cara penerapan dan pelaksanaan *corporate governance* secara ketat dan khusus yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004. Pelaksanaan penerapan *corporate governance* bagi perusahaan perbankan juga diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *Corporate Governance Roadmap for Banking* melalui Peraturan OJK (POJK) nomor 55 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.

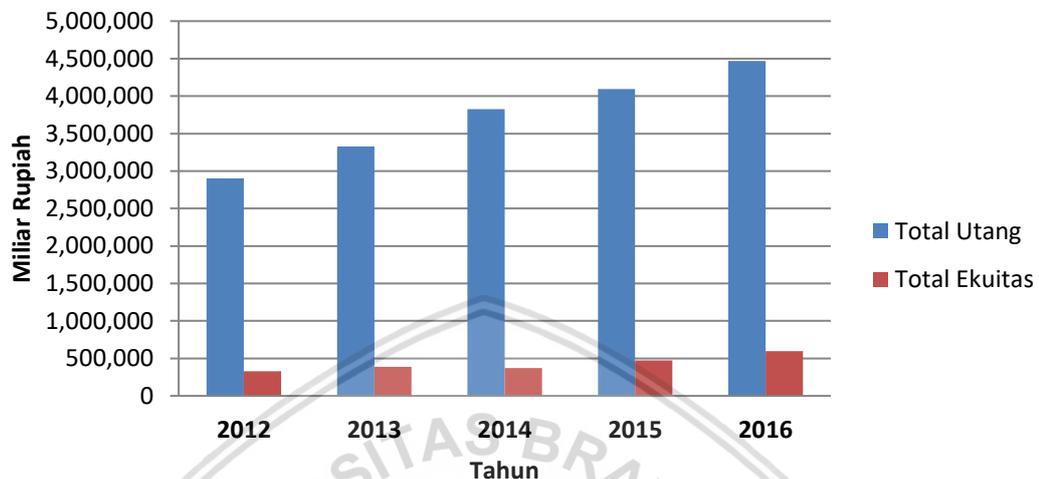
Faktor kedua memilih perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian adalah karena delapan perusahaan perbankan di Indonesia masuk sebagai top 10 besar dari 50 perusahaan terbuka yang memiliki indeks *corporate governance* terbaik di Indonesia. Dominasi beberapa bank umum pada daftar indeks *Corporate Governance* terbaik di Indonesia ini berlangsung selama empat tahun selama 2012-2015 berdasarkan hasil survey dari Asean Development Bank 2016. Bank-bank tersebut antara lain Bank Central Asia (BBCA) yang menempati peringkat pertama, Bank CIMB Niaga (BNGA), Bank Danamon (BDMN), Bank

Mandiri, (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank OCBC (NISP), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan Bank Tabungan Negara Nasional (BBTN).

Di dalam penelitian ini juga meneliti konsep struktur modal perusahaan perbankan yang dilihat melalui tingkat total utang atau pinjaman yang diterima dan tingkat modal sendiri atau modal saham. Berdasarkan data laporan Statistik Perusahaan Perbankan Indonesia tingkat utang dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan perbankan mencapai angka ratusan miliar rupiah per tahunnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya struktur modal merupakan pembelanjaan atau pendanaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dan modal sendiri (Rodoni, 2014:129).

Pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan perbankan berasal dari utang atau pinjaman yang diterima dan jumlah modal saham atau modal sendiri perusahaan perbankan. Berdasarkan data laporan Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan SPI OJK tingkat utang atau pinjaman yang diterima oleh seluruh perusahaan perbankan umum tercatat selama lima tahun berturut-turut terhitung mulai tahun 2012-2016 adalah sebesar 1.382.994 miliar rupiah dan modal pinjaman yang berhasil diperoleh oleh seluruh perusahaan perbankan umum adalah sebesar 181.195 miliar rupiah. Pendanaan ini diperoleh dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri (SPI OJK 2016). Data lain yang menunjukkan gambaran kondisi struktur modal perusahaan perbankan adalah dengan melihat grafik perbandingan tingkat total utang dan modal saham berdasarkan laporan keuangan perusahaan perbankan umum yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 yang dijelaskan melalui Gambar 4:

Perbandingan Tingkat Total Utang dan Total Ekuitas Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI 2012-2016



Gambar 4: Grafik Perbandingan Tingkat Total Utang dan Modal Saham Perusahaan Perbankan Indonesia pada periode tahun 2012-2016

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan terdaftar di BEI periode 2012-2016, data diolah penulis 2018

Berdasarkan data Gambar 4 grafik perbandingan tingkat utang dan modal saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana pada struktur modal dengan cara pendanaan melalui utang daripada menggunakan sumber dana internal berupa modal atau ekuitas. Gambar 4 menunjukkan grafik tingkat total utang perusahaan perbankan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat total ekuitas. Tingkat total utang perusahaan perbankan mencapai angka berkisar hampir 4.500.000 miliar pada tahun 2016. Tingkat utang perusahaan perbankan selalu meningkat setiap tahunnya, namun kondisi berbeda terjadi pada tingkat total modal perusahaan perbankan yang mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kembali meningkat pada tahun 2015. Tingkat total utang selama lima tahun periode 2012-2016 secara berturut-turut

adalah pada tahun 2012 sebesar 2.903.548 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 3.329.420 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 3.823.853 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 4.094.049 miliar rupiah, dan pada tahun 2016 sebesar 4.468.199 miliar rupiah. Selisih jauh nampak pada total modal saham yang dimiliki perusahaan perbankan yang listing di BEI secara lima tahun berturut-turut adalah pada tahun 2012 sebesar 329.305 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 390.470, tahun 2014 sebesar 372.506, tahun 2015 sebesar 475.224, dan pada tahun 2016 sebesar 597.175. Tingkat utang yang tinggi diharapkan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dana perusahaan perbankan untuk meningkatkan laba.

Alasan lain memilih sektor perusahaan perbankan karena menurut Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa bank dan institusi perbankan umum memiliki peran penting dalam perekonomian negara sebagai intermediasi sektor keuangan yaitu dalam cakupan mikro dan makro. Secara mikro perusahaan perbankan berfungsi menyalurkan kembali dana nasabah yang memiliki kelebihan dana kepada pelaku usaha dan perorangan yang sedang membutuhkan dana, sedangkan secara makro industri perbankan berperan sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian kas negara dan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter (Pedoman GCG Perbankan, 2004).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
2. Apakah Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
7. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
8. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?

9. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
10. Apakah Dewan Direksi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
11. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
12. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
13. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?
14. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE).

3. Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
4. Mengetahui pengaruh Dewan Direksi secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
5. Mengetahui pengaruh Komite Audit secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
6. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
7. Mengetahui pengaruh *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
8. Mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).
9. Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).
10. Mengetahui pengaruh Dewan Direksi secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).
11. Mengetahui pengaruh Komite Audit secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).
12. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).
13. Mengetahui pengaruh *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).

14. Mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Kontribusi Akademis

hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan bagi kalangan akademis yang membutuhkan, khususnya yang ingin melanjutkan penelitian berkaitan dengan mekanisme *Good Corporate Governance* optimalisasi laba.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi perusahaan dengan memperhatikan pengelolaan perusahaan dengan melihat dari jumlah dewan direksi, pengawasan komisaris independen, kinerja komite audit, dan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan baik kepemilikan institusi lokal maupun institusi asing. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memberikan informasi mengenai kondisi struktur modal perusahaan dengan memperhatikan tingkat pemakaian utang perusahaan atas pemakaian modal dan aktiva.

- b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu pihak manajemen perusahaan terutama perusahaan perbankan untuk mengetahui sejauh mana tingkat

efektifitas mekanisme organ *corporate governance* yang diterapkan dapat berjalan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu dapat membantu manajemen perusahaan untuk menentukan metode pembuatan struktur modal yang optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan yang ada didalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian penjelasan penelitian terdahulu, teori – teori yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, struktur modal, profitabilitas, kerangka penelitian, model konsep, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian metode penelitian yang digunakan, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi penelitian, dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data ,dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan hasil perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh *corporate governance* dan struktur modal terhadap kinerja keuangan untuk memaksimalkan profitabilitas.

1. Pratheepkanth (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh Struktur Modal yang diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) terhadap profitabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) pada 30 perusahaan terpilih yang listing di bursa Colombo Stock Exchange Srilanka periode 2005-2009. Alat uji menggunakan uji statistika regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan *Debt Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM). Hasil pengujian secara parsial menunjukkan *Debt Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

2. Hisamudin dan Tirta (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada dan tidaknya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah

periode 2008-2010. Sampel pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang tertib menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan *Good Corporate Governance* selama periode 2008-2010. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Dewan Direksi, Ukuran Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit. Variabel terikat *Return On Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif indikator *Good Corporate Governance* yang digunakan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah (ROA dan ROE).

3. Mareta (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial leverage* yang diprosikan oleh *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap profitabilitas yang diprosikan oleh *Return on Equity* (ROE). Sampel penelitian ini dilakukan pada 16 perusahaan sektor Makanan dan Minuman periode 2009-2011. Alat uji menggunakan uji statistika regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel *financial leverage* (DAR dan DER) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Secara Parsial DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sedangkan DAR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROE.

4. Innocent dkk (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Financial Leverage* yang diprosikan oleh *Debt to Assets Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio*

(DER), dan *Interest Coverage Ratio* (ICR) terhadap kinerja keuangan yang diukur oleh *Return on Assets* (ROA) periode 2001-2012. Sampel penelitian dilakukan pada 6 enam perusahaan farmasi terbesar di Nigeria berdasarkan ketertiban menerbitkan laporan keuangan selama 12 tahun yang tercatat di Nigeria Stock Exchange (NSE). Hasil pengujian OLS menunjukkan bahwa *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA). *Interest Coverage Ratio* (ICR) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA).

5. Bonatua (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 - 2013. Struktur modal diukur menggunakan variabel *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER), sedangkan profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Sampel dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2013 selama empat tahun. Hasil pengujian menunjukkan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)

6. Javeed (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Capital Structure* terhadap profitabilitas yang dihasilkan Perusahaan Non-Keuangan di Pakistan periode 2008-2012. Sampel dalam penelitian ini adalah 155 perusahaan *non-financial* yang listing di *Karachi Stock Exchange* India. Penelitian ini menggunakan variabel bebas *board size*, *board independence*, *CEO duality*, *managerial ownership*, *ownership concentration*, dan *leverage* yang diproksikan oleh *debt to assets ratio* (DAR). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan dan pengaruh positif signifikan pada *board size*, *managerial ownership*, *ownership concentration*, *CEO duality* terhadap kinerja keuangan (ROA), dan ditemukan pengaruh hubungan negatif signifikan pada *board independence* dan *capital structure* yang diproksikan oleh DAR terhadap kinerja keuangan (ROA).

7. Rimardhani (2016)

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh variabel independen *Good Corporate Governance* diproksikan dengan indikator Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit sedangkan variabel dependen diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Teknik pemilihan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 12 perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

8. Septiana (2016)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan profitabilitas diukur menggunakan tingkat *return on equity* (ROE). Teknik pemilihan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling* dan data *outlier* sehingga diperoleh 8 perusahaan Makanan dan Minuman yang tercatat di BEI dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Sedangkan Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

9. Sukasa (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* yang diukur oleh *Corporate Governance Preception Index* (CGPI) dan

indikator variable struktur modal adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Kinerja keuangan diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang mendapat peringkat CGPI periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 perusahaan diperoleh dari metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CGPI berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan DER tidak berpengaruh terhadap ROA; CGPI berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sedangkan DAR dan DER tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.

10. Palaniappan G. (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* yang diukur dengan variabel independen *Board Size*, *Board Independence*, *Board Meetings* dan *CEO Duality* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan dua variabel dependen *Return On Assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Penelitian ini dilakukan pada 275 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bollywood Stock Exchange India periode 2011-2015. Pengujian menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *Board Size*, *Board Independence*, *Board Meetings*, dan *CEO duality* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan hasil sebaliknya menunjukkan variabel independen *Board Size*, *Board Independence*, *Board Meetings* dan *CEO duality* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen *Return on Equity* (ROE).

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Teknik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pratheepkanth (2011)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : Debt to Equity Ratio (DER) Variabel dependen : <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Return On Equity</i> , NPM, GPM 	Hasil Pengujian Uji t menunjukkan terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial rasio DER terhadap ROA dan ROE. Hasil lain menunjukkan DER berpengaruh positif signifikan terhadap NPM dan GPM	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen struktur Modal yang diprosikan rasio DER Menggunakan variabel dependen ROA dan ROE 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan variabel dependen Net Profit Margin (NPM) dan Gross Profit Margin (GPM) Periode, lokasi penelitian berbeda
2	Hisamuddin dan Tirta (2012)	<i>Partial Least Square</i>	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit Variabel dependen <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Return on Equity (ROE)</i> 	Terdapat pengaruh positif ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, pengawas syariah, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, terhadap ROA dan ROE	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit Variabel dependen diprosikan ROA dan ROE 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak Menggunakan variabel dewan pengawas syariah Perbedaan Lokasi penelitian dan periode penelitian

No	Nama Peneliti	Teknik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Mareta (2013)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Variabel Dependen : <i>Return on Equity</i> (ROE) 	<p>Hasil pengujian uji t menunjukkan Secara Parsial DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sedangkan DAR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROE.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen <i>leverage</i> yang diprosikan DAR dan DER Profitabilitas dihitung dengan ROE Menggunakan teknik regresi linier berganda 	<ol style="list-style-type: none"> Sampel Perusahaan berbeda Lokasi Penelitian berbeda Periode Penelitian 2014-2016
4	Innocent dkk (2014)	<i>Ordinary Least Square</i>	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Variabel Dependen : <i>Return on Assets</i> (ROA) 	<p>Hasil pengujian OLS menunjukkan bahwa <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dan <i>Debt Equity Ratio</i> (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. ICR berpengaruh positif terhadap ROA.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Struktur Modal dihitung dengan DAR dan DER Profitabilitas dihitung menggunakan ROA 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan variabel ICR Lokasi penelitian berbeda Periode penelitian lebih singkat

No	Nama Peneliti	Teknik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Bonatua (2015)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : (DAR), dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Variabel dependen Return on Assets dan <i>Return on Equity</i> (ROE) 	<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Return on Assets</i> dan <i>Return on Equity</i> (ROE), sementara <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh positif terhadap <i>Return on Assets</i> dan <i>Return on Equity</i> (ROE)	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel struktur modal yang diproksikan oleh DAR dan DER Menggunakan variabel rasio profitabilitas yang diproksikan oleh ROA dan ROE 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen dari konsep <i>corporate governance</i> Lokasi penelitian berbeda Periode penelitian lebih singkat
6	Javeed (2015)	Statistik deskriptif dan uji korelasi	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : <i>board size</i> (Dewan Direksi) <i>board independence</i> (Dewan Komisaris Independen) dan <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) Variabel dependen : <i>Return On Assets</i> (ROA) 	Terdapat hubungan dan pengaruh positif signifikan pada <i>board size</i> , <i>managerial ownership</i> , <i>ownership concentration</i> , <i>CEO duality</i> terhadap kinerja keuangan (ROA), dan ditemukan pengaruh hubungan negatif signifikan pada <i>board independence</i> dan <i>leverage</i> yang diproksikan oleh DAR terhadap ROA	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan Variabel independen <i>corporate governance</i> yang diproksikan oleh <i>board size</i> (Dewan Direksi) <i>board independence</i> (Dewan Komisaris Independen) dan DAR Profitabilitas diukur dengan (ROA) 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan <i>managerial ownership</i>, dan <i>CEO duality</i> Lokasi penelitian berbeda Periode penelitian 2014-2016

No	Nama Peneliti	Teknik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Rimardhani (2016)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit Variabel dependen <i>Return on Assets</i> (ROA) 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen GCG diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit Profitabilitas dihitung dengan ROA 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel dependen ROE juga Periode Penelitian 2014-2016
8	Septiana (2016)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Variabel dependen <i>Return on Equity</i> (ROE) 	Dewan komisaris independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Sedangkan Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.	<ol style="list-style-type: none"> <i>good corporate governance</i> diproksikan dengan independen Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi Profitabilitas diukur menggunakan ROE 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel dependen ROA juga Lokasi dan periode penelitian berbeda

No	Nama Peneliti	Teknik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9	Sukasa (2016)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : CGPI, DAR dan DER Variabel dependen <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Return on Equity (ROE)</i> 	Indek CGPI berpengaruh signifikan terhadap ROA tapi tidak terhadap ROE. DAR dan DER berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE	<ol style="list-style-type: none"> Struktur Modal diproksikan menggunakan rasio DAR dan DER Profitabilitas diukur menggunakan rasio ROE 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Corporate Governance</i> tidak menggunakan CGPI Variabel dependen ROA dan ROE Lokasi , periode penelitian berbeda
10	Palaniappan G. (2017)	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : <i>board size</i> (Dewan Direksi) <i>board independence</i> (Dewan Komisaris Independen) Variabel dependen <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Return on Equity ROE</i> 	Hasil penelitian menunjukkan <i>board size</i> , <i>board independence</i> , <i>board meetings</i> , dan CEO duality berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil sebaliknya <i>board size</i> , <i>board independence</i> , <i>board meetings</i> , dan CEO duality berpengaruh positif berpengaruh signifikan terhadap ROE	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen : <i>board size</i> (Dewan Direksi) <i>board independence</i> (Dewan Komisaris Independen) Variabel dependen ROA dan ROE Menggunakan teknik regresi linier berganda 	<ol style="list-style-type: none"> Variabel independen yang digunakan lebih beragam Lokasi dan periode penelitian berbeda

Sumber : Penelitian Terdahulu, data diolah 2017

B. Landasan Teori

1. Teori *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:13) terdapat 2 (dua) teori dasar yang berkaitan dengan mekanisme *Good Corporate Governance*. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dasar dan acuan dalam proses tata kelola perusahaan secara internasional, diantaranya sebagai berikut :

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan berfokus pada upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang serendah mungkin berdasarkan hubungan kontraktual antara *agent* dengan *principal*. *Agent* adalah pengelola perusahaan baik pemilik perusahaan beserta para jajaran direksi dan manajer, sementara *principal* terbagi menjadi dua yaitu pemegang saham dan pemberi pinjaman. Di dalam teori ini disebutkan bahwa kebutuhan perusahaan dalam skala prioritas yang besar, baik kebutuhan operasional, kebutuhan modal, dan keterampilan manajerial dipasok oleh para *principal* yaitu pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debt holders*) (Sutedi, 2012:16).

Dalam pemenuhan kebutuhan pasokan perusahaan yang besar maka akan terjadi perbedaan dalam hubungan keagenan atau hubungan kontrak yang melibatkan *agent* (pengelola perusahaan) dengan *principal* (investor). Konflik keagenan ini dinamakan *agency problem*, yaitu konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan manajer (*agent*) tidak selalu setuju dengan

keinginan dan keputusan yang dibuat oleh pemilik modal (*principal*) berdasarkan kepentingan *principal* (Hamdani, 2016:30).

Di dalam teori ini dijelaskan bahwa kepemilikan saham dominasi hanya dimiliki oleh *principal* (pemilik perusahaan dan pemberi pinjaman) sementara manajer bertugas memaksimalkan keuntungan (profitabilitas) perusahaan dan *return* yang tinggi bagi pemegang saham. Teori agensi berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan akan memicu timbulnya upaya masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya. Teori keagenan disini dapat dijadikan pedoman bagi pemilik perusahaan untuk lebih yakin kepada manajer dalam mengelola *return* yang sudah diinvestasikan, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran penyimpanan informasi untuk keuntungan manajer pribadi atau yang disebut dengan asimetri informasi (Sutedi, 2012:30).

Manajer seharusnya berkewajiban untuk memberikan rincian informasi kondisi perusahaan secara lengkap kepada pemilik berupa transparansi laporan keuangan. Namun karena kesenjangan yang diterima oleh manajer dan posisi pengelola perusahaan yang merasa bahwa mereka lebih mengetahui kondisi dan informasi perusahaan di masa mendatang mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan yang dinamakan perilaku (*moral hazard*). Laporan keuangan berfungsi bagi pemilik perusahaan dan pihak eksternal (pemegang saham dan pemberi pinjaman) untuk memproyeksikan ketidakpastian dan berguna sebagai alat

pengawas terhadap kinerja manajer, namun karena adanya perilaku *moral hazard* situasi tidak menguntungkan akan dialami oleh principal karena harus menanggung biaya keagenan atau *agency cost*. (Hamdani, 2016:31)

Agency cost merupakan biaya muncul dari konflik keagenan. Bentuk-bentuk dari *agency cost* yang ditimbulkan antara lain adalah *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham (*principal*) untuk memonitor dan mengawasi pengelola perusahaan berdasarkan jumlah saham yang beredar sesuai dengan skala perusahaan. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengelola perusahaan sebagai bentuk penetapan keputusan keberhasilan tata kelola perusahaan untuk menjamin bahwa manajer akan bertindak hanya sesuai dengan perintah dan kepentingan pemegang saham dan pemberi pinjaman. *Residual cost* adalah biaya yang dikorbankan oleh *principal* sebagai bentuk pengurangan keuntungan yang didapat oleh *principal* karena adanya perbedaan keputusan diantara manajer dan pemilik perusahaan. Dengan adanya mekanisme *good corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tingkat *agency cost* bagi perusahaan (Hamdani, 2016:31).

b. Stakeholder Theory (Teori Pemangku Kepentingan)

Teori *Stakeholder* sangat erat kaitannya dengan *corporate governance* karena hubungan simbiosis saling mempengaruhi antara pemangku kepentingan dengan pengelola perusahaan. Hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder* diungkapkan dalam *Organization for*

Economic Co-operation and Development atau disingkat OECD (2004:21) yang berbunyi “Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dibentuk oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial”.

Hak pemangku kepentingan dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban ikut berpartisipasi dalam membuat kerangka tata kelola perusahaan dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan demi mencapai tujuan dan menjaga stabilitas perusahaan (OECD, 2004:21). Dalam teori *stakeholders* peran *corporate governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk pencapaian profit dan *sustainability* secara seimbang (Hamdani, 2016:37).

2. Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1922 yang dimuat dalam laporannya berjudul *Cadbury Report* mendefinisikan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah sebuah pedoman tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dikhususkan kepada *shareholders* dan *stakeholders* pada umumnya supaya mencapai tingkat keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam memberikan wewenang dan pertanggungjawaban” (Daniri, 2005:7). Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Sutedi (2012:1) yang mengatakan bahwa *Good*

Corporate Governance merupakan pedoman bagi badan perusahaan yang di dalamnya termasuk (Pemilik perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Pemilik Modal, Pemegang Saham (*shareholders*) dan Pemangku Kepentingan) sebagai wujud dari suatu proses dan struktur untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan serta mewujudkan peningkatan nilai (*value*) bagi para pemegang saham dalam jangka panjang untuk kepentingan stakeholders berdasarkan etika bisnis dan tata perundang-undangan.

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai:

“The structure through which shareholders, directors, manager, set of board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance”. (“Suatu struktur yang terdiri dari pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja”).

Menurut Bank Indonesia, pengertian *Good Corporate Governance* tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat prinsip dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman yang bersasal dari proses dan

struktur tatanan beserta organ perusahaan di dalamnya yang mengatur hak dan kewajiban *stakeholder* dan *shareholder* dalam memberikan wewenang bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian dan kontrol jalannya proses suatu perusahaan.

3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Mekanisme penerapan *Good Corporate Governace* menjunjung 5 (lima) prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman untuk diterapkan pada seluruh kegiatan perusahaan agar keberlanjutan proses usaha dapat berjalan lancar. Prinsip-prinsip ini tercantum di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006, antara lain:

a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Keterbukaan yang dimaksudkan adalah keterbukaan dalam penyediaan informasi dan pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh pengelola perusahaan harus diungkapkan berdasarkan fakta yang ada, tepat waktu dan lengkap untuk disajikan kepada *stakeholders*. Kurang transparannya pengungkapan informasi akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah, dan berpengaruh pada keuntungan investasi para *stakeholder* maupun kemampuan untuk memprediksi resiko perusahaan. Keterbukaan dalam prinsip ini adalah kejujuran dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan stabilitas perusahaan serta menghindari manipulasi laporan keuangan (*creative accounting*) (Sutedi, 2012:11). Informasi laporan keuangan harus

disiapkan, diaudit, dan diungkapkan secara tidak terbatas sesuai dengan standar kualitas akuntansi yang tinggi (Effendi, 2016:12).

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Pihak pengelola perusahaan (*manajer*) diharuskan untuk membuat pelaporan keuangan dan pelaporan kegiatan operasional yang menyangkut segala kegiatan perusahaan yang wajar dan dapat dipercaya isi di dalamnya. Dalam pembuatan laporan tersebut harus termuat kejelasan fungsi, pelaksanaan dan peertanggungjawaban yang menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris (Effendi, 2016:13). Menurut Hamdani (2016:72) dalam menjalankan prinsip akuntabilitas perusahaan diwajibkan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan ukuran kinerja bagi semua jajaran perusahaan yang konsisten disertai dengan sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang mengikat. Dalam prinsip akuntabilitas terdiri dari tiga tingkatan yaitu; akuntabilitas individual, akuntabilitas tim, dan akuntabilitas korporasi untuk membentuk *Good Corporate Governance* yang efektif.

c. *Responsibility* (Bertanggungjawab)

Pihak pengelola perusahaan diwajibkan mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan tindakan manajerial kepada para *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi-misi, dan prinsip-prinsip perusahaan yang telah ditetapkan (Effendi, 2016:14). Menurut Hamdani (2016:75) selain pertanggungjawaban kegiatan

pengelolaan perusahaan maka perusahaan juga harus menerapkan bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat (*corporate social responsibility*) dan lingkungan eksternal perusahaan untuk memperoleh pengakuan atau penilaian yang baik dari masyarakat atau disebut *good corporate citizen*.

d. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip kemandirian yang dimaksudkan adalah perusahaan diwajibkan dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan peran dan tugas masing-masing organ tanpa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Masing-masing organ perusahaan melaksanakan tugas tanpa adanya dominasi pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak berkepentingan ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan pertutan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain (Hamdani, 2016:75).

e. *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip kewajaran merupakan prinsip bagi pengelola perusahaan diwajibkan menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam melakukan kegiatan pengelolaan usaha dan tindakan manajerial dengan tetap senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian perusahaan yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan

diwajibkan memberikan perlakuan yang sama dan wajar bagi *stakeholder primer* (karyawan, pemasok, pelanggan, pemodal dan manajer) maupun *stakeholder esekunder* (pemerintah, masyarakat dan lingkungan eksternal perusahaan) dan *shareholders* pemegang saham minoritas (Hamdani, 2016:75).

4. Tujuan *Good Corporate Governance*

Keutamaan dan tujuan diwajibkannya penetapan *good corporate governance* pada perusahaan adalah totalitas dan keseriusan para direksi dalam memberikan komitmen kepada organ perusahaan untuk mencapai visi-misi dan tujuan perusahaan itu sendiri dengan pedoman pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hamdani, 2016 : 7).

Tujuan dibentuknya penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan publik diatur di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, antara lain:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan menjalankan tindakannya

dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

5. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Forum for Coporation in Indonesia (FCGI, 2011) diantaranya :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional perusahaan dapat meningkat disertai dengan meningkatnya pelayanan pengelola perusahaan kepada *shareholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c. Dapat mengembalikan kepercayaan pemberi modal untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

- d. Meningkatkan nilai kepuasan dan kepercayaan para pemegang saham berdasarkan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan *shareholders value* dan pembagian laba (deviden).

6. Pihak - Pihak yang terkait dalam *Good Corporate Governance*

Menurut Hamdani (2016:79) organ atau pihak-pihak yang terkait dalam penerapan *Good Corporate Governance* minimal harus memiliki tiga unsur yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diwajibkan membentuk minimal 3 (tiga) komite pembantu yaitu : Komite Audit, Komite Kebijakan Resiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berperan sebagai organ perusahaan yang merupakan media para pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip *good corporate governance* secara terbuka (*transparency*) dan wajar (*fairness*) dan tidak mengesampingkan kepentingan perusahaan (Hamdani, 2016:80). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Hamdani (2016:81) menyatakan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab atas persiapan dan penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pengambilan keputusan.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara kolektif bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjamin bahwa pihak Direksi dan jajaran manager beserta para staf perusahaan menerapkan GCG. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang; Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

c. Dewan Direksi

Dewan direksi jika dilihat dari struktur perusahaan membawahi para manajer-manajer pada suatu perusahaan. Dewan Direksi juga bertugas dan bertanggung jawab layaknya para manajer secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dewan Direksi melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan agar menghasilkan keuntungan usaha.

d. Komite Audit

Komite Audit memiliki struktur anggota diketuai oleh Komisaris Independen dan anggota yang terdiri dari beberapa Komisaris dan Pelaku Profesi dari luar perusahaan. Komite Audit terbagi menjadi auditor internal dan auditor eksternal. Tugas pokok Komite Audit adalah mengoreksi dan memeriksa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi, memastikan struktur pengendalian internal berjalan dengan

lancar, dan melakukan audit internal maupun eksternal dengan standar audit yang berlaku serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

e. Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan jika perlu dapat menggunakan pelaku profesi dari luar perusahaan. Tugas utama Komite Kebijakan Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang telah disusun oleh Dewan Direksi dan menganalisis seberapa besar resiko yang akan diambil oleh perusahaan.

f. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi beranggotakan diketuai oleh Komisaris Independen sedangkan anggotanya terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Tugas Komite Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Calon Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang terpilih beserta remunerasinya diajukan dengan tujuan untuk memperoleh keputusan RUPS.

7. Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Sebelum perusahaan melaksanakan praktek pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka harus memperhatikan tahapan-tahapan penerapan (GCG) terlebih dahulu. Menurut Hamdani (2016:106) terdapat tiga tahapan penerapan GCG, sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal perusahaan dalam memahami konsep pedoman pelaksanaan *good corporate governance*. Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yang terdiri atas:

1) *Awareness building*

Merupakan upaya awal untuk membangun kesadaran tentang arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat juga dilakukan dengan meminta bantuan tenaga profesional dari luar perusahaan.

2) *GCG Assessment*

Merupakan upaya selanjutnya untuk mengukur atau memproyeksikan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG pada kondisi saat ini.

3) *GCG manual building*

Merupakan upaya terakhir dalam tahap persiapan. Berdasarkan hasil proyeksi pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, perusahaan dapat memulai penyusunan *manual* pedoman implementasi GCG. Penyusunan manual implementasi GCG ini dapat melibatkan pihak tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

b. Tahap Implementasi

Tahap implementasi perusahaan dapat dimulai setelah Penyusunan *manual* implementasi GCG telah selesai disusun. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama diantaranya :

- 1) Sosialisasi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan dan publikasi kepada seluruh oragan dan jajaran struktur perusahaan berbagai aspek tentang laporan manual GCG yang telah berhasil disusun dan tata cara implementasinya.
- 2) Implementasi. Aktivitas pengelolaan perusahaan yang dilakukan bersamaan dengan pedoman GCG yang telah dibentuk dan berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Dalam penerapannya upaya implementasi hendaknya memuat tindakan manajemen perubahan (*change management*) untuk mengawasi proses perubahan yang mungkin terjadi dalam implementasi GCG.
- 3) Internalisasi. Upaya penekanan inti dari GCG secara menyeluruh pada semua kegiatan dan berbagai peraturan perusahaan kepada seluruh organ dan struktur perusahaan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dalam penerapan GCG yang dilakukan secara teratur dan bertahap sebagai bentuk pengukuran efektivitas penerapan GCG yang telah dilakukan. Tahap evaluasi dilakukan dengan melibatkan peran pihak independen melaukukan implementasi dan *scoring* atas parktik GCG (Hamdani, 2016:108).

8. Mekanisme Penerapan Organ *Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak atau organ-organ yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* (Boediono dalam Rimardhani, 2016:31). Mekanisme *Good Corporate Governance* diterapkan untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan perilaku manajer bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan keputusan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Puspita Ningrum dan Atmini, 2012).

Mekanisme *Good Corporate Governance* terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme yang berasal dari dalam perusahaan (internal) dan mekanisme yang berasal dari luar perusahaan (eksternal). Mekanisme internal perusahaan adalah metode dalam pengelolaan perusahaan menggunakan organ internal perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, dan komite audit. Mekanisme eksternal adalah metode untuk mempengaruhi perusahaan berdasarkan pengaruh pasar dan sistem hukum untuk mengendalikan perusahaan (Rimardhani, 2016:31). Di dalam penelitian ini lebih menganalisa mekanisme internal yang terdiri dari dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

a. Dewan Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:13) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). KNKG juga menyatakan bahwa kriteria dewan komisaris dapat menjadi Komisaris Independen apabila calon Anggota Dewan Komisaris tidak tergabung dan dipengaruhi oleh manajemen, anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai pemegang saham mayoritas, dan terbebas dari kasus.

Peran dan tugas Dewan Komisaris Independen sebagai *primer inter pares* yang artinya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada organ perusahaan lainnya. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Independen dapat berjalan efektif apabila dilengkapi dengan prinsip-prinsip seperti :

- a) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperlihatkan semua pemangku kepentingan.

- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara (Hamdani, 2016:82)

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 4 tentang Komisaris Independen menyebutkan bahwa: “Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen”

Syarat menjadi Komisaris Independen tercantum dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK No: 30/POJK.05/2014. Persyaratan menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama
- 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- 3) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
- 5) Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan berdomisili di Indonesia.

Perhitungan proporsi dewan komisaris independen dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris independen (PDKI) dibagi dengan total anggota dewan komisaris, yang dapat dikakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Total Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: Ujijanto dan Pramuka(2007:10)

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ atau pihak internal perusahaan yang diberi kepercayaan untuk bertindak mewakili perusahaan dalam segala macam tindakan hukum untuk mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan. Setiap anggota Dewan direksi tidak bekerja secara individu melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu Direksi mempengaruhi tugas direksi dan manajer lainnya (Sutedi, 2012:128).

Tugas Dewan Direksi termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 92, diantaranya :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
4. Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi
5. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Selain itu syarat menjadi Dewan Direksi termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 93, dijelaskan bahwa pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : dinyatakan pailit atau menyebabkan perusahaan pailit, pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Persroan dinyatakan pailit, dan pernah terjerat kasus hukum atau sedang menjalani hukuman

Tanggung jawab direksi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 98 dan Sutedi (2012:129), diantaranya :Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.05/2014, perusahaan yang memiliki aset lebih dari sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang

anggota Direksi. Pengukuran Dewan Direksi dalam perusahaan diukur menggunakan rumus Logaritma Natural (Ln) berdasarkan dari jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan (Septiani, 2013). Perhitungan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Ln}\Sigma(\text{Jumlah Dewan Direksi})$$

Sumber: Septiani (2013)

c. Komite Audit

Berdasarkan Surat Putusan BAPEPAM (Badan Pengawas dan Pemeriksa Pasar Modal) Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Keberadaan Komite Audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03-PM/2002 (berlaku bagi perusahaan publik). Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa fungsi komite audit adalah sebagai pembantu dewan komisaris dan sebagai dewan pengawas untuk mengawasi kinerja dewan direksi. Komite audit memiliki wewenang penuh, bebas dan tak terbatas dalam melakukan fungsi pemeriksaan laporan keuangan, data karyawan, dana aset, sumber daya dan kegiatan operasional perusahaan. (Septiana, 2016: 30-35).

Secara garis besar tujuan dan manfaat dibentuknya komite Audit diatur di dalam Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun (2002) dan tercantum di dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117 tahun 2002 yang dikutip dari Zarkasyi (2008:18) memiliki 3 (tiga) fungsi :

a) Pelaporan Keuangan

Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan sesuai standar akuntansi dan kebijaksanaan perusahaan.

b) Manajemen Risiko dan Kontrol

Komite Audit memberikan pengawas independen atas proses risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut.

c) *Corporate Governance*

Komite Audit bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan *Corporate Governance*. Komite Audit memastikan manajemen senior membudayakan *Corporate Governance* dan memastikan perusahaan tunduk pada *Code of Conduct*. Selain itu menjamin semua organ perusahaan mengerti pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non finansial perusahaan. Perhitungan Komite Audit pada perusahaan Perbankan pada penelitian ini dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Komite Audit} = \text{Ln } \Sigma (\text{Jumlah Komite Audit})$$

Sumber: Septiani (2013)

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham milik negara, lembaga, institusi, atau perusahaan lainnya yang menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada suatu perusahaan. Jumlah kepemilikan saham Institusional dapat dikatakan sebagai saham mayoritas dalam sebuah perusahaan (Herdjono dan Megasari, 2016:38). Adanya kepemilikan institusional dapat memantau peningkatan investasi secara profesional sehingga tingkat kontrol atas pengelolaannya sangat tinggi, yang bisa mengurangi potensi kecurangan. Potensi kecurangan yang rendah menyebabkan meningkatnya kepercayaan prosposisi investor dalam institusi lembaga perusahaan untuk menanamkan saham dan modalnya dalam perusahaan (Herdjono dan Megasari, 2016:39).

Walaupun pemegang saham institusi atau pemegang saham mayoritas melakukan fungsi pengawasan secara ketat, namun sering kali pemegang saham institusi mengabaikan kepentingan pemegang saham manajerial (pemegang saham minoritas) sehingga pemilik saham institusional lebih unggul dalam pengambilan keputusan. Pemilik saham institusional lebih condong berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki kebijakan deviden yang tinggi dan kondisi kinerja perusahaan yang baik dengan asumsi akan mendapatkan *return* yang tinggi dan resiko yang rendah. Hak kepemilikan institusional dalam memonitor kegiatan operasional perusahaan merupakan salah satu kiat dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan

sebagai upaya membentuk *Good Corporate Governance* (Boediono, 2006:175).

Upaya yang dilakukan oleh pemilik saham institusi adalah memastikan bahwa perusahaan yang mereka kelola memiliki kode, prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* agar diakui oleh investor secara internasional. Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa “jumlah dan peran kepemilikan saham institusional yang banyak menentukan kemampuan perusahaan untuk menjalankan *Good Corporate Governance* dan meningkatkan kondisi kinerja keuangan perusahaan”. kepemilikan saham institusi dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Herdjono dan Sari(2016:42)

C. Struktur Modal

1. Teori Struktur Modal

a. *Trade-Off Theory*

Menurut Brigham dan Houston (2011:183) teori *trade-off* memaparkan tentang pertukaran manfaat pengurangan pajak dari pendanaan utang dengan masalah berupa potensi kebangkrutan. Teori *trade-off* memberikan pandangan bahwa setiap perusahaan memiliki rasio utang dengan sasaran atau nilai maksimum yang bervariasi dan terbatas.

Teori *trade-off* menyatakan bahwa hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan terdapat suatu tingkat *leverage* yang optimal untuk menghasilkan keuntungan. Menurut teori ini untuk mencapai tingkat *leverage* yang optimal perusahaan perlu menyeimbangkan *agency cost of financial distress* dan *tax advantage of debt financing* yaitu *leverage* yang optimal dapat dicapai bila nilai sekarang dari *tax shield* utang adalah sama dengan nilai sekarang dari biaya kesulitan utang. (Hardjito : 2011). Teori ini juga mengatakan bahwa apabila perusahaan ingin mendapatkan perolehan laba lebih tinggi maka perusahaan harus melakukan pembiayaan melalui utang (Hamid et al : 2015). Menurut Hanafi (2015:310) pada *trade-off theory* perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber dananya harus mewaspadaai tingkat dan mengontrol tingkat penggunaan utang sebagai pembiayaan, karena semakin naik dan bertambah tingkat utang perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan setelah titik tertentu. Kontrol penggunaan tingkat utang ini juga diperlukan untuk mengurangi resiko perusahaan mengalami kerugian dan kebangkrutan.

b. Pecking Order Theory

Menurut Brealey et al. (2008:26) teori ini muncul dari asumsi asimetris informasi nilai perusahaan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan perusahaan karena diikuti dengan beban biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini terjadi

pada saat perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal daripada menggunakan sumber dana internal sehingga memiliki tingkat utang yang lebih tinggi (Keown et al., 2010:162). Menurut Brealey et al. (2008:26) teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan lebih memilih menerbitkan utang dibandingkan dengan ekuitas jika dana internal tidak mencukupi.

Penggunaan sebaiknya sumber dana eksternal hanya dilakukan berupa utang digunakan hanya jika diperlukan. Sumber dana eksternal yang digunakan terlebih dahulu adalah untuk penerbitan utang, namun bilamana dirasa belum mencukupi diperlukan untuk penambahan modal sendiri maka barulah perusahaan menerbitkan saham. *Pecking order theory* menjelaskan perusahaan yang memperoleh peningkatan keuntungan atau profitabilitas adalah perusahaan yang menggunakan lebih sedikit pembiayaan eksternal berupa utang sebagai struktur modalnya (Keown et al., 2010:162).

2. Pengertian Struktur Modal

Struktur Modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa (Sjahrial, 2014:250). Menurut Brigham dan Gapenski dalam Rodoni (2014:129) struktur modal merupakan proporsi atau perbandingan dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, apakah dengan cara menggunakan utang, ekuitas, atau dengan

cara menerbitkan saham. Pengertian struktur modal yang serupa dikemukakan oleh Halim (2009:81) yang menyebutkan bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara total utang (modal asing) dengan total modal sendiri atau ekuitas. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, karena struktur keuangan merupakan perimbangan antara total utang dengan modal sendiri (Sartono, 2001:225).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan ekuitas atau modal sendiri dan pinjaman yang berasal dari utang jangka panjang maupun penerbitan saham yang digunakan sebagai pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan perlu membentuk struktur modal yang optimal sehingga dapat meminimumkan biaya modal dan biaya operasional untuk meningkatkan laba bagi perusahaan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (Rodoni, 2014:129). Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran (trade off) antara *risk and return*. Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung pemegang saham dan menyebabkan ekspektasi yang tinggi terhadap modal yang ditanamkan, oleh karena itu diperlukan struktur modal yang optimal (Halim, 2015:100).

Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan dalam sebuah perusahaan selain berusaha membentuk struktur modal yang optimal, maka diperlukan untuk menetapkan sasaran struktur modal (*target capital structure*) terlebih dahulu. Jika rasio utang aktual di bawah tingkat sasaran, maka perusahaan akan menghimpun modal dengan menerbitkan utang,

sementara jika rasio utang di atas sasaran, maka yang akan digunakan adalah ekuitas. Sasaran dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi, tetapi pada suatu waktu, manajemen biasanya memiliki satu struktur modal yang menjadi acuan.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu resiko usaha, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan konserfatisme atau keagresifan manajerial. Berikut merupakan uraian faktor-faktor penentu struktur modal, antara lain:

- 1) Resiko usaha, atau tingkat resiko inheren dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar resiko usaha perusahaan makin rendah rasio utang optimalnya. Menurut Halim (2015:101) resiko bisnis merupakan keadaan yang berdampak negatif pada operasi atau profitabilitas perusahaan.
- 2) Posisi Pajak perusahaan. Salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga merupakan pengurang pajak, selanjutnya menurunkan biaya utang efektif. Akan tetapi jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah dilindungi dari pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya, akan menghasilkan tarif pajak rendah. Akibatnya tambahan utang tidak memiliki keunggulan

yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

- 3) Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Manajer keuangan perusahaan diwajibkan untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan menghimpun dana melalui utang atau modal sendiri. Pasokan modal yang lancar dibutuhkan oleh operasi yang stabil. Ketika perusahaan mengalami kesulitan operasional, maka perusahaan akan lebih menghimpun utang dibandingkan dengan ekuitas.
- 4) Konservatisme atau kearifan manajerial. Beberapa manajer lebih agresif dibandingkan manajer lain, sehingga mereka lebih bersedia untuk menggunakan utang sebagai usaha meningkatkan laba. Faktor ini mempengaruhi sasaran struktur modal perusahaan (Brigham dan Houston 2011:155).

Halim (2015:101) menambahkan lima tambahan faktor penentu struktur modal diantaranya adalah struktur aktiva, stabilitas penjualan, tingkat pertumbuhan, sikap pemberi pinjaman dan umur perusahaan. Berikut merupakan uraian mengenai faktor tambahan penentu struktur modal

- 1) Struktur aktiva. Menurut Sitanggang (2014:75) perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang jumlahnya besar akan memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh modal dengan sumber dana berupa utang. Sugiarto (2009:133) menyatakan perusahaan yang menggunakan

sumber dana utang dengan jaminan aktiva tetap pada umumnya berada di industri yang sudah dewasa dan bukan perusahaan yang menagndalkan human capital karyawannya sehingga memiliki risiko yang kecil dan *return* yang lebih besar.

- 2) Stabilitas penjualan. Perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan mudah mengambil lebih banyak utang (Halim, 2015:101). Kreditur akan menilai baik kondisi sebuah perusahaan apabila tingkat penjualannya stabil atau meningkat, dengan begitu akan lebih memudahkan untuk memberi pinjaman berupa utnag.
- 3) Tingkat pertumbuhan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka ssemakin tinggi keinginan perusahaan untuk menahan laba dibandingkan dividen dan kemudian digunakan untuk pembiayaan investasi untuk memperoleh laba (Sartono, 2010:148).
- 4) Sikap pemberi pinjaman. Lunaknya sikap pemberi pinjaman akan berdampak pada *target capital structure* (Halim, 2015:101). Kreditur yang gemar mudah memberi pinjaman kepada perusahaan akan memudahkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.
- 5) Umur Perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan lama waktu bertahan sebuah perusahaan sejak awal pertama didirikan dan tumbuh berkembang di pasaran. Sitanggang (2014:76) menyatakan perusahaan yang lebih mapan akan lebih mudah untuk memperoleh tambahan modal dengan utang karena memiliki jejaring yang kuat dnegan lembaga keuangan.

4. Pengukuran Struktur Modal

Pengukuran struktur modal dapat ditinjau dengan menganalisis bagian kanan neraca keuangan. Neraca bagian kanan berisi perimbangan utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. Cara untuk mengukur penggunaan yang optimal dari struktur modal adalah menggunakan rasio utang atau *leverage* (Sjahrial, 2014:250). Di dalam penelitian ini rasio utang atau leverage yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* atau *Debt Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

a. *Debt To Asset Ratio* atau *Debt Ratio* (DAR)

Kasmir (2010:112) menyatakan *Debt to Assets Ratio* atau *Debt Ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan besarnya total utang yang digunakan perusahaan terhadap keseluruhan total aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan. DAR atau DR dapat digunakan sebagai pengukuran jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur (Syamsuddin, 2011:71). Pengukuran rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Kasmir (2010:122)

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut Kasmir (2010:112), “*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas”. *Debt to Equity Ratio* dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan total modal perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang digunakan oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang sebagai jaminan. Semakin besar nilai dari rasio DER maka semakin besar jumlah hutang perusahaan dan modal yang dikeluarkan (Syamsuddin,2011:54). *Debt to Equity Ratio* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Kasmir(2010:124)

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Dalam mengelola perusahaan, setiap akhir periode pihak manajer keuangan dan auditor akan mengukur dan menilai berapa jumlah besar laba atau profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terbagi menjadi laba kotor, laba operasi, dan laba bersih (Utari dkk, 2014:63). Kaitannya dalam kemampuan perusahaan memperoleh laba, profitabilitas berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal

sendiri (Sartono, 2001:122). Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan diterapkan perusahaan ketika ingin mencapai laba, diantaranya meningkatkan pendapatan (*revenue*), dan mengurangi semua beban (*expense*) atas pendapatan (Utari dkk, 2014:63). Pencapaian tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada di dalam keadaan yang menghasilkan laba positif. Tanpa adanya keuntungan yang dihasilkan dalam satu periode, maka perusahaan akan sulit mencari investor untuk memberikan pemodal dari luar (Syamsuddin,2011:59).

2. Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dari jenis-jenis rasionya. Rasio profitabilitas timbul sebagai akibat perpaduan antara pengaruh likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi (Bringham dan Houston,2009:107). Beberapa jenis rasio profitabilitas tersebut diantaranya:

a. *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin adalah presentase hasil perbandingan dari laba kotor (*sales cost of goods sold*) dengan penjualan (*sales*). Semakin besar *Gross Profit Margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa *cost of goods sold* relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan (*sales*) (Syamsuddin, 2011:61).

Pengukuran rasio *Gross Profit Margin* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{GrossProfitMargin} = \frac{\text{LabaKotor}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

Sumber: Syamsuddin (2011: 61)

b. *Operating Profit Margin* (OPM)

Operating Profit Margin memproyeksikan apa yang biasanya disebut dengan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Makna “*pure profit*” bahwa jumlah laba yang sesungguhnya diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban – kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak (Syamsuddin, 2011:61). *Operating Profit Margin* menunjukkan perbandingan antara laba operasi dengan penjualan yang diperoleh perusahaan. *Operating Profit Margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{OperatingProfitMargin} = \frac{\text{OperatingProfit}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

Sumber: Syamsuddin (2011: 61)

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang menggambarkan rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi rasio *Net Profit Margin* maka semakin baik operasi perusahaan tergantung dengan jenis industri sektor perusahaan

yang dijalankan (Syamsuddin, 2011:62). *Net Profit Margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

Sumber: Syamsuddin (2011: 62)

d. *Total Asset Turn Over* (TATO)

Total Asset Turn Over merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio total aset turnover maka semakin efisien penggunaan aktiva di dalam menghasilkan penjualan (Syamsuddin, 2011:62). *Total Asset Turn Over* menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan total aset yang digunakan perusahaan. *Total Asset Turn Over* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}} \times 1 \text{ kali}$$

Sumber: Syamsuddin (2011: 62)

e. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan (Kasmir, 2010:115). *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Sartono, 2001:123). *Return On Assets* digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari jumlah dana yang diinvestasikan perusahaan atau total aset perusahaan. Untuk menentukan jumlah dana yang diinvestasikan, jumlah investasi diukur bernilai sama dengan total aset, hal ini diperbolehkan selama semua aset dioperasionalkan dalam operasi utama perusahaan (*core business*) (Sitanggang, 2014:29). *Return On Assets* (ROA) sering disebut dengan *Return on Investment* (ROI). Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik keadaan *financial* perusahaan (Syamsuddin, 2011:63). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011 *Return On Assests* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (EBIT)}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011

f. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan rasio yang digunakan sebagai pengukuran laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (Kasmir, 2010:115). *Return On Equity* juga berfungsi sebagai suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan (Syamsuddin, 2011:64). Bagi para pemegang saham tingkat penegmbalian atas modal sendiri adalah ukuran yang paling penting, karena rasio ini

menunjukkan tingkat hasil yang diperoleh pemegang modal atas modal yang dimiliki perusahaan (Sitanggang, 2014:30). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011 *Return On Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Return\ on\ Equity = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Rata – rata Total Ekuitas}}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011

Di dalam penelitian ini variabel profitabilitas diproksikan menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

E. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas

Konsep *corporate governance* yang diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil survei yang dilakukan oleh CLSA pada tahun 2001 menunjukkan bahwa perusahaan yang masuk peringkat 100 teratas dalam penerapan *corporate governance* (CG) atau sekitar 20% memiliki rasio – rasio keuangan yang sangat baik dan memiliki tingkat harga saham yang tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan GCG nilainya jauh lebih tinggi (Hamdani, 2016:128). Penerapan praktik GCG dalam perusahaan diharapkan mampu memicu kinerja dari pihak agen untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Berikut merupakan

variabel hubungan *good corporate governance* per indikator dengan indikator profitabilitas

a. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen (Sochib, 2016:50). Menurut Rimardhani (2016) komisaris independen merupakan pihak pendukung dengan posisi terbaik untuk membantu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja para direksi dan manajer agar terlaksananya *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan.

Sutedi (2012:149) menyatakan keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggung jawab secara yuridis dalam setiap langkah usaha yang dilakukan komisaris independen akan mempengaruhi keputusan penilaian kinerja terhadap bidang usaha emiten. Semakin besar jumlah proporsi komisaris independen akan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan (bersikap independen) berfokus untuk mengontrol laba yang dihasilkan perusahaan.

b. Pengaruh Proporsi Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas

Dewan Direksi adalah pihak internal perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan. Para dewan

direksi melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing – masing. Dalam menjalankan peran dan tugasnya dewan direksi sebagai agen bertanggungjawab dibawah pengawasan pemilik perusahaan dan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan awal yang diatur dalam RUPS. Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan (Hamdani, 2016:86-87). Semakin banyaknya jumlah dewan direksi maka akan meningkatkan kinerja keuangan kaitannya dengan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan karena memudahkan dalam pembagian tugas (Purno, 2013 dalam Rimardhani, 2016).

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Komite audit dibentuk sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang diterbitkan oleh KNKG menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib membentuk komite audit yang memiliki fungsi dan peran untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan auditor internal maupun auditor eksternal. Seperti komisaris independen, komite audit merupakan suatu pihak berkelompok yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya atau memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan mengenai akuntansi dan perihal lain dalam sistem pengawasan internal (Zarkasyi, 2008:16). Semakin banyak komposisi

komite audit maka akan semakin ketat pengawasan dalam kinerja keuangan perusahaan kaitannya dalam pencapaian peningkatan laba (Herdjono dan Sari, 2016).

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas

Kepemilikan institusional memiliki fungsi penting dalam meminimalisir terjadinya *agency conflict* yang terjadi antara *agent* (manajer) dan *principals* (pemegang saham). Menurut Jensen & Meckling (1976) peran dan kepemilikan saham investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau peningkatan investasi secara profesional sehingga tingkat kontrol atas pengelolaannya sangat tinggi, yang pada gilirannya bisa mengurangi potensi kecurangan. Potensi kecurangan yang rendah menyebabkan meningkatnya kepercayaan prosprosi investor dalam institusi lembaga perusahaan untuk menanamkan saham dan modalnya dalam perusahaan (Herdjono dan Megasari, 2016). Semakin besar tingkat kepemilikan saham institusional akan mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan sehingga hasil laporan keuangan dapat lebih akurat dan mampu melihat pertumbuhan peningkatan profit.

2. Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas

Struktur modal optimal berguna untuk memaksimalkan laba perusahaan. Rodoni (2014:129) menyatakan struktur modal optimal mampu meminimumkan biaya modal dan biaya operasional sehingga

dapat memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Salah satu cara untuk mencapai struktur modal yang optimal adalah menggunakan utang. Kedua rasio utang *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan dari tingkat penggunaan aset dan modal namun perusahaan juga harus mengetahui resiko yang diterima sesuai kondisi ekonomi perusahaan yang berdampak kepada laba perusahaan. Menurut teori pendekatan laba bersih dalam Sudana (2009:144) bahwa semakin banyak hutang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan maka nilai perusahaan akan meningkat.

e. Pengaruh *Debt to Assets Ratio* Terhadap Profitabilitas

Debt to Assets Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi dana dikeluarkan perusahaan yang bersumber dari hutang untuk membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan antara total hutang dengan total aktiva perusahaan (Sudana, 2009:20). Dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan perusahaan para manajer (*agent*) akan membutuhkan tambahan aset atau aktiva untuk mendukung jalannya kinerja perusahaan dengan cara menggunakan *leverage* atau pendanaan melalui utang.

Pemakaian rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) harus diwaspadai. Menurut Sartono (2010:121) Rasio utang atau *leverage* yang digunakan adalah semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar resiko yang dihadapi, dan investor akan meminta keuntungan yang semakin tinggi

yang mana berdampak pada penurunan laba perusahaan). Berdasarkan penelitian Mareta (2013) dan Sukasa (2016) menunjukkan bahwa rasio *Debt to Assets Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas karena semakin tinggi rasio maka akan semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan walaupun aktiva perusahaan bertambah.

f. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Profitabilitas

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah modal yang digunakan sebagai jaminan atas utang. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan total hutang dengan total ekuitas atau modal (Syamsuddin, 2011:54). Di dalam konsep struktur modal yang harus diperhatikan adalah pada saat keputusan pendanaan menggunakan utang atau modal sendiri. Manajer keuangan harus mengetahui target sasaran struktur modal agar bisa memutuskan melakukan pendanaan dalam bentuk utang atau menggunakan modal sendiri.

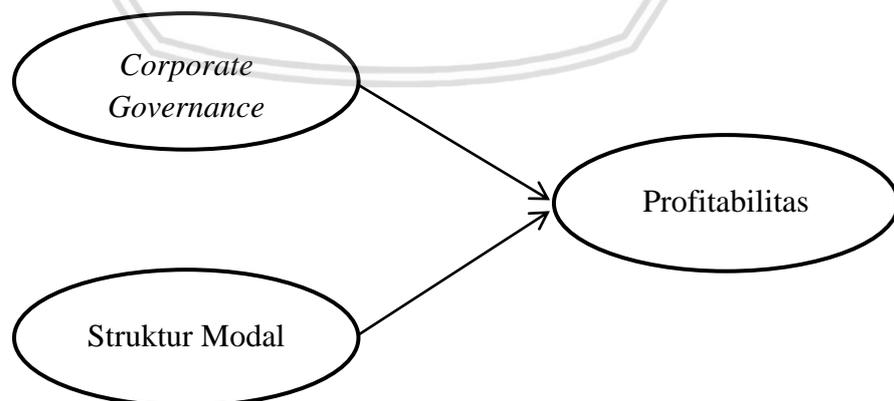
Tinggi rendah rasio DER atau *Debt to Equity Ratio* akan mempengaruhi tingkat pencapaian profitabilitas. Menurut Pratheepkanth (2011) *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki arah negatif terhadap profitabilitas. Semakin kecil tingkat *Debt to Equity Ratio* maka akan semakin baik dan aman untuk investor dalam menanamkan modalnya dan berdampak positif pada laba perusahaan. Namun sebaliknya berdasarkan penelitian dari Mareta (2013) tingkat rasio *Debt to Equity Ratio* (hutang) yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap laba atau profitabilitas

perusahaan atas modal sendiri, apabila perusahaan secara selama satu periode berada kondisi yang stabil dan baik.

F. Kerangka Model Konseptual dan Hipotesis

1. Model Konsep

Model konsep dalam penelitian berfungsi untuk menggambarkan fenomena dengan jelas agar mudah dipahami mengenai sesuatu yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara *good corporate governance* dan struktur modal terhadap profitabilitas. Dimana *good corporate governance* diproksikan oleh dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit sedangkan variabel struktur modal diproksikan dengan *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*. Sementara itu untuk profitabilitas diproksikan dengan *return on equity* dan *Return On Assets*. Model konsep penelitian ini dijelaskan melalui Gambar 5 berikut ;

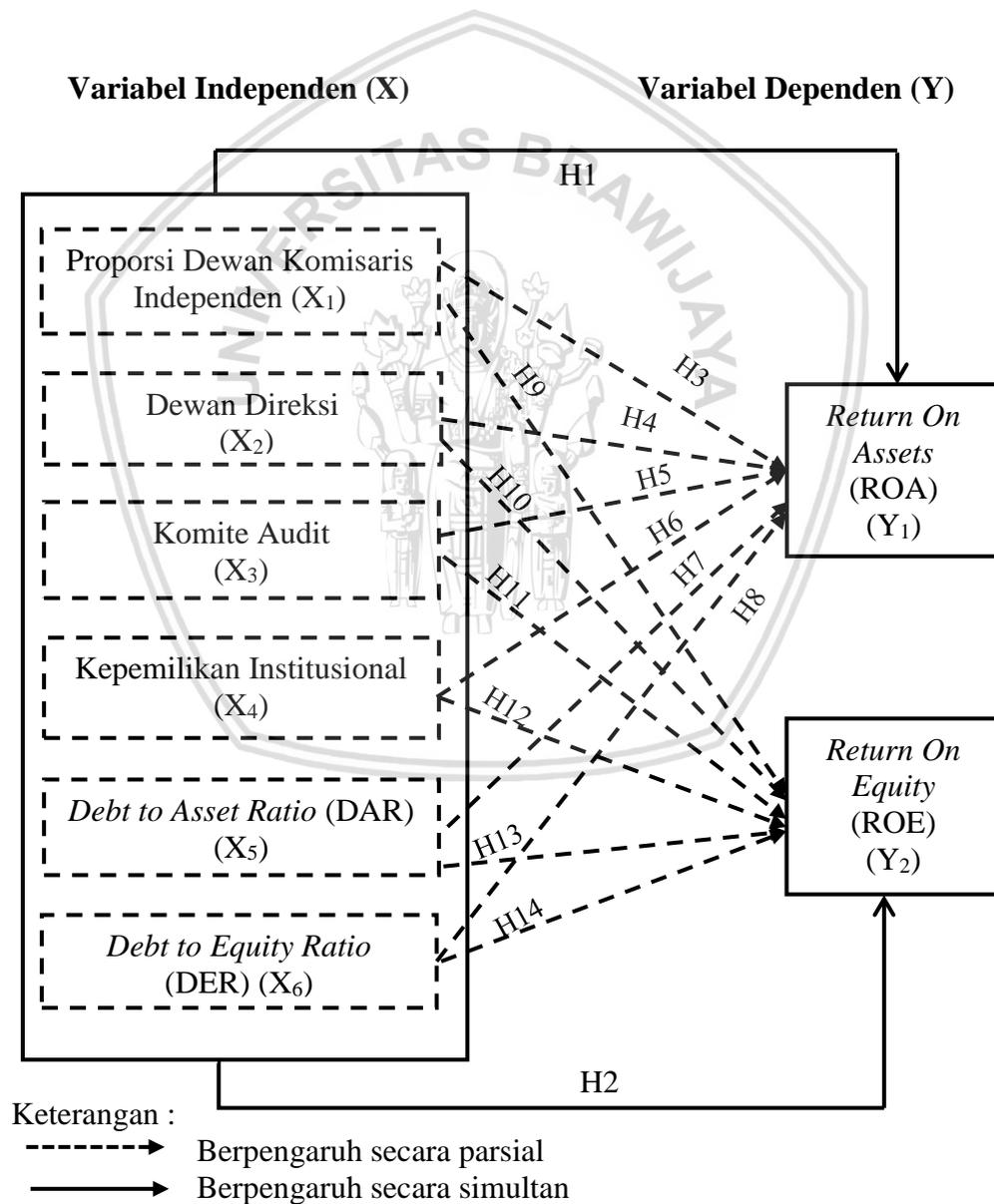


Gambar 5 Model Konsep
Sumber: Data diolah, 2017

2. Model Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, disebut jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum mengacu berdasarkan fakta – fakta empiris yang dikumpulkan dan diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono, 2011:64).

Penelitian ini menggunakan model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 6 Model Hipotesis

Sumber: Data diolah, 2017

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H3: Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H4: Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H5: Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H6: Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H7: *Debt to Asset Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H8: *Debt to Equity Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H9: Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H10: Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H11: Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H12: Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H13: *Debt to Asset Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

H14: *Debt to Equity Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* (penelitian eksplanatori) dengan teknik analisis komparatif melalui pendekatan kuantitatif. *Explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antarkelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2009:162). Penelitian eksplanatif (*explanatory research*) bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel, baik arah maupun kekuatan hubungan melalui pengujian hipotesis (Silalahi, 2010:30).

Menurut Zulganef (2013:11) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam suatu penelitian. Penelitian yang bersifat *explanatory research* menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang dapat diklasifikasikan, teramati, terukur, dan menggunakan analisa berupa angka-angka (Sugiyono, 2009:42). Alasan memilih jenis penelitian *explanatory research* karena dalam penelitian ini bersifat penjelasan hubungan antara dua atau lebih variabel serta untuk menguji hipotesis yang diajukan. Melalui hipotesis tersebut diharapkan dapat mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, *Debt To Asset Ratio* (DAR), dan *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap *Return On Assets* (ROA) dan

Return On Equity (ROE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan pembuktian pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada situs Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi BEI www.idx.co.id. Alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang mengatur tentang penerbitan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang telah valid, lengkap, dan sahamnya telah *go-public*. Kumpulan data laporan keuangan ini berhubungan dengan studi kasus yang diteliti tentang proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, rasio utang dan rasio profitabilitas pada perusahaan sampel perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat relevan menjadi lokasi penelitian, juga ditunjang oleh kelengkapan data yang dimiliki BEI untuk penelitian yang terbaru, lengkap serta akurat.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan yang menjelaskan suatu konsep variabel secara singkat dan jelas (Chourmain, 2008:36). Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti sehingga dari variabel tersebut dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:58). Terdapat 2

jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini berjumlah enam variabel dari konsep *corporate governance* dan struktur modal yang terdiri atas Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_1), Dewan Direksi (X_2), Komite Audit (X_3), Kepemilikan Institusional (X_4), *Debt to Asset Ratio* (X_5), dan *Debt to Equity Ratio* (X_6). Variabel dependen dalam penelitian ini berjumlah dua variabel dari rasio profitabilitas yang terdiri atas *Return On Assets* (Y_1) dan *Return On Equity* (Y_2). Berikut dijelaskan secara rinci definisi konseptual variabel dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Tabel Definisi Konseptual Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator
1	<i>Corporate Governance</i>	Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_1)	Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 4 tentang Komisaris Independen menyebutkan bahwa, “Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen”. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu bersikap netral melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada dewan direksi untuk pencapaian peningkatan laba perusahaan.

Lanjutan Tabel 2 Definisi Konseptual Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator
2	<i>Corporate Governance</i>	Dewan Direksi (X_2)	Dewan Direksi merupakan organ atau pihak perusahaan yang bertugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Kaitannya dengan profitabilitas, dewan direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan secara bertahap mengevaluasi kemungkinan terjadi risiko (Hamdani, 2016:87).
3	<i>Corporate Governance</i>	Komite Audit (X_3)	Komite Audit menurut Surat Putusan BAPEPAM (Badan Pengawas dan Pemeriksa Pasar Modal) Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris". Tugas Komite Audit sesuai dengan fungsi dibentuknya yaitu sebagai Pelaporan Keuangan, Manajemen Risiko dan Kontrol dan Komite Penjamin <i>Good Corporate Governance</i> (Zakarsyi, 2008: 18).
4	<i>Corporate Governance</i>	Kepemilikan Institusional (X_4)	Kepemilikan Institusi merupakan jumlah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor lembaga, institusi, negara atau perusahaan lainnya (Herdjiono dan Megasari, 2016:38). Adanya kepemilikan

Lanjutan Tabel 2 Definisi Konseptual Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator
			institusional dalam perusahaan dapat memantau pergerakan peningkatan investasi dan keadaan ekonomi perusahaan sehingga dapat memprediksi tingkat profitabilitas perusahaan
5	Struktur Modal	<i>Debt to Asset Ratio</i> (X ₅)	<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) atau <i>Debt Ratio</i> , merupakan rasio utang yang digunakan untuk sebagai pengukuran seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2010:112). DAR menggambarkan pengukuran dan perhitungan jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur (Syamsuddin, 2011:71).
6	Struktur Modal	<i>Debt to Equity Ratio</i> (X ₆)	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas yang dapat menunjukkan seberapa besar modal yang digunakan perusahaan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai oleh utang (Syamsuddin, 2011:54). DER merupakan rasio antara total utang dengan ekuitas dalam perusahaan yang memberikan gambaran perbandingan antara total utang dengan modal sendiri (ekuitas) perusahaan (Sitanggang, 2014:23)

Lanjutan Tabel 2 Definisi Konseptual Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator
7	Profitabilitas	<i>Return On Assets</i> (Y ₁)	<i>Return on Assets</i> (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan fungsi aktiva atau asset untuk memperoleh laba atau profit. <i>Return on Assets</i> (ROA) dapat menggambarkan semakin tinggi nilai ROA yang dihasilkan maka semakin baik kinerja perusahaan. Peningkatan nilai ROA sesuai dengan keadaan atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan (Syamsuddin, 2011:63)
8	Profitabilitas	<i>Return On Equity</i> (Y ₂)	<i>Return on Equity</i> (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan modal sendiri dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak (Kasmir, 2010:115). <i>Return On Equity</i> (ROE) juga berfungsi sebagai suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan (Syamsuddin, 2011:64).

Sumber : data diolah 2017

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Zulganef (2013:84), “Definisi operasional adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur”. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari konsep *Good Corporate Governance* yang diproksikan menggunakan variabel independen dewan direksi (DD), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), komite audit (KA), dan kepemilikan institusional (KI); struktur modal yang diproksikan oleh variabel independen *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Sementara Variabel Dependen dari konsep Profitabilitas diproksikan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Di dalam definisi operasional bertujuan untuk mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya. Penelitian harus mencantumkan proses atau operasional alat ukur yang digunakan untuk menghitung variabel yang diteliti (Chourmain, 2008:36). Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Variabel Independen (X) :

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:59). Variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* (GCG) dan struktur modal. *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan menggunakan:

1) Dewan Komisaris Independen (X_{PDKI})

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang bekerja secara independen tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun melaksanakan tugas secara netral serta tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan dewan komisaris, dewan direksi atau dengan pemegang saham lainnya. Proporsi Dewan Komisaris Independen merupakan presentase jumlah komisaris independen dari total jumlah anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PDKI = \frac{\text{Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}} \times 100$$

Sumber: Ujianto dan Pramuka (2007:10)

2) Dewan Direksi (X_{DD})

Dewan Direksi bertugas untuk mengatur pengelolaan usaha dan memonitor kinerja perusahaan yang tanggung jawabnya diserahkan kepada para manajer. Dewan Direksi terdiri dari beberapa direktur perusahaan dan dipimpin oleh direktur utama. Definisi operasional dewan direksi dalam penelitian ini adalah ukuran dari jumlah dewan direksi, yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD = \text{Ln } \Sigma(\text{Jumlah Dewan Direksi})$$

Sumber: Septiani (2013)

3) Komite Audit (X_{KA})

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaporan keuangan, mengawasi audit internal maupun eksternal dan pengendalian internal. Definisi operasional komite audit dalam penelitian ini adalah ukuran dari jumlah komite audit, yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KA = \text{Ln } \Sigma (\text{Jumlah Komite Audit})$$

Sumber: Septiani (2013)

4) Kepemilikan Institusional (X_{KI})

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh perusahaan oleh investor institusi. Kepemilikan institusi dihitung dengan cara membandingkan total lembar saham institusi dengan total lembar saham perusahaan yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Total Lembar Saham Institusi}}{\text{Total Lembar Saham Beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Herdjiono dan Sari (2016:42)

5) *Debt to Assets Ratio* (DAR) (X_{DAR})

Debt to Assets Ratio atau *Debt Ratio* menggambarkan pengukuran dan perhitungan jumlah utang yang diberikan oleh para kreditur kepada perusahaan untuk pembiayaan aktiva. *Debt to Assets*

Ratio (DAR) diukur dengan cara membandingkan total utang dengan total aktiva atau aset perusahaan. Pengukuran rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Kasmir (2010:122)

6) *Debt to Equity Ratio* (X_{DER})

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan pengukuran perbandingan jumlah utang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh pemilik perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. *Debt to Equity Ratio* (DER) diukur dengan cara membandingkan total utang dengan total ekuitas atau modal sendiri perusahaan. Pengukuran rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Kasmir (2010:124)

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas) (Siregar, 2014:18). Pendapat ini didukung oleh Sugiyono (2013:59) yang menyatakan bahwa, “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependen*) yaitu Profitabilitas yang diproksikan menggunakan:

7) *Return on Assets* (Y_{ROA})

Return On Assets merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang ditentukan berdasarkan tingkat aktiva atau aset. Alasan menggunakan *Return On Assets* (ROA) dalam penelitian ini karena ROA mencerminkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba yang optimal berdasarkan jumlah seluruh aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Investor dapat melihat dan memantau bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan aktiva secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan laba yang juga menjadi salah tujuan perusahaan dan tujuan dari praktik *good corporate governance*. Perhitungan rumus *Return On Assets* (ROA) perusahaan perbankan sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (EBIT)}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011

8) *Return on Equity* (Y_{ROE})

Return On Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan modal sendiri dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak. Alasan memilih menggunakan *Return On Equity* (ROE) dalam penelitian ini karena ROE mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan modal sendiri

untuk menghasilkan laba dan bagi para investor sebagai pemegang saham (*principals*) tingkat pengembalian atas modal sendiri adalah ukuran yang paling penting karena rasio ini menunjukkan seberapa besar dan cepat tingkat hasil (*return*) yang diperoleh pemegang modal atas modal yang dimiliki perusahaan (Sitanggang, 2014:30). Apabila tingkat rasio ROE tinggi maka menunjukkan perputaran return yang dihasilkan cepat dan investor akan tetap percaya untuk menanamkan saham mereka di perusahaan. Dengan tingkat ROE yang tinggi maka akan meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara pihak *agent* dan *principals*. Perhitungan rumus *Return On Equity* (ROE) perusahaan perbankan sebagai berikut :

$$Return\ on\ Equity = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Rata - rata Total Ekuitas}}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2011

Secara rinci definisi operasional variabel dirangkum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator dan Pengukuran	Skala
<i>Corporate Governance</i>	Proporsi Dewan Komisaris Independen	$\frac{\text{Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}} \times 100$ Sumber: Ujijanto dan Pramuka (2007:10)	Rasio
	Dewan Direksi	Σ (Jumlah Dewan Direksi) Sumber: Septiani (2013)	Interval
	Komite Audit	Σ (Jumlah Komite Audit) Sumber: Septiani (2013)	Interval

Lanjutan Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator dan Pengukuran	Skala
<i>Corporate Governance</i>	Kepemilikan Institusional	$\frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ Sumber: Herdjono dan Sari (2016)	Rasio
Struktur Modal	<i>Debt to Asset Ratio</i>	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ Sumber: Kasmir (2010:124)	Rasio
	<i>Debt to Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$ Sumber: Kasmir (2010:2013)	Rasio
Profitabilitas	<i>Return On Assets</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak (EBIT)}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 3/30/DPNP 2011	Rasio
	<i>Return On Equity</i>	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Rata – rata Total Ekuitas}}$ Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 3/30/DPNP 2011	Rasio

Sumber : data sekunder diolah 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi merupakan keseluruhan dari kelompok orang, peristiwa atau hal yang diteliti (Zulganef, 2013:133). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Pemilihan perusahaan Perbankan sebagai populasi penelitian dikarenakan perusahaan Perbankan

merupakan perusahaan yang memiliki kebijakan dan praktik *Good Corporate Governance* tersendiri sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan Perbankan terbuka memiliki rasio hutang yang cukup tinggi. Populasi perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016 adalah sebanyak 42 perusahaan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Menurut Zulganef (2013:134), sampel adalah bagian atau *subset* dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:122). Menurut Zulganef (2013:146) *purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti. Kriteria penentuan sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
2. Perusahaan Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
3. Data yang diperlukan dalam penelitian tersedia lengkap, baik mengenai *good corporate governance* yaitu tercantum jumlah dewan

komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta rasio hutang dan rasio profitabilitas secara berturut-turut selama periode 2012-2016 dalam laporan keuangan.

4. Perusahaan Perbankan yang tidak mengalami kerugian dan memiliki nilai profitabilitas positif selama periode 2012-2016.

Berikut adalah tabel penentuan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yang dijelaskan oleh Tabel 4 :

Tabel 4 Sampel Penelitian (*Purposive Sampling*)

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria				Sampel
			1	2	3	4	
1	AGRO	PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
2	AGRS	PT. Bank Agris Tbk.	√	X	X	X	Tidak Terpilih
3	ARTO	PT. Bank Artor Indonesia Tbk.	X	X	√	√	Tidak Terpilih
4	BABP	PT. Bank MNC Internasional Tbk.	√	√	X	X	Tidak Terpilih
5	BACA	PT. Bank Capital Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
6	BBCA	PT. Bank Central Asia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
7	BBHI	PT. Bank Harda Internasional Tbk.	√	√	X	X	Tidak Terpilih
8	BBKP	PT. Bank Bukopin Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
9	BBMD	PT. Bank Mestika Dharma Tbk.	X	X	√	√	Tidak Terpilih
10	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih

Lanjutan Tabel 4 Sampel Penelitian (*Purposive Sampling*)

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria				Sampel
			1	2	3	4	
11	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
12	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
13	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
14	BBYB	PT. Bank Yudha Bakti Tbk.	√	X	X	X	Tidak Terpilih
15	BCIC	PT. Bank J Trust Indonesia Tbk.	√	√	√	X	Tidak Terpilih
16	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
17	BEKS	PT. Bank Pundi Indonesia Tbk.	√	√	√	X	Tidak Terpilih
18	BGTG	PT. Bank Ganesha Tbk.	X	X	X	√	Tidak Terpilih
19	BINA	PT. Bank Ina Perdana Tbk.	X	X	X	√	Tidak Terpilih
20	BJBR	PT. Bank Pmebangunan Daerah Jabar Banten Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
21	BJTM	PT. Bank Daerah Pembangunan Jawa Timur Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
22	BKSW	PT. Bank QNB Indonesia Tbk.	√	√	√	X	Tidak Terpilih
23	BMAS	PT. Bank Maspion Indonesia Tbk.	X	X	X	√	Tidak Terpilih
24	BMRI	PT. Bank Mandiri (Perseroan) Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
25	BNBA	PT. Bank Bumi Arta Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
26	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
27	BNII	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih

Lanjutan Tabel 4 Sampel Penelitian (*Purposive Sampling*)

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria				Sampel
			1	2	3	4	
28	BNLI	PT. Bank Permata Tbk.	√	√	√	X	Tidak Terpilih
29	BSIM	PT. Bank Sinarmas Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
30	BSWD	PT. Bank Of India Indonesia Tbk	√	√	√	X	Tidak Terpilih
31	BTPN	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
32	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
33	DNAR	PT. Bank Dinar Indonesia Tbk.	√	X	X	√	Tidak Terpilih
34	INPC	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
35	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
36	MCOR	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
37	MEGA	PT. Bank Mega Tbk	√	√	√	√	Terpilih
38	NAGA	PT. Bank Mitraniaga Tbk.	X	X	X	√	Tidak Terpilih
39	NISP	PT. Bank OCBC NISP Tbk.	√	√	√	√	Terpilih
40	NOBU	PT. Bank Nasional Nobu Tbk.	X	X	√	√	Tidak Terpilih
41	PNBM	PT. Bank Panin Indonesia Tbk.	√	√	√	X	Tidak Terpilih
42	PNBS	PT. Bank Panin Syariah Tbk.	√	X	X	√	Tidak Terpilih
43	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia Tbk.	√	√	X	X	Tidak Terpilih

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Hasil pemindaian perusahaan perbankan didapat hasilnya pada kriteria pertama (K1) sebanyak 36 perusahaan yang memenuhi kriteria, kriteria kedua (K2) sebanyak 32 perusahaan, kriteria ketiga (K3) sebanyak 28 perusahaan, dan kriteria keempat (K4) sebanyak 23 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pada proses sampling ini ditemukan beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel lebih dari satu (1) kriteria sekaligus. Jumlah akhir sampel penelitian berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas terdapat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Pemilihan Sampel

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	43
Perusahaan yang tidak terdaftar selama lima tahun berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016	(7)
Perusahaan Perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2016	(4)
Variabel yang diperlukan dalam penelitian tidak tercantum di dalam laporan keuangan selama periode 2012 – 2016	(4)
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami kerugian atau memiliki nilai profitabilitas negatif selama periode 2012-2016	(5)
Total Sampel Penelitian	23

Sumber: Data sekunder diolah 2017

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti, maka diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan perbankan dengan jumlah data pengamatan sebanyak 115 data selama 5 (lima) tahun periode 2012-2016. Berikut merupakan daftar sampel perusahaan yang terpilih disajikan di Tabel 6:

Tabel 6 Daftar Sampel

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	AGRO	PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.
2	BACA	PT. Bank Capital Indonesia Tbk.
3	BBCA	PT. Bank Central Asia Tbk.
4	BBKP	PT. Bank Bukopin Tbk.
5	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
6	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
7	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
8	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara Tbk.
9	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
10	BJBR	PT. Bank Pmebangunan Daerah Jabar Banten Tbk.
11	BJTM	PT. Bank Daerah Pembangunan Jawa Timur Tbk.
12	BMRI	PT. Bank Mandiri (Perseroan) Tbk.
13	BNBA	PT. Bank Bumi Arta Tbk.
14	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
15	BNII	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
16	BSIM	PT. Bank Sinarmas Indonesia Tbk.
17	BTPN	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
18	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional Tbk.
19	INPC	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.
20	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
21	MCOR	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
22	MEGA	PT. Bank Mega Tbk.
23	NISP	PT. Bank OCBC NISP Tbk.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu fakta yang menggambarkan sesuatu lewat angka, simbol, atau kode lainnya (Agung, 2012:58). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan teknik penelusuran literatur. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:224). Teknik dokumentasi

merupakan teknik pengambilan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen (Agung, 2012:66). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa periode 2012-2016. Laporan keuangan dan tahunan perusahaan diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan penghitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian-pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2014:125). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:206). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian.

Statistik deskriptif merupakan metode mengatur, menerangkan dan mempresentasikan data dengan cara yang informatif (Ghozali, 2016:19).

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial disebut juga statistik *induktif* atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel tersebut yang kebenarannya bersifat peluang (Sugiyono, 2013:207). Statistik inferensial terdiri dari beberapa tahapan uji, antara lain:

a. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian sebagai regresi linier berganda. Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data yang layak dalam penelitian yaitu data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. “Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal”, (Ghozali, 2016:154). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan grafik histogram, grafik normal P-Plot dan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pengujian dengan menggunakan grafik P-Plot

jika ditemukan hasil penyebaran titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) apabila memiliki probabilitas lebih besar dari $> 0,05$ maka variabel penelitian tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak adanya temuan model regresi yang berhubungan secara signifikan antar variabel independen. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas pada penelitian ini adalah *Variance Factor* (VIF). Metode ini dijelaskan oleh Ghozali (2016:104) sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual atau pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika beda disebut heterokedastitas. Menurut Ghozali (2016:134) “model regresi yang baik adalah model homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas”. Cara mendeteksi heterokedastitas yaitu dengan melihat aad atau tidaknya pola tertentu dalam grafik *Scatterplot* dari nilai ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dan nilai SRESID (nilai residual, sumbu Y) (Ghozali, 2016:134). Apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk pola tertentu dan teratur maka terjadi heterokedastisitas dan dianggap tidak baik, sebaliknya apabila tidak membentuk pola tertentu, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedstitas dan dianggap model regresi tersebut baik.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi berganda terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Apabila terjadi korelasi maka dinamakan terdapat autokorelasi. Adanya autokorelasi sering ditemukan pada data *time series* karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan. Metode yang digunakan dala uji autokorelasi ini adalah *Durbin-Watson* (DW test) dan uji Run test. Syarat lolos uji Run test adalah apabila nilai Asymp signifikansi $> 0,05$. Pengujian (DW test) nilai DW diperoleh menggunakan program SPSS. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Menurut Ghazali, (2016:108) dasar keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dijelaskan melalui Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghazali (2016:108)

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai antara pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen (Gozali, 2016:93). Secara sistematis model peramalan regresi linier berganda dapat disederhakan kedalam rumus model matematis sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y_1 = Return On Assets pada tahun x

Y_2 = Return On Equity pada tahun x

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

- X_1 = Proporsi Dewan Komisaris Independen
 X_2 = Dewan Direksi
 X_3 = Komite Audit
 X_4 = Kepemilikan Institusional
 X_5 = *Debt to Assets Ratio*
 X_6 = *Debt to Equity Ratio*
 e = Variabel Residual

c. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dibuat diterima atau ditolak. Secara statistik, dapat diukur dengan koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t statistik.

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan model variabel X (*Independent Variabel*) mempengaruhi variabel Y (*Dependent Variabel*). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2016:95). Koefisien determinasi mempunyai nilai antara nol sampai satu atau dirumuskan yaitu ($0 \leq R^2 \leq 1$), semakin R^2 mendekati 1 (satu) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel depende, namun sebaliknya apabila R^2 mendekati 0 (nol) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016:95) terdapat koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu *Adjusted R Square*.

Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan, dengan menggunakan *Adjusted R Square* maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan tersebut dapat naik atau turun oleh adanya penambahan baru dalam model.

2) Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji Statistik F dilakukan untuk mengukur apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan di dalam model regresi secara bersamaan (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2016:96). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Langkah dan prosedur uji statistik F antara lain :

1. Menentukan formulasi hipotesis:

H_0 : X_i berpengaruh tidak signifikan terhadap Y

H_a : X_i berpengaruh signifikan terhadap Y

2. Menentukan F tabel = k ; n-k, (k = jumlah variabel bebas, n = jumlah sampel) untuk mencari nilai F hitung dengan taraf signifikansi 95% atau tingkat kesalahan yang dapat diterima (α) sebesar 5% (0,05)
3. Menentukan nilai uji F statistik
4. Menentukan kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa secara simultan semua variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)

3) Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Pengujian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (X) atau pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$ $\alpha =$ tingkat probabilitas (0,05) $n =$ jumlah sampel $k =$ jumlah variabel bebas

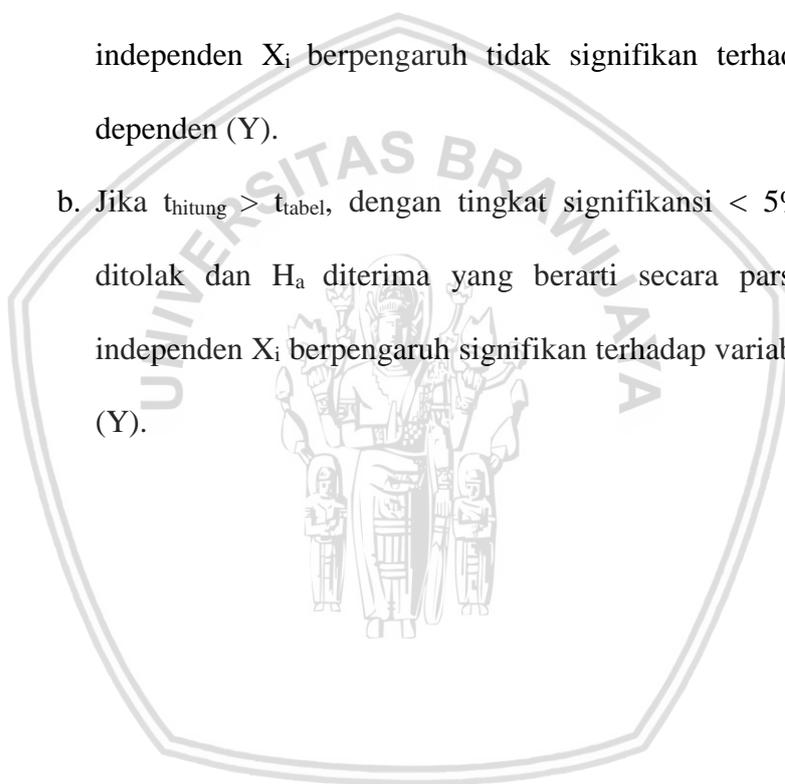
Hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. $H_0 : b_i$ (koefisien variabel independen X_i) = 0, artinya secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

- b. H_a : b_i (koefisien regresi variabel independen X_i) $\neq 0$, artinya secara parsial variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi $> 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti secara parsial variabel independen X_i berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi $< 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial variabel independen X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

Pasar modal adalah sebuah pusat tempat (pasar) yang menyediakan layanan jual – beli instrumen keuangan jangka panjang berupa saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif dan instrumen keuangan lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan Efek”. Instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar modal merupakan jenis instrumen jangka panjang yang masa berlakunya lebih dari satu tahun. Keberadaan pasar modal memiliki dua fungsi khususnya bagi para investor. Fungsi pertama adalah pasar modal digunakan sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal atau dana dari para atau pemodal investor di perusahaan lain. Fungsi kedua adalah pasar modal berguna sebagai sarana masyarakat umum yang ingin berpartisipasi menanamkan modalnya dengan cara investasi pada suatu perusahaan dalam bentuk instrumen keuangan berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta yang diwaktu itu masih

disebut (Batavia) pada tahun 1912 untuk kepentingan pemerintah kolonial pada saat itu. Terjadinya perang dunia I membuat Bursa Efek di Batavia ini sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1925 di beberapa daerah tepatnya di Bursa Efek Jakarta, Semarang dan Surabaya. Kondisi pertumbuhan pasar modal yang tidak berjalan dengan baik, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, dan pengaruh isu politik serta dampak dari sisa perang dunia I dan II membuat Bursa Efek kembali ditutup. Penutupan Bursa Efek pertama diawali Bursa Efek Semarang dan Surabaya pada tahun 1939, dan kemudian disusul penutupan Bursa Efek Jakarta pada tahun 1942. Setelah sempat ditutup dan vakum, bursa efek dibuka dan diaktifkan kembali kegiatannya pada tanggal 10 Agustus 1977. Bursa efek yang diaktifkan pada saat itu adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang secara resmi dibuka dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), yang merupakan lembaga berwenang baru di bawah Departemen Keuangan. Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar modal mengalami peningkatan seiring dengan berbagai insentif dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta membuat berkembangnya pasar keuangan dan sektor swasta dengan puncak pertumbuhan pada tahun 1990. Perbaikan dan pertumbuhan kemajuan pasar modal berdampak hingga adanya penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai sekarang (www.idx.co.id).

2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berikut visi dan misi dibentuknya Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:

- a. Visi : menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.
- b. Misi : menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

Visi dan misi BEI dikembangkan untuk menentukan nilai dasar (*core values*) dan kompetensi dasar (*core competencies*). *Core values* yang diterapkan oleh BEI adalah *teamwork, integrity, professionalism, dan service excellence*. *Core competencies* yang dimiliki oleh BEI meliputi *building trust, integrity, strive for excellence, dan customer focus* (www.idx.co.id).

B. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengambilan periode selama lima tahun yaitu 2012-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil dari teknik pengambilan sampel diperoleh 21 perusahaan sektor perbankan yang digunakan sebagai objek penelitian. Berikut gambaran umum 21 perusahaan sektor perbankan yang menjadi sampel penelitian.

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO) didirikan pada tanggal 27 September 1989 dengan nama awal adalah Bank Agroniaga

(Bank AGRO) oleh Dana Pesiun Perkebunan (Dapenbun). Bank AGRO bergerak dibidang perbankan dan pengembangan pembiayaan sektor agribisnis. Portofolio kredit Bank AGRO sebagian besar (antara 50% - 60%) disalurkan di sektor agribisnis. Bank AGRO menjadi perusahaan publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No S-1565/PM/2003 pada 30 Juni 2003 dan di tahun yang sama Bank AGRO berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya, sedangkan pada tahun 2007 saham Bank AGRO dengan kode AGRO mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep GBI/2006 tertanggal 2006 Bank AGRO meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Devisa.

Tanggal 3 Maret 2011 Bank Rakyat Indonesia secara sah menandatangani Akta Akuisisi Saham dengan PT Bank Agroniaga, Tbk dan secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk dengan proporsi saham pada tahun 2016 sebesar 87,23%. Bergabungnya kedua perusahaan ini sebagai wujud komitmen pada tahun 2012 Bank AGRO berganti nama menjadi BRI Agro atau sekarang disebut PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Saat ini, Bank BRI AGRO memiliki 1 kantor pusat operasional, 16 kantor cabang, 19 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas dengan jumlah pekerja 640 orang.

2. PT Bank Capital Indonesia Tbk.

PT Bank Capital Indonesia Tbk. pertama kali bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 April 1989. Nama Bank Credit Lyonnais Indonesia kemudian mengalami perubahan

menjadi PT Bank Capital Indonesia pada tanggal 1 September 2004 yang secara sah dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 101 tanggal 17 Desember 2004. Penawaran saham Umum Bank Capital Indonesia dilakukan pada tanggal 13 Juli 2007 dan saham Bank Capital Indonesia berhasil tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go-public* sekaligus memiliki nama kode perusahaan (BACA). Produk unggulan yang menjadi *value added* bagi BACA adalah bermacam-macam simpanan seperti Capital Giro dalam rupiah dan dollar yang mana memudahkan nasabah untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. PT Bank Capital Indonesia secara konsisten melakukan pemberian pembiayaan dan kredit yang terus ditingkatkan terfokus pada perusahaan potensial seperti sektor Property dan Real Estate, usaha persewaan dan jasa keuangan dengan penetrasi 35%. Selayaknya perusahaan perbankan hingga saat ini PT Bank Capital Indonesia sudah memiliki dua kantor cabang dan 33 kantor cabang pembantu serta 30 kantor kas.

3. PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Central Asia Tbk atau yang dikenal dengan sebutan Bank BCA didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 21 Februari 1957 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.42855/ U.M. yang berkantor pusat di Jakarta. Tahun 1998 pada masa krisis moneter BCA menjadi Bank Taken Over (BTO) dan disertakan dalam program rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan institusi pemerintah. BPPN pada tahun 1999 menguasai 92,8%

saham BCA dan setahun berikutnya pada tanggal 31 Mei 2000 BPPN melakukan divestasi sebanyak 22,5% dari seluruh saham BCA melalui Penawaran Saham Publik Perdana (IPO) dengan kode saham BBKA sehingga kepemilikan saham berkurang menjadi 70,3%. Kepemilikan saham BCA hingga pada tahun 2016 terbagi menjadi dua yaitu sebesar 47,15% milik PT. Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 52,85% dimiliki oleh masyarakat umum. BCA memiliki 13 macam produk dan layanan yang terbagi-bagi menjadi beberapa fungsi. BCA memiliki 12 kantor wilayah utama dengan setiap wilayah sedikitnya memiliki 7 kantor cabang utama dan paling banyak memiliki lebih dari 100 kantor cabang pembantu, selain itu BCA juga memiliki kantor non wilayah yang disebut menara BCA di Grand Indonesia. Total karyawan BCA berjumlah 25.073 orang.

4. PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Bukopin Tbk didirikan di Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat (Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal koperasi No. 8251. Bank Bukopin dalam perkembangannya telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi dan sebelumnya Bank Bukopin mengubah status badan hukum Bank dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin melakukan pencatatan dan penawaran sahamnya publik pertama kali (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 yang tercatat dengan kode saham BBKP. Kepemilikan

saham Bank Bukopin terbagi menjadi milik PT Bosowa Corporindo sebesar 30%, masyarakat umum sebesar 40,48% dan Negara Republik Indonesia sebesar 11,43%. Bank Bukopin juga menyertakan salah satu kepemilikan saham Koperasi di Indonesia yaitu KOPELINDO sebesar 18,09%. Bank Bukopin memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, keduanya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Bukopin berfokus pada empat bidang usaha yaitu mikro, UMKM, konsumen dan bisnis komersial. Jaringan operasional Bank Bukopin hingga tahun 2016 tercatat memiliki lebih dari 450 outlet dengan 43 kantor cabang, 170 kantor cabang pembantu, 126 kantor kas dan 30.000 ATM tersebar di 23 provinsi.

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau yang biasa disebut BNI pada awalnya didirikan di Indonesia pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral dengan nama yang sama yaitu “Bank Negara Indonesia” atau disingkat BNI yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan berubah statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Status BNI kembali mengalami perubahan menjadi perseroan terbatas (Persero) pada 29 April 1992. BNI merupakan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 25 November 1996 dengan kode saham perusahaan BBNI. Kepemilikan saham BNI terdiri dari 60% dimiliki oleh Pemerintah Republik

Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit, maupun dana pihak ketiga. Produk dan layanan yang ditawarkan BNI terdiri dari empat segmen yaitu Konsumer seperti berupa simpanan-pinjaman, kartu kredit-kartu debit, *e-banking*; *Priority Banking* seperti layanan emerald, produk asuransi dan produk investasi serta *e-banking*; *Business Banking* terdiri dari sektor industri, *funding*, *lending* dan *services*; dan Internasional. BNI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 17 kantor wilayah, 196 kantor cabang, 948 kantor cabang pembantu, 623 kantor kas dan lebih dari 17.000 ATM tersebar di seluruh wilayah di Indonesia

6. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk pada awalnya didirikan dengan nama “Bank Pasar Karya Parahyangan PT” pada tanggal 18 Januari 1972. Nama ini kemudian diubah menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 27 tanggal 10 Maret 1989 yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Bank BNP. Bank BNP mulai beroperasi sebagai bank umum di Bandung pada tanggal 3 Juli 1989. Perubahan status Bank BNP dari perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) beriringan dengan penawaran 50 juta saham biasa dan penerbitan waran sejumlah 20 juta lembar yang resmi tercatat pada Bursa Efek Jakarta pada 10 Januari 2001. Pemegang saham pengendali Bank BNP hingga pada tahun 2016 adalah dua perusahaan asing yaitu ACOM sebesar 66,15% dan Bank of Tokyo Mitsubishi

UFJ, Ltd sebesar 9,35%, sisanya sebesar 10,72% dimiliki oleh PT Hermawan Sentral Investama dan 13,78% dimiliki oleh masyarakat umum. Bank BNP menyediakan beragam produk dan layanan mulai dari kredit pembiayaan UMKM, kredit Konsumer dan Komersial, Kredit Tanpa Agunan, hingga produk Funding berupa Simpanan Berjangka, Tabungan dan Giro didukung oleh sistem IT, sementara itu untuk jasa layanan perbankan meliputi *Remittance, Collection, Trade Finance*, dan *Money Changer*. Bank BNP telah memiliki jumlah jaringan sebesar 62 kantor dengan 64 unit ATM yang didukung oleh 1.676 karyawan.

7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pertama kali didirikan pada tanggal 18 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmadja yang semula dipergunakan untuk mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema sederhana. Peresmian nama pada akhirnya Bank Rakyat Indonesia atau yang disebut Bank BRI ditetapkan sejak 18 Desember 1968. Tahun 1992 BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, yang kini menjadi Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Tahun 2007 BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA) yang kemudian dikonversi menjadi Bank BRI Syariah. Kepemilikan saham BRI sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia karena BRI merupakan Bank BUMN dengan proporsi kepemilikan sebesar 86,75% dan sebesar 34,65 dimiliki oleh Pemodal Nasional serta sisanya 8,60% dimiliki

oleh masyarakat umum. BRI secara konsisten fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis. Produk yang ditawarkan oleh BRI adalah produk simpanan dan produk pinjaman, sedangkan jasa layanan perbankan meliputi jasa kelembagaan, *cash management system*, jasa bisnis dan keuangan, *e-banking*, jasa layanan bisnis internasional, layanan *treasury*. Jaringan BRI semakin diperluas hingga di tahun 2016 memiliki 466 Kantor Cabang, 609 Kantor Cabang Pembantu dan 5.380 BRI unit serta 984 Kantor Kas dan 2492 mesin ATM tersebar di seluruh Indonesia.

8. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disebut juga dengan Bank BTN didirikan sejak tahun 1897 pada masa kolonial Belanda dengan nama Postpaarbank dan pada tanggal 9 Februari 1950 Pemerintah RI mengubah nama Postpaar bank menjadi Bank Tabungan Pos, kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada tanggal 22 Juni 1963. Sejak tahun 1974 Bank BTN ditunjuk sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah kebawah dan sampai pada tahun 2002 Bank BTN ditunjuk sebagai bank umum yang fokus pada pembiayaan rumah. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham perusahaan BBTN dan merupakan bank pertama yang melakukan sekuritas aset pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Bergaum Aset (KIK-EBA). Komposisi pemegang saham Bank BTN sebagian besar dimiliki oleh

Pemerintah RI sebesar 60% karena merupakan Bank BUMN dan sisanya adalah milik publik sebesar 40% yang terdiri dari publik asing dan publik lokal. Bank BTN memiliki visi menjadi *“The leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service”* untuk mewujudkannya BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yaitu perbankan konsumen, perbankan komersial dan perbankan syariah. Bank BTN selalu berusaha untuk memberikan kemudahan pembiayaan pengembangan konstruksi dan akselerasi pencairan KPR. Kantor Pusat BTN berada di Jakarta Pusat yang disebut Menara BTN dan sejauh ini BTN telah memiliki total jaringan kantor Konvensional sejumlah 3.780 tempat dan mesin ATM sejumlah 1830 tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

9. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk didirikan dengan nama Bank Kopra Indonesia pada tanggal 16 Juli 1956 dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976. Bank Danamon mulai beroperasi pada tahun 1988 sebagai Bank Devisa pertama di Indonesia. Penawaran saham perdana Bank Danamon di Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 1989 menjadikan Bank Danamon sebagai perusahaan publik dengan kode saham perusahaan BDMN. Pemegang saham pengendali Bank Danamon dipegang oleh perusahaan asing bernama Fullerton Financial Holdings Pte Ltd yang dibagi menjadi beberapa kepemilikan yaitu JPMCB-Franklin Investment Funds sebesar 6,58% dan Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd sebesar 67,37% serta sisanya sebesar 26,05%

dimiliki oleh masyarakat umum. Pengembangan mutu layanan Bank danamon dilakukan dengan beberapa cara. Jenis bidang usaha Bank Danamon meliputi Tresuri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Perbankan UMKM, Danamon Simpan Pinjam, *Private Banking* dan *Consumer Banking*. Kantor Pusat Bank Danamon berada di Jakarta Pusat yang disebut Menara Bank Danamon dan hingga tahun 2016 Bank Danamon sudah memiliki 1800 cabang yang terdiri kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk didirikan pada 20 Mei Mei 1961 sebagai bagian dari peraturan Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat dengan nama awal “Bank Karya Pembangunan” yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61. Berdasarkan surat perintah tersebut diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan mendapat sebutan “Bank Jabar”. Nama Bank Jabar kemudian mengalami perubahan kembali berdasarkan status hukum yang baru menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan pada akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2010 bank Jabar Banten resmi berubah nama menjadi bank bjb dan dikenal sebagai PT BPD Habar Banten. PT BPD Jabar Banten Tbk memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010 dengan kode saham perusahaan BJBR. Pemegang saham Pengendali pada Bank Jabar Banten dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat dan Banten sebesar 75% dan sisanya sebanyak 25% dimiliki oleh pemodal lokal dan asing. Bidang usaha yang dijalankan oleh Bank Jabar Banten terdiri dari dua jenis yaitu *commercial banking* yang meliputi giro dan kredit dan *Treasury* yang lebih ke pelayanan internasional. Bank BJB hingga tahun 2016 memiliki 63 kantor cabang, 311 kantor cabang pembantu, dan 337 kantor kas serta 1216 mesin ATM tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dikenal dengan sebutan “PT Bank Jatim” atau BPD Jawa Timur Tbk, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Seiring perkembangannya pada tahun 1990 Bank Jatim meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. PT BPD Jatim Tbk memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012 dengan kode saham perusahaan BJTM. Sesuai dengan Anggaran Dasar BPD Jatim layaknya perbankan pada umumnya bidang usaha Bank Jatim adalah menghimpun dana dari masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta menyediakan layanan perbankan tambahan berdasarkan prinsip syariah. PT BPD Jatim Tbk hingga tahun 2016 memiliki 40 kantor cabang, 7 kantor cabang syariah, 158 kantor cabang pembantu dan 188 kantor Kas serta 686 mesin ATM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

12. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya Bank Mandiri dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta. Pendirian Bank Mandiri merupakan salah satu upaya Pemerintah RI dalam merestrukturisasi perbankan paska terjadinya krisis moneter tahun 1998. Keberadaan Bank Mandiri adalah hasil dari peleburan bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia pada bulan Juli 1999 untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2003 Bank Mandiri mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dan menawarkan empat milyar saham kepada masyarakat dengan harga nominal Rp 675 per lembar saham. Bank Mandiri mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 14 Juli 2003 sekaligus melakukan penawaran saham perdana (IPO) sebesar 20%. Pemegang Saham Pengendali dan terbesar Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% dimiliki oleh masyarakat lokal dan asing. Bidang usaha Bank Mandiri sama seperti bank umum lainnya, namun yang membedakan adalah strategi yang digunakan yaitu *wholesale*, *retail*, dan *integrate the group* untuk memberi kekuatan internal dan pelayanan maksimal kepada nasabah. Bank Mandiri

hingga tahun 2016 telah memiliki 2.600 Kantor cabang yang terbagi menjadi 12 wilayah regional di Indonesia dan memiliki 17.461 mesin ATM.

13. PT Bank Bumi Arta Tbk

PT Bank Bumi Arta Tbk didirikan pada tanggal 3 maret 1967 di Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 1967 memberikan izin penggabungan kepada Bank Bumi Arta untuk menggabungkan usahanya dengan Bank Duta Nusantara yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas jaringan operasional bank. Bank Bumi Arta meningkatkan statusnya menjadi bank devisa pada tanggal 20 Agustus 1991. Kebijakan Bank Bumi Arta untuk lebih memperkuat struktur permodalan maka pada tanggal 1 Juli 2008 melaksanakan IPO (*Initial Public Offering*) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan saham Bank Bumi Arta dimiliki oleh tiga perusahaan nasional dalam negeri terbagi menjadi milik PT Surya Husada Investment sebesar 45,45%, PT Dana Graha Agung sebesar 27,27%, dan PT Budiman Kencana Lestari sebesar 18,18% sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 9,10%. Produk dan layanan Bank Bumi Arta seperti bank umum lainnya namun lebih sederhana yaitu hanya produk pendanaan dan produk pembiayaan serta layanan perbankan internet. Bank Bumi Arta hingga tahun 2016 telah memiliki 52 jenis kantor cabang dan 32 payment point yang tersebar di pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi serta memiliki 100.795 jaringan ATM.

14. PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk didirikan di Jakarta pada tanggal 26 September 1955 dengan nama awal PT Bank Niaga Tbk. Tanggal 22 Juli 2008 nama PT Bank Niaga Tbk diubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk. Bank CIMB Niaga memperoleh izin usaha komersial sebagai bank umum, bank devisa dan sekaligus bank yang melakukan prinsip syariah pada tanggal 11 November 1955 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Direksi Bank Indonesia. Bank CIMB Niaga adalah bank pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan melalui ATM pada tahun 1991 memberikan layanan perbankan *online* bagi para nasabahnya. Bank CIMB Niaga menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya sekaligus melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 24 November 1989. Keberadaan Bank CIMB Niaga merupakan hasil dari penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Lippo Tbk pada tahun 2008 yang mana kepemilikan saham pengendali dimiliki oleh CIMB Group sebesar 92,5%. Kepemilikan saham lainnya dimiliki oleh institusi Khasanah Nasional Berhard sebesar 1,59% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat umum. Produk dan layanan Bank CIMB Niaga meliputi produk simpanan, fasilitas akses elektronik, pinjaman individu, perbankan bisnis tresuri, dan layanan perbankan syariah. Bank CIMB Niaga memiliki 575 kantor cabang, 30 Kantor Mikro Laju dan 3.865 mesin ATM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

15. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bagian dari Grup Malayan Banking Berhard (Maybank) yang merupakan salah satu grup keuangan terbesar di ASEAN yang didirikan pada 15 Mei 1959. Nama PT Bank Maybank Indonesia pada awal berdiri dinamakan PT Bank Internasional Indonesia (BII) dan mengalami perubahan nama menjadi “Bank Maybank” pada tanggal 23 September 2015. Maybank melakukan pencatatan saham sebagai perusahaan terbuka dan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 21 November 1989 dengan kode saham perusahaan BNII. Pemegang saham pengendali Bank Maybank didominasi oleh perusahaan asing yaitu Sorak Financial Holdings Pte.Ltd sebesar 45,02%; Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd sebesar 33,96%; UBS AG London sebesar 18,31% dan hanya sebesar 2,71% saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Produk dan layanan perbankan Bank Maybank meliputi simpanan, CFS non ritel, CFS ritel, perbankan global, dan perbankan syariah. Bank Maybank hingga pada tahun 2016 telah memiliki 428 kantor cabang dan 1633 mesin ATM.

16. PT Bank Sinarmas Tbk

PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 di Jakarta Pusat dengan nama awal Bank Shinta Indonesia. Tahun 1995 perusahaan meningkatkan statusnya dari bank umum menjadi bank umum devisa. Nama Bank Shinta Indonesia berganti menjadi PT Bank Sinarmas Tbk

setelah kepemilikan saham pengendali diambil alih sebesar 21% oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk yang bergabung dengan PT Shinta Utama untuk menjadi salah satu bank yang terkemuka dan terpercaya. PT Bank Sinarmas Tbk melakukan pencatatan saham sebagai perusahaan terbuka dan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2010 dengan kode saham perusahaan BSIM. Kepemilikan saham pengendali dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk sebesar 56,06% dan sebesar 41,34% dimiliki oleh masyarakat umum sisanya sebesar 2,56% dimiliki oleh PT Shinta Utama. Produk dan layanan Perbankan PT Bank Sinarmas Tbk terbagi menjadi lini perbankan konvensional dan perbankan syariah. Layanan perbankan konvensional meliputi simpan-pinjam, pendanaan, *bank assurance*, reksadana, kartu kredit dan *international treasury*. Bank Sinarmas hingga tahun 2016 memiliki 73 kantor cabang, 130 kantor cabang pembantu yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

17. PT Bank Pensiun Nasional Tbk

PT Bank Pensiun Nasional Tbk didirikan berdasarkan hasil pemikiran tujuh orang pegawai pensiunan anggota militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh pensiunan militer tersebut kemudian sepakat mendirikan perhimpunan Bank Pegawai Pensiun Militer (BAPEMIL). BAPEMIL pada awal pendiriannya memiliki tujuan membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, pada saat itu ada mada masa krisis keuangan yang menyebabkan banyak masyarakat terlilit utang rentenir. Tahun 1986 anggota BAPEMIL membentuk PT. Bank

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan menjalankan kegiatan komersialnya setelah mendapatkan izin usaha dari Kementerian Keuangan dan Direktur Bank Indonesia. Bank BTPN melakukan pencatatan saham sebagai perusahaan terbuka dan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008, di tahun yang sama PT TPG Nusantara melakukan akuisisi saham BTPN sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia.

Tahun 2011 BTPN meluncurkan program “Daya” yang melibatkan *volunteer* dari para mahasiswa untuk membantu para UMKM mengatasi masalah keuangan dan pemasaran di usahanya. BTPN kembali berinovasi di tahun 2015 dengan meluncurkan BPTN Wow! Merupakan layanan perbankan berbentuk aplikasi yang didukung oleh agen sebagai perpanjangan tangan jaringan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, sebagai upaya dukungan program tersebut hingga tahun 2016 BTPN memiliki 348 cabang Mitra Usaha Rakyat, 383 cabang Purna Bakti dan 148 *payment point*.

18. PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Victoria International Tbk didirikan pada tanggal 22 Oktober 1992 atau yang disebut Bank Victoria dan baru mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Bank Victoria mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 4 Juni 1999. Kepemilikan saham pengendali dimiliki oleh PT Victoria Investama sebesar 45,43%, sementara masyarakat memiliki bagian 26% dan sisanya dimiliki oleh perusahaan lokal

dan asing. Bidang usaha Bank Victoria sama dengan bank umum lainnya yaitu memiliki produk dan layanan perbankan berupa simpan-pinjam, pembiayaan, dan kredit. Bank Victoria hingga tahun 2016 telah memilikim 87 kantor cabang di Indonesia.

19. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk pada awal mulanya didirikan dengan nama PT Inter Pacific Financial Corporation pada tanggal 7 September 1973 dan memulai kegiatan komersial sebagai Bank Umum pada tanggal 24 Februari 1993. Kemunculan Bank Artha Graha disebabkan oleh adanya pergabungan (*merger*) dua perusahaan antara PT Bank Artha Graha kedalam PT Bank Inter Pacific Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) pada tanggal 14 April 2005 yang disetujui oleh Bank Indonesia menjadi izin usaha atas nama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Bank Artha Graha Internasional mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan menerbitkan penawaran publik saham perdana pada tanggal 29 Agustus 1990 Kepemilikan Saham Bank Artha Graha terbagi menjadi beberapa kepemilikan dari perusahaan lokal dan sebesar 41,96% dimiliki oleh masyarakat umum. Bank Artha Graha Internasional hingga pada tahun 2016 telah memiliki jaringan 104 Kantor cabang dan 120 ATM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

20. PT Bank Mayapada Internasional Tbk

PT Bank Mayapada Internasional Tbk didirikan pada 7 September 1989 dan mulai beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan pada tanggal 16 Maret 1990. Peningkatan status bank umum menjadi bank umum devisa didapatkan Bank Mayapada pada tahun 1993. Bank Mayapada memutuskan untuk menjadi perusahaan *go public* seiring dengan pendaftaran pencatatan dan penawaran saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang kini bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1997. Pemegang saham pengendali dimiliki oleh anak perusahaan Mayapada grup yaitu PT Mayapada Karunia sebesar 26,42% dan dimiliki oleh perusahaan asuransi asing yaitu JPMCB-Cathay Life Insurance Co.Ltd sebesar 40%. Bank Mayapada bekerjasama dengan ATM BERSAMA dan ATM BCA sehingga Bank Mayapada memiliki jaringan ATM yang dapat digunakan oleh nasabah sebanyak 98.971 mesin ATM.

21. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

PT Bank China Constructon Bank Corporation (CCB) didirikan pada bulan Oktober 1954 dengan kantor pusat di Beijing Tiongkok dan untuk kantor pusat di Indonesia berada di Jakarta Selatan. Sebelumnya nama bank ini adalah PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk yang kemudian mengalami penggabungan (*merger*) dengan Bank China Construction asal Beijing China dan setelahnya berubah nama menjadi PT China Construction Bank Indonesia Tbk atau disingkat “CCB Indonesia”. Bank CCB tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Januari 2008. Pemegang saham tertinggi pada CCB Indonesia adalah perusahaan induk yaitu China Construction Bank Corporation sebesar 60%, sebesar 25,67% dimiliki oleh Pemilik Perusahaan yaitu Jhonny Wiraatmadja dan sisanya sebesar 13,47% dimiliki oleh publik. Produk dan

layanan perbankan CCB Indonesia terdiri dari produk simpan-pinjam, layanan internasional dan *treasury*, CCB Bank juga berfokus untuk membantu pemberian kredit pada sektor usaha UMKM di Indonesia. CCB Indonesia telah memiliki 113 kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia.

22. PT Bank Mega Tbk

PT Bank Mega Tbk didirikan pada tanggal 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman yang mulai beroperasi secara operasional pada tahun 1969. PT Bank Karman merupakan perusahaan milik keluarga yang berkedudukan di Surabaya. Seiring dengan perkembangannya PT Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama) sebuah *holding company* milik pengusaha nasional Chairul Tanjung. PT Bank Mega melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) sekaligus pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang kini menjadi Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2000 dengan kode saham perusahaan MEGA. Kepemilikan saham PT Bank Mega sebesar 57,82% dimiliki oleh PT Mega Corpora dan sisanya sebesar 42% dimiliki oleh masyarakat. Produk yang disediakan oleh Bank Mega adalah Simpanan dan Pinjaman sedangkan layanan perbankan yang ditawarkan adalah *e-banking* dan perbankan bisnis. Jaringan kantor cabang Bank Mega hingga pada tahun 2016 telah memiliki 348 kantor di 8 wilayah regional Indonesia.

23. PT Bank OCBC NISP Tbk

PT Bank OCBC NISP Tbk sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4

April 1941 di Bandung dengan nama *NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*. Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1990 dan melaksanakan penawaran saham perdana sekaligus pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1994 yang menjadikan Bank OCBC NISP sebagai perusahaan terbuka. Kepemilikan saham pengendali dimiliki oleh OCBC OVERSEAS INVESTMENTS PTE LTD sebagai induk grup perusahaan OCBC sebesar 85,08% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat umum.

C. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang berhubungan dengan data dari variabel-variabel dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*). Variabel-variabel tersebut terdiri dari presentase Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), ukuran Dewan Direksi (DD), jumlah Komite Audit (KA), presentase Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Berikut disajikan informasi penjelasan variabel data penelitian pada periode antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen pada perusahaan perbankan menyatakan setiap perusahaan perbankan wajib

Lanjutan Tabel 8

No	Kode Perusahaan	PDKI (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
20	MAYA	50,0000	50,0000	60,0000	60,0000	40,0000	52,0000
21	MCOR	50,0000	66,6667	66,6667	66,6667	66,6667	63,3334
22	MEGA	66,6667	50,0000	66,6667	50,0000	50,0000	56,6667
23	NISP	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
	Nilai Tertinggi	75,0000	80,0000	75,0000	75,0000	80,0000	
	Nilai Terendah	50,0000	50,0000	50,0000	40,0000	40,0000	
	Rata-rata	56,7529	57,5052	57,4897	57,6501	56,0749	

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat diperoleh informasi bahwa semua perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian telah memenuhi aturan dari OJK untuk memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen sekurang-kurangnya sebesar 30%. Hasil ini dibuktikan dari nilai terendah proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 40% yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) pada periode 2015-2016 dan PT bank Mayapada Internasional pada periode 2016 sedangkan nilai rata-rata proporsi dewan komisaris tertinggi periode 2012-2016 dimiliki oleh PT Bank Victoria Nasional Tbk (BVIC) sebesar 75% yang relatif konstan selama lima tahun. Jumlah dewan komisaris independen di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tidak memiliki batas maksimal, akan tetapi tidak boleh kurang dari 30% dari jumlah dewan komisaris di perusahaan tersebut.

b. Dewan Direksi (DD)

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perusahaan, pengelolaan kinerja, serta mewakili perusahaan baik di

dalam maupun diluar perusahaan. Dewan direksi juga diharuskan memperhatikan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan (Effendi, 2016: 29-30). Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa perusahaan terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih.

Berikut disajikan deskripsi dari variabel Dewan Direksi (DD) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9 Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode Perusahaan	DD (Orang)					Rata-rata (dibulatkan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	5	5	5	5	5	5
2	BACA	4	5	6	6	6	6
3	BBCA	10	10	10	10	11	10
4	BBKP	7	7	7	7	7	7
5	BBNI	10	10	10	9	10	10
6	BBNP	5	5	5	5	5	5
7	BBRI	11	11	11	11	11	11
8	BBTN	7	7	6	8	8	7
9	BDMN	12	11	9	7	9	10
10	BJBR	6	4	7	7	7	6
11	BJTM	5	5	5	5	5	5
12	BMRI	11	11	11	11	10	11
13	BNBA	3	3	3	3	3	3
14	BNGA	12	12	11	11	10	11
15	BNII	9	8	11	9	8	9
16	BSIM	7	6	8	8	8	7
17	BTPN	10	10	10	12	7	10
18	BVIC	6	7	7	6	5	6
19	INPC	6	6	7	7	7	7
20	MAYA	6	6	6	8	9	7
21	MCOR	4	5	5	5	8	5
22	MEGA	8	9	9	10	8	9
23	NISP	4	11	10	10	10	9

Lanjutan Tabel 9

No		DD (Orang)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
	Nilai Tertinggi	12	12	11	12	11	
	Nilai Terendah	3	3	3	3	3	
	Rata-rata (dibulatkan)	7	8	8	8	8	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata jumlah dewan direksi terendah adalah PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) yang konstan secara berturut-turut periode 2012-2016 sejumlah tiga (3) orang. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) memiliki nilai rata-rata jumlah dewan direksi tertinggi selama lima tahun sebesar 11 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian telah memenuhi peraturan UU Perseroan Terbatas dan sejalan dengan Peraturan OJK no 35 2014 yang menetapkan jumlah dewan direksi minimal dua orang atau lebih.

c. Komite Audit (KA)

Menurut Peraturan Badan Usaha Milik Negara mengenai komite audit yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 70 menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit dipimpin oleh satu ketua yang secara langsung bertanggungjawab kepada komisaris dan dewan pengawas. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG) anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan

komisaris yang tidak melaksanakan tugas eksekutif yang terdiri paling sedikit tiga orang dan mayoritas harus independen (Effendi, 2016: 51-55).

Berikut disajikan deskripsi dari variabel Komite Audit (KA) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10 Jumlah Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode Perusahaan	KA (orang)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	3	3	3	3	3	3
2	BACA	3	3	3	3	3	3
3	BBCA	3	3	3	3	3	3
4	BBKP	4	4	4	5	5	5
5	BBNI	4	4	3	4	3	4
6	BBNP	3	3	3	3	3	3
7	BBRI	8	8	6	6	6	7
8	BBTN	3	5	4	5	7	5
9	BDMN	6	6	5	5	5	6
10	BJBR	5	6	6	5	5	6
11	BJTM	3	3	3	3	3	3
12	BMRI	6	6	6	6	6	6
13	BNBA	3	3	6	3	3	4
14	BNGA	6	6	6	6	4	6
15	BNII	5	4	6	4	4	5
16	BSIM	5	5	4	3	3	4
17	BTPN	5	5	4	3	4	4
18	BVIC	3	3	3	5	5	4
19	INPC	5	6	6	6	6	6
20	MAYA	3	3	3	3	3	3
21	MCOR	3	3	3	3	3	3
22	MEGA	3	3	3	3	3	3
23	NISP	3	5	4	4	3	4
Nilai Tertinggi		8	8	6	6	7	
Nilai Terendah		3	3	3	3	3	
Rata-rata (dibulatkan)		4,	5	5	4	4	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 10 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata jumlah komite audit terendah dimiliki oleh beberapa perusahaan perbankan dengan kode saham AGRO, BBCA, BACA, BBNP, BJTM, MAYA, MCOR, dan MEGA dengan nilai rata-rata 3 orang secara konstan setiap periode selama lima tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah tiga orang komite audit untuk perusahaan perbankan dinilai sudah cukup untuk memenuhi tugas komite audit di masing-masing perusahaan perbankan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa rata-rata yang memiliki jumlah anggota komite audit terendah adalah jenis bank yang tidak terlalu besar jika ditinjau dari total aktiva, total modal maupun ukuran perusahaan berdiri, yang artinya tugas dari komite audit untuk melakukan penilaian hasil audit internal maupun eksternal dan pengawasan pengendalian manajemen tidak begitu luas. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki nilai rata-rata jumlah komite audit tertinggi sebesar 7 (tujuh) orang. Hasil ini dapat dikatakan wajar karena Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia sehingga membutuhkan jumlah komite audit yang lebih banyak dari perusahaan perbankan lainnya.

d. Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi lainnya dan persusahaan itu sendiri (Herdjono dan Megasari, 2016:39). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Putra (2017:53) menjelaskan bahwa keberadaan para investor institusional yang menanamkan

saham pada suatu perusahaan dianggap mampu menjadi pemantauan manajemen yang efektif dalam pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan oleh para manajer. Kepemilikan institusional dapat diketahui berdasarkan presentase jumlah kepemilikan institusi.

Berikut disajikan deskripsi dari variabel Kepemilikan Institusional (KI) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 11 di bawah ini :

Tabel 11 Presentase Kepemilikan Institusional Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode Perusahaan	KI (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	93,2320	95,0600	94,9817	96,3303	95,8505	95,0909
2	BACA	39,5300	36,9400	35,9100	34,5100	33,3830	36,0546
3	BBCA	47,1547	47,1547	47,1547	47,1547	47,1547	47,1547
4	BBKP	60,4512	59,6400	60,9600	59,5208	59,5208	60,0186
5	BBNI	97,5416	95,8525	98,8022	98,4429	98,2666	97,7812
6	BBNP	90,5057	81,8507	81,8507	81,9659	81,2200	83,4786
7	BBRI	98,5280	98,4372	98,0300	98,9525	98,8714	98,5638
8	BBTN	96,9100	95,4631	95,0009	96,5495	96,5969	96,1041
9	BDMN	73,7588	97,5750	74,1586	74,1849	73,9493	78,7253
10	BJBR	94,4911	95,8380	93,7400	93,7400	83,3376	92,2293
11	BJTM	93,1065	92,5678	93,9131	95,0121	90,8116	93,0822
12	BMRI	99,9820	98,7500	99,1400	99,7712	90,8116	97,6910
13	BNBA	90,9091	90,9091	90,9091	90,9091	90,9091	90,9091
14	BNGA	99,4135	97,0305	96,9231	96,9231	91,4838	96,3548
15	BNII	97,2877	97,2877	97,2877	97,2877	97,2877	97,2877
16	BSIM	66,5486	60,5623	55,2769	56,1271	58,6240	59,4278
17	BTPN	57,8718	58,8718	55,2769	52,2574	69,3799	58,7316
18	BVIC	53,3845	53,1757	56,5135	49,3852	62,0005	54,8919
19	INPC	71,9331	65,0030	51,1649	71,9109	84,6631	68,9350
20	MAYA	77,2977	82,2863	85,8294	87,5664	87,0284	84,0016
21	MCOR	19,2925	18,5989	85,8294	16,8177	60,8611	40,2799
22	MEGA	57,8221	57,8221	57,8221	57,8221	57,8221	57,8221
23	NISP	85,0780	85,0780	85,0780	85,0780	85,0780	85,0780

Lanjutan Tabel 11

Nilai Tertinggi	99,9820	98,7500	99,1400	99,7712	98,8714	
Nilai Terendah	19,2925	18,5989	35,9100	16,8177	33,3830	
Rata-rata	76,6100	76,5980	77,8936	75,5748	78,0396	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 11, dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata presentase kepemilikan institusional terendah dimiliki oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) sebesar 36,0546% selama lima tahun periode 2012-2016 dibandingkan dengan sampel perusahaan perbankan lainnya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki nilai rata-rata presentase kepemilikan institusional tertinggi selama lima tahun periode 2012-2016 sebesar 98,5638%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dimiliki oleh pihak insitusi dikeranakan komposisi kepemilikan terbagi menjadi dua. Komposisi kepemilikan saham sebesar 56,75% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia karena Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dan sisanya sekitar kurang lebih 42% dimiliki oleh institusi dan perusahaan lokal maupun institusi asing.

e. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio yang digunakan sebagai pengukuran seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio DAR dihitung berdasarkan perbandingan antara total utang dengan total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut disajikan deskripsi dari variabel *Debt to Asset Ratio (DAR)* sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 12 di bawah ini :

Tabel 12 Nilai Debt to Asset Ratio Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode Perusahaan	DAR (Rasio)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	0,9079	0,8367	0,8584	0,7624	0,8298	0,8390
2	BACA	0,8839	0,8730	0,8947	0,9134	0,9074	0,8945
3	BBCA	0,8805	0,8682	0,8554	0,8445	0,8283	0,8554
4	BBKP	0,9239	0,9105	0,9137	0,9201	0,9095	0,9155
5	BBNI	0,8694	0,8767	0,8189	0,8115	0,8170	0,8387
6	BBNP	0,9195	0,8946	0,8789	0,8612	0,8446	0,8798
7	BBRI	0,8792	0,8733	0,8781	0,8712	0,8537	0,8711
8	BBTN	0,9080	0,9119	0,9156	0,9193	0,9107	0,9131
9	BDMN	0,8156	0,8287	0,8313	0,8181	0,7910	0,8169
10	BJBR	0,8719	0,8582	0,8424	0,8576	0,8505	0,8561
11	BJTM	0,8115	0,8270	0,8409	0,8529	0,8325	0,8330
12	BMRI	0,8808	0,8789	0,8774	0,8687	0,8523	0,8716
13	BNBA	0,8500	0,8605	0,8832	0,8121	0,8179	0,8447
14	BNGA	0,8853	0,8817	0,9780	0,8799	0,8584	0,8967
15	BNII	0,9165	0,9117	0,8978	0,9001	0,8844	0,9021
16	BSIM	0,8795	0,8421	0,8513	0,8683	0,8565	0,8595
17	BTPN	0,8691	0,8578	0,8098	0,7904	0,7732	0,8201
18	BVIC	0,8976	0,9142	0,8628	0,8615	0,8529	0,8778
19	INPC	0,9058	0,8779	0,8853	0,8899	0,8313	0,8780
20	MAYA	0,8925	0,8996	0,9212	0,9030	0,8841	0,9001
21	MCOR	0,8837	0,8692	0,8751	0,8599	0,8045	0,8585
22	MEGA	0,9040	0,9080	0,8956	0,8312	0,8261	0,8730
23	NISP	0,8869	0,8611	0,8551	0,8638	0,8588	0,8651
	Nilai Tertinggi	0,9239	0,9142	0,9780	0,9201	0,9107	
	Nilai Terendah	0,8115	0,8270	0,8098	0,7624	0,7732	
	Rata-rata	0,8836	0,8748	0,8748	0,8592	0,8468	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 12 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata tertinggi DAR dimiliki perusahaan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) selama lima tahun pada periode 2012-2016 sebesar 0,9155 atau (91,55%). Hasil ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki perusahaan hampir secara

keseluruhan diayai oleh hutang, PT Bank Danamon Tbk (BDMN) memiliki nilai rata-rata terendah DAR sebesar 0,8169 atau (81,69%), hasil ini tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata tertinggi perusahaan sampel perbankan yang menandakan bahwa total aset yang dimiliki oleh Bank Danamon sebagian besar dibiayai oleh pinjaman atau utang.

f. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan sebagai pengukuran seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio DER dihitung berdasarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas atau total modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut disajikan deskripsi dari variabel *Debt to Asset Ratio* (DER) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13 Nilai Debt to Equity Ratio Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode Perusahaan	DER (Rasio)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	9,8628	5,1226	6,0631	3,2089	4,8763	5,8267
2	BACA	7,6140	6,8766	8,4969	10,5426	9,8038	8,6668
3	BBCA	7,5160	6,7362	6,0645	5,6005	4,9732	6,1781
4	BBKP	12,1465	10,1787	10,5886	11,5235	10,0512	10,8977
5	BBNI	6,6577	7,1088	5,5906	5,2618	5,5202	6,0278
6	BBNP	11,4190	8,4886	7,3199	6,2047	5,4348	7,7734
7	BBRI	7,2802	6,8937	7,2052	6,7649	5,8362	6,7960
8	BBTN	9,8717	10,3501	10,8443	11,3958	10,1951	10,5314
9	BDMN	4,4220	4,8390	4,9274	4,4946	3,7855	4,4937
10	BJBR	10,2790	9,0644	9,0187	9,8062	8,9950	9,4327
11	BJTM	4,3056	4,7787	5,5873	5,7991	4,9689	5,0879
12	BMRI	7,3904	7,2565	7,1553	6,6161	5,7726	6,8382
13	BNBA	5,6670	6,1681	7,5618	4,3225	4,4919	5,6423
14	BNGA	7,7150	7,4548	7,1962	7,3283	6,0619	7,1512

Lanjutan Tabel 13

No	Kode Perusahaan	DER (Rasio)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
15	BNII	10,9755	10,3267	8,7828	9,3838	7,6485	9,4235
16	BSIM	7,2996	5,3347	5,7267	6,5945	5,9686	6,1848
17	BTPN	6,6404	6,0313	5,0370	4,6003	4,3312	5,3280
18	BVIC	8,7692	10,6559	10,4752	9,4771	8,4435	9,5642
19	INPC	9,6119	7,1918	7,7190	8,0822	4,9262	7,5062
20	MAYA	8,3006	8,9554	11,6825	9,3129	7,6254	9,1754
21	MCOR	7,5954	6,6467	7,0069	6,1365	4,1154	6,3002
22	MEGA	9,0414	9,8647	8,5804	4,9238	4,7503	7,4321
23	NISP	7,8412	6,2017	5,9001	6,3413	6,0846	6,4738
	Nilai Tertinggi	12,1465	10,6559	11,6825	11,5235	10,1951	
	Nilai Terendah	4,3056	4,7787	4,9274	3,2089	3,7855	
	Rata-rata	8,1836	7,5011	7,5883	7,1183	6,2896	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 13 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata tertinggi DER dimiliki perusahaan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) selama lima tahun pada periode 2012-2016 sebesar 10,8977. Hasil ini menunjukkan total ekuitas atau total modal yang dimiliki oleh perusahaan berbanding jauh lebih rendah dari total utang yang dimiliki perusahaan. Dapat dikatakan jumlah total utang yang dimiliki perusahaan perbankan untuk pembiayaan lebih tinggi daripada total modal atau total ekuitas yang dihasilkan. PT Bank Danamon Tbk (BDMN) memiliki nilai rata-rata terendah DER sebesar 4,4937. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata tertinggi perusahaan sampel perbankan yang menandakan bahwa total ekuitas atau total modal yang dimiliki oleh Bank Danamon sebagian besar dibiayai oleh pinjaman atau utang. Berdasarkan hasil dari pengukuran DAR maupun DER tingkat utang yang jauh lebih tinggi

merupakan suatu kewajaran dikarenakan utang yang diperoleh oleh perbankan sebagian besar dari dana pihak ketiga.

g. Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah rasio profitabilitas yang digunakan sebagai pengukuran kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan aktiva secara keseluruhan untuk menghasilkan laba. Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang dimanfaatkan sebagai kelangsungan hidup perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan (Syamsuddin, 2011:63).

Berikut disajikan deskripsi dari variabel *Return On Assest* (ROA) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 14 di bawah ini :

Tabel 14 Nilai *Return On Assets* Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016 dalam (%)

No	Kode Perusahaan	ROA (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	2,5480	2,7492	2,6375	2,6492	2,4831	2,6134
2	BACA	1,2076	1,4579	1,2067	1,1176	0,9559	1,1891
3	BBCA	3,5607	3,7934	3,9555	3,9514	4,0656	3,8653
4	BBKP	1,7243	1,7664	1,3078	1,3594	1,3587	1,5033
5	BBNI	2,8147	3,1330	3,3675	2,4787	2,5733	2,8734
6	BBNP	1,5577	1,5598	1,3411	0,9624	0,2020	1,1246
7	BBRI	4,7037	4,8063	4,4216	3,8675	3,6103	4,2819
8	BBTN	1,8551	1,7625	1,1229	1,6068	1,7255	1,6146
9	BDMN	3,6857	3,2528	1,8705	1,7102	2,4261	2,5891
10	BJBR	2,4144	2,4723	1,9599	2,1472	1,5328	2,1053
11	BJTM	3,7115	3,7115	3,8732	3,1218	2,3958	3,3628
12	BMRI	3,4533	3,5160	3,2753	2,9879	1,9061	3,0277
13	BNBA	2,4033	2,0946	1,5330	1,3247	1,5558	1,7823
14	BNGA	3,1778	2,8020	1,3104	0,4835	1,0719	1,7691
15	BNII	1,6098	1,7043	0,6763	1,0268	1,6100	1,3254
16	BSIM	1,7949	1,7552	1,0380	0,9728	1,6716	1,4465
17	BTPN	4,7007	4,4563	3,4871	3,1176	3,0213	3,7566

Lanjutan Tabel 14

No	Kode Perusahaan	ROA (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
18	BVIC	1,9315	1,9697	0,5996	0,4214	0,3771	1,0599
19	INPC	0,7035	1,4061	0,8067	0,3469	0,3601	0,7247
20	MAYA	2,3318	2,4750	1,9283	2,1040	2,0106	2,1699
21	MCOR	1,9774	1,6473	0,8079	0,9721	0,7110	1,2231
22	MEGA	2,4637	0,9606	1,0486	1,8369	2,2275	1,7075
23	NISP	1,7589	1,7319	1,7712	1,7903	1,8178	1,7740
	Nilai Tertinggi	4,7037	4,8063	4,4216	3,9514	4,0656	4,3897
	Nilai Terendah	0,7035	0,9606	0,5996	0,3469	0,2020	
	Rata-rata	2,5257	2,4776	1,9716	1,8416	1,8117	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 14 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata tertinggi ROA dimiliki perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebesar 4,2819%. Nilai rasio ROA Bank BRI selalu menjadi nilai yang tertinggi setiap tahunnya bila dibandingkan dengan rasio ROA perusahaan sampel perbankan lainnya selama lima tahun periode 2012-2016. Secara berturut-turut nilai ROA mulai tahun 2012-2016 sebesar 4,7037%; 4,8063%; 4,4216%; 3,8675% dan 3,6103%. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank BRI telah mampu memanfaatkan aktiva atau total aset perusahaannya untuk memperoleh laba. Nilai rata-rata terendah ROA dimiliki perusahaan PT Bank Arta Graha Internasional Tbk (INPC) sebesar 0,7247%. Secara keseluruhan selama lima tahun Bank Arta Graha memang memperoleh nilai ROA yang rendah bahkan kurang dari 1%, bila dibandingkan dengan sampel perusahaan perbankan lainnya, hanya pada tahun 2013 nilai ROA Bank Arta Graha mampu lebih dari 1% yaitu sebesar 1,4061%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan

Bank Arta Graha kurang mampu menggunakan aktiva atau total aset yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba.

h. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan sebagai suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE yang diperoleh maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan (Syamsuddin, 2011:64).

Berikut disajikan deskripsi dari variabel *Return On Equity* (ROE) sampel perusahaan perbankan periode 2012-2016 pada Tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15 Nilai *Return On Equity* Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016 dalam (%)

No	Kode Perusahaan	ROE (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	AGRO	9,1799	8,6761	6,8249	7,1344	6,2641	7,6159
2	BACA	7,5343	9,0114	7,9263	8,9586	7,8180	8,2497
3	BBCA	31,2718	30,7525	29,2361	27,0459	25,5404	28,7693
4	BBKP	17,8153	16,6746	11,1518	13,4336	12,7761	14,3703
5	BBNI	17,3246	19,8620	19,9244	13,1085	13,6085	16,7656
6	BBNP	13,7328	12,2818	8,8137	5,7308	0,6777	8,2474
7	BBRI	32,3630	29,6518	27,3955	24,1015	20,1801	26,7384
8	BBTN	15,4991	14,3084	9,3893	14,2014	15,8767	13,8550
9	BDMN	15,0895	13,7986	8,3092	7,3451	7,9122	10,4909
10	BJBR	20,9426	21,6292	16,2302	18,6104	13,2315	18,1288
11	BJTM	16,5684	14,7123	15,9677	14,3366	13,0989	14,9368
12	BMRI	23,1827	22,8871	21,3337	18,8577	10,7382	19,3999
13	BNBA	11,4386	10,3407	8,8856	6,2037	6,2247	8,6187
14	BNGA	20,7202	17,7020	8,6275	1,4980	6,6205	11,0336
15	BNII	13,7459	14,2265	5,2651	7,6828	11,4404	10,4721
16	BSIM	14,6067	9,6553	5,2388	5,4217	9,1003	8,8046

Lanjutan Tabel 15

No	Kode Perusahaan	ROE (%)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
17	BTPN	29,6452	24,1587	17,0156	13,4897	12,4079	19,3434
18	BVIC	15,3337	16,8683	6,2092	4,8572	4,2347	9,5006
19	INPC	8,6263	9,8460	4,2571	2,6130	2,0262	5,4737
20	MAYA	15,0051	18,0998	16,5470	17,5372	14,0920	16,2562
21	MCOR	14,3274	8,7442	4,6886	5,1163	1,1642	6,8081
22	MEGA	27,7474	8,4770	9,1660	11,3974	9,7381	13,3052
23	NISP	11,0145	9,7325	9,8551	9,3637	17,2350	11,4402
Nilai Tertinggi		32,3630	30,7525	29,2361	27,0459	25,5404	
Nilai Terendah		7,5343	8,4770	4,2571	1,4980	0,6777	
Rata-rata		17,5093	15,7433	12,0982	11,2194	10,5220	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 15 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata tertinggi ROE dimiliki perusahaan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 28,7693%. Nilai rasio ROE Bank BCA selalu menjadi nilai yang tertinggi setiap tahunnya bila dibandingkan dengan rasio ROE perusahaan sampel perbankan lainnya selama lima tahun periode 2012-2016. Secara berturut-turut nilai ROE mulai tahun 2012-2016 sebesar 31,2718%; 30,7525%; 29,2361%; 27,0459%; dan 25,5404%. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank BCA adalah bank yang paling baik dalam memanfaatkan modal yang ditanamkan oleh investor maupun modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Nilai rata-rata terendah ROE dimiliki perusahaan PT Bank Arta Graha Internasional Tbk (INPC) sebesar 5,4737%. Secara keseluruhan nilai ROE Bank Arta Graha lebih rendah bila dibandingkan dengan sampel perusahaan perbankan lainnya selama lima tahun periode 2012-2016 dan mengalami penurunan setelah tahun 2013-2016 secara berturut-turut sebesar

9,8460%; 4,2571%; 2,6130%; dan 2,0262%. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank Arta Graha dinilai kurang mampu dalam memanfaatkan efektivitas penggunaan modal yang ditanamkan investor dan dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif yang digambarkan dalam deskripsi variabel, analisis statistik inferensial yang termasuk di dalamnya terdapat uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digambarkan didalam penjelasan deskripsi variabel. Deskripsi variabel menggambarkan ringkasan mengenai variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat data, menjelaskan data dan memuat data dalam bentuk ringkasan dalam penelitian (Sugiyono, 2013:206). Pengolahan data dalam penelitian *explanatory* membutuhkan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas data yang menjadi objek penelitian dan mempermudah untuk mengetahui perhitungan data, rata-rata, dan standar deviasi.

Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah data dan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi data. Rata-rata menunjukkan kisaran nilai, sedangkan standar deviasi menunjukkan persebaran suatu data terhadap rata-rata, semakin kecil nilai

standar deviasi maka nilai data tersebar semakin dekat dengan nilai rata-ratanya, dan sebaliknya semakin besar nilai standar deviasi maka nilai data tersebar semakin jauh dengan nilai rata-ratanya. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap penelitian dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDKI	115	40,0000	80,0000	57,094559	8,8603333
DD	115	3,0000	12,0000	7,652174	2,4352797
KA	115	3,0000	8,0000	4,130435	1,3012931
KI	115	16,8177	99,9820	76,516937	22,1751623
DAR	115	,7732	1,0815	,869568	,0391938
DER	115	3,7855	12,1465	7,370077	2,1143401
ROA	115	,2020	4,8063	2,125470	1,0920525
ROE	115	,6777	32,3630	13,184677	6,7156594
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui deskripsi untuk masing-masing variabel dalam penelitian. Variabel didalam penelitian ini adalah PDKI, LnDD, LnKA, KI, DAR, DER, ROA, dan ROE. Nilai N atau jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 115 data. Jumlah data berasal dari 23 perusahaan perbankan selama lima tahun periode 2012-2016.

PDKI atau Proporsi Dewan Komisaris Independen adalah salah satu variabel independen ada dalam penelitian. Proporsi Dewan Komisaris Independen menunjukkan hasil perbandingan proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel PDKI

adalah sebesar 40,0000 dan nilai maksimum sebesar 80,0000. Nilai rata-rata PDKI sebesar 57,094559 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 8,8603333. Nilai variabel PDKI memiliki persebaran yang cukup baik karena selisih antara nilai rata-rata dan nilai standar deviasi yang cukup jauh. Berdasarkan nilai rata-rata variabel PDKI dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel penelitian memiliki proporsi dewan komisaris lebih dari 30% dan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau yang sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai presentase jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan.

DD atau Dewan Direksi menunjukkan jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pada hasil statistic deskriptif ini menunjukkan jumlah anggota dewan direksi memiliki nilai minimum sebesar tiga (3) orang dalam dan nilai maksimum sebesar dua belas (12) orang. Nilai rata-rata dewan direksi adalah sebesar 7,652174 dan yang mana hasil ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan perbankan memiliki jumlah dewan direksi lebih dari tujuh orang dan telah memenuhi peraturan OJK. Menurut peraturan OJK perusahaan perbankan minimal memiliki tiga orang dewan direksi. Nilai standar deviasi dewan direksi sebesar 2,4352797 menunjukkan variabel DD memiliki persebaran cukup baik.

KA atau Komite Audit menunjukkan jumlah komite audit yang bertugas mengaudit laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Tabel 16 variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar tiga (3) orang dan nilai maksimum sebesar delapan (8) orang dalam bentuk asli. Nilai rata-rata variabel

KA adalah sebesar 4,130435 yang menjelaskan bahwa rata-rata komite audit dalam perusahaan perbankan berjumlah empat orang dan jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan dari Bapepam yang sekarang menjadi OJK. Nilai standar deviasi variabel KA sebesar 1,3012931 menunjukkan bahwa variabel KA memiliki persebaran yang cukup baik.

KI atau presentase Kepemilikan Institusional menunjukkan tingkat kepemilikan saham institusi dalam suatu perusahaan perbankan. Berdasarkan Tabel 18 variabel KI memiliki nilai minimum sebesar 16,8177% dan nilai maksimum sebesar 99,9820%. Nilai rata-rata variabel KI sebesar 76,516937% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 22,1751623%. Hasil nilai rata-rata variabel KI menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan perbankan memiliki porsi yang besar melebihi 50% dan variabel KI memiliki persebaran yang cukup baik.

DAR atau *Debt to Asset Ratio* adalah salah satu bentuk rasio *leverage* yang menggunakan total aset sebagai pembiayaan. Tabel 18 menunjukkan nilai minimum variabel DAR sebesar 0,7732 dan nilai maksimum sebesar 1,0815. Nilai rata-rata variabel DAR sebesar 0,869568 atau (86,95%) sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,391938 atau (39,19%). Berdasarkan nilai rata-rata tersebut merupakan nilai yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa hutang yang digunakan oleh perusahaan perbankan lebih besar untuk menambah aset perusahaan dan berdasarkan nilai standar deviasi variabel DAR memiliki persebaran yang cukup baik.

DER atau *Debt to Equity Ratio* adalah bentuk rasio *leverage* lainnya. Tabel 18 menunjukkan nilai minimum variabel DER sebesar 3,7855 dan nilai maksimum sebesar 12,1465. Nilai rata-rata variabel DER sebesar 7,370077 atau (737%) sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,1143401 atau (211,43%). Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat diketahui merupakan nilai yang tinggi dan menunjukkan bahwa hutang yang digunakan sebagai sumber modal lebih besar dibandingkan dengan modal yang ditanamkan investor dalam perusahaan perbankan dan berdasarkan nilai standar deviasi variabel DAR memiliki persebaran yang cukup baik.

Return On Asset (ROA) adalah salah satu variabel dependen sebagai rasio pengukur profitabilitas dalam penelitian. ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,2020% dan nilai maksimum sebesar 4,8063%. Nilai rata-rata ROA adalah sebesar 2,12547% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,09205% . Nilai standar deviasi variabel ROA hampir menyamai nilai rata-rata, hasil ini menunjukkan bahwa nilai ROA memiliki persebaran yang tinggi dan baik. Semakin besar nilai rasio ROA maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menggunakan asset yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam menghasilkan laba.

Return On Equity (ROE) adalah variabel dependen lainnya yang digunakan dalam penelitian sebagai rasio pengukur laba. ROE memiliki nilai minimum sebesar 0,6777% dan nilai maksimum sebesar 32,3630%. Nilai rata-rata ROE sebesar 13,18477% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 6,71565%. Nilai standar deviasi variabel ROE menunjukkan bahwa nilai ROE

memiliki persebaran yang cukup baik. Semakin besar nilai rasio ROE maka perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba dan pengembalian dengan modal sendiri yang dimiliki dengan bijak.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis Statistik Inferensial digambarkan sebagai metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel yang digunakan untuk penggeneralisasian pada populasi. Penggunaan statistik inferensial didasarkan pada peluang (*probability*) dan sampel yang dipilih secara acak (Sugiyono, 2013:207). Penelitian ini pada analisis statistik inferensial digambarkan melalui uji asumsi klasik, uji analisis linier berganda, dan pengujian hipotesis.

a. Uji Asumsi Klasik

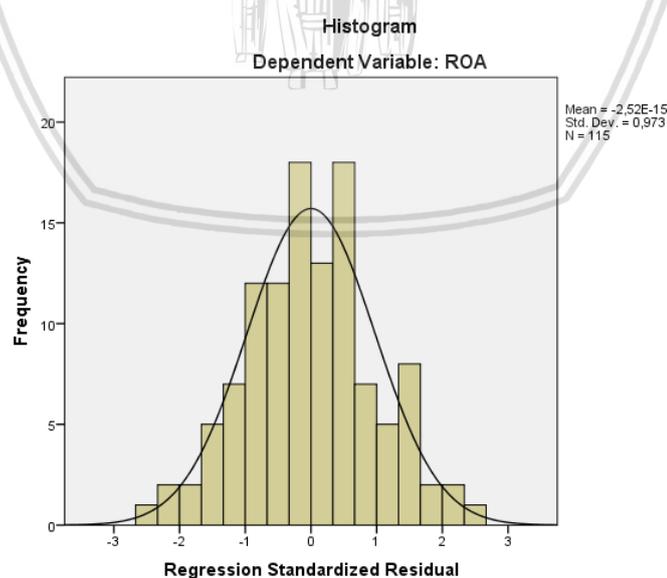
Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi persyaratan lolos uji asumsi klasik. Persyaratan yang harus ditempuh untuk lolos uji asumsi klasik diantaranya harus lolos uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, dan uji autokorelasi. Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel dependen, sehingga model regresi penelitian ini juga ada dua macam. Model regresi pertama adalah model regresi untuk variabel dependen *Return On Asset* (ROA) dan model regresi kedua adalah model regresi untuk variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) yaitu: Dewan Komisaris

Independen (DKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusi (KI), Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Debt to Asset Ratio (DAR).

1) Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi 1 ($Y_1=ROA$)

a) Uji Normalitas

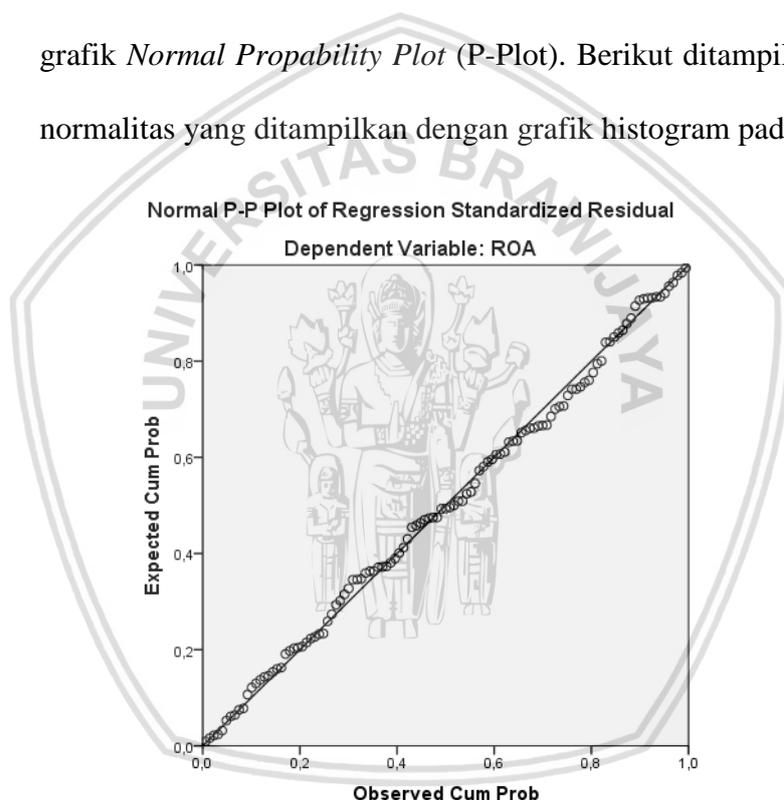
Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan di dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram, grafik normal propability plot (P-Plot) dan analisis statistik uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada cara pengujian uji normalitas pertama menggunakan grafik histogram, Berikut ditampilkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dengan grafik histogram pada Gambar 7.



Gambar 7. Grafik Histogram (Uji Normalitas Model Regresi 1)

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 7 grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang berbentuk lonceng dan melenceng ke kanan. Jika grafik berbentuk seperti lonceng maka dapat dikatakan data variabel terdistribusi normal. Pola tersebut menunjukkan data yang diteliti terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam pengujian model selanjutnya. Pengujian uji normalitas kedua dengan melihat grafik *Normal Propability Plot* (P-Plot). Berikut ditampilkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dengan grafik histogram pada Gambar 8.



Gambar 8 Grafik *Normal Probability Plot* (Uji Normalitas Model Regresi 1). Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau

tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dianggap tidak normal. Pengujian uji normalitas ketiga dilakukan untuk lebih meyakinkan atas hasil dua grafik diatas. Pengujian uji normalitas ketiga dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) seperti dijelaskan pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji Normalitas Model Regresi 1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91316058
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,035
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* apabila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 19, hasil pengujian menunjukkan probabilitas sebesar 0,200 yang berarti dapat disimpulkan nilai residual data terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan membuktikan apakah terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Multikolinieritas dapat terdeteksi dengan melihat reaksi atau gejala dalam perhitungan statistik, yaitu jika nilai *tolerance* lebih besar $\geq 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari atau sama dengan ≤ 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Berikut ditampilkan hasil pengujian uji multikolinieritas pada Tabel 18 :

Tabel 18 Hasil Uji Multikolinieritas (Model Regresi 1)
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDKI	,751	1,332
	LnDD	,713	1,403
	LnKA	,672	1,488
	KI	,750	1,333
	DAR	,301	3,327
	DER	,291	3,434

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018.

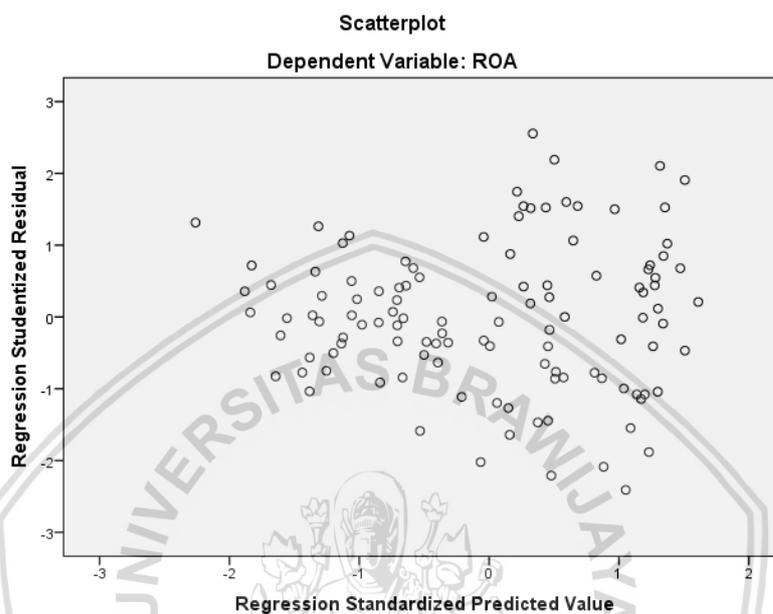
Berdasarkan Tabel 18, dapat diketahui nilai *tolerance* dan VIF pada masing-masing variabel independen. Nilai *tolerance* variabel PDKI sebesar 0,751; variabel LnDD sebesar 0,713; variabel LnKA sebesar 0,672; variabel KI sebesar 0,750; variabel DAR sebesar 0,301;

dan untuk variabel DER sebesar 0,291. Nilai VIF variabel PDKI sebesar 1,332; variabel LnDD sebesar 1,403; variabel LnKA sebesar 1,488; variabel KI sebesar 1,333; variabel DAR sebesar 3,327; dan nilai VIF variabel DER sebesar 3,434. Nilai *tolerance* keenam variabel independen masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0,1, sedangkan untuk nilai VIF keenam variabel independen masing-masing memiliki nilai lebih kecil atau tidak melebihi 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian model regresi 1 ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi kesamaan (bersifat homogen) atau terdapat ketidaksamaan (bersifat heterogen) variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila data bersifat heterogen, maka model regresi tidak mampu meramalkan dengan akurat dikarenakan memiliki nilai residual yang tidak teratur. Jika terdapat pola khusus seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur maka menunjukkan terjadinya heteroskedastitas. Jika tidak terdapat pola khusus yang teratur, dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastitas. Analisis uji heteroskedastitas melalui grafik *Scatter Plot* yang dari nilai ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dan nilai SRESID (nilai

residual, sumbu Y) seperti dijelaskan pada Gambar 9 berikut di bawah ini :



Gambar 9 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot (Model Regresi 1)

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 9 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Model Regresi 1 ini.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar variabel antara kesalahan pengganggu periode t (periode tertentu) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (periode sebelumnya)

(Ghozali, 2016: 107). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Durbin Watson* dan *Run-Test*. Pengujian pertama menggunakan *Durbin Watson* yang dijelaskan pada Tabel 19 Model Regresi 1 di bawah ini :

Tabel 19 Uji *Durbin Watson* (Model Regresi 1)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,332	,294	,77043	2,045

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 19, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (d) adalah sebesar 2,045. Syarat model regresi yang baik adalah tidak mengalami masalah autokorelasi, jika $du < d < 4-du$. Penelitian ini diketahui nilai dL dan dU dengan $k^2 = 6$ dan $n = 115$, dapat dilihat pada tabel *Durbin Watson* (t-tabel) nilai dL yaitu sebesar 1,5878 dan nilai dU sebesar 1,8068. Berdasarkan hasil uji *Durbin Watson*, maka diperoleh hasil $1,8068 (dU) < 2,045 (d) < 2,1932 (4-dU)$. Hasil ini menunjukkan nilai DW (d) terletak diantara dU dan 4-dU yang dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 pada penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Pengujian kedua pada uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Run-Test*.

Pengujian keda menggunakan *Run-Test* dijelaskan pada Tabel 20 Model Regresi 1 di bawah ini.

Tabel 20 Hasil Uji *Run Test* (Model Regresi 1)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,06160
Cases < Test Value	57
Cases >= Test Value	57
Total Cases	115
Number of Runs	56
Z	-,376
Asymp. Sig. (2-tailed)	,707

a. Median

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

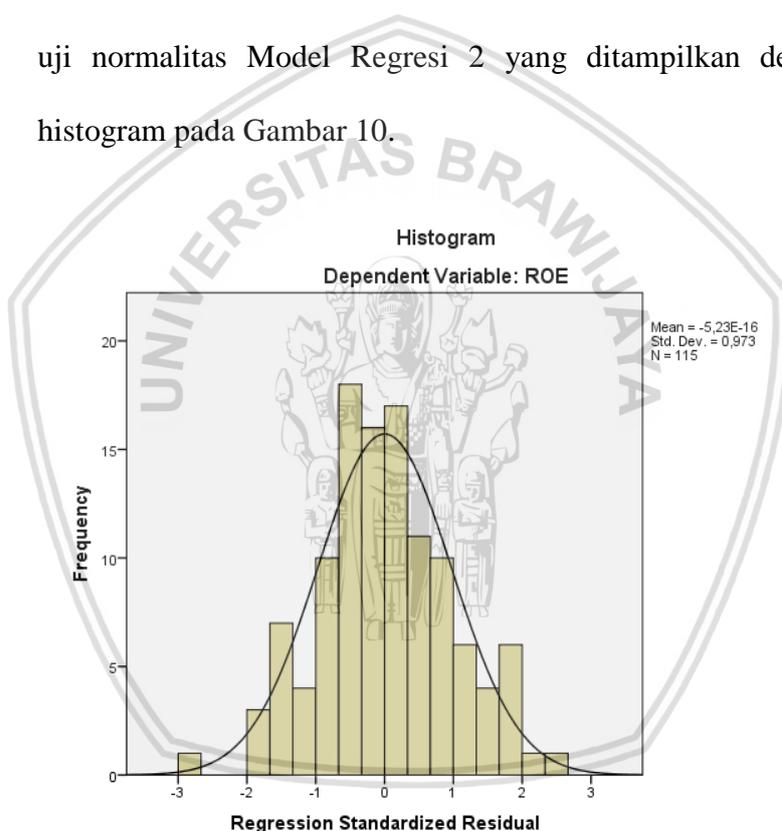
Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa nilai test $-0,06160$ dengan probabilitas $0,707$ signifikan pada $0,05$ yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Berdasarkan hasil dari kedua jenis pengujian autokorelasi diatas maka dapat disimpulkan penelitian model regresi 1 ini lolos uji autokorelasi.

2) Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi 2 ($Y_2 = \text{ROE}$)

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan di dalam penelitian terdistribusi normal

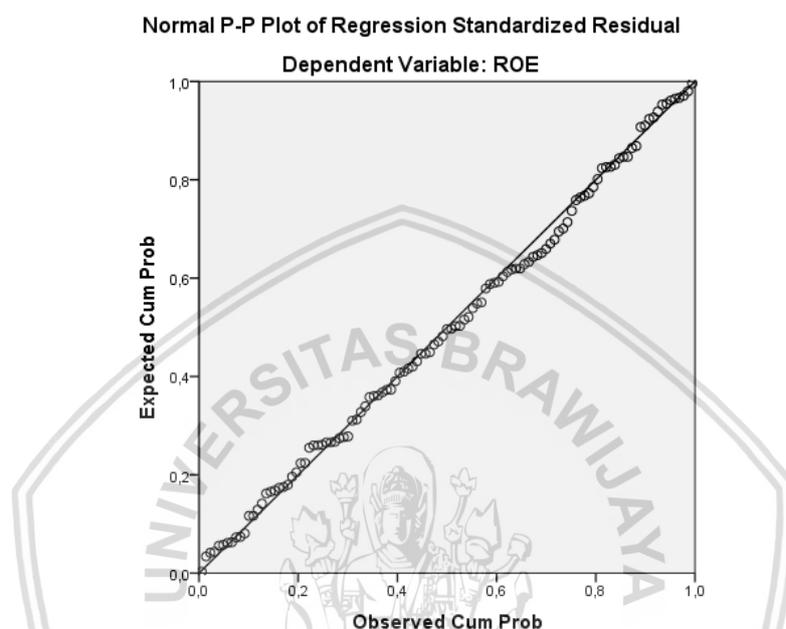
atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram, grafik *Normal Propability Plot* (P-Plot) dan analisis statistik uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada cara pengujian uji normalitas pertama menggunakan grafik histogram, jika grafik berbentuk seperti lonceng maka dapat dikatakan data variabel terdistribusi normal. Berikut ditampilkan hasil uji normalitas Model Regresi 2 yang ditampilkan dengan grafik histogram pada Gambar 10.



Gambar 10. Grafik Histogram (Uji Normalitas Model Regresi 2)
Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 10 grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang berbentuk lonceng dan melenceng ke kanan. Pola tersebut menunjukkan data yang diteliti pada model regresi 2 ini terdistribusi secara normal. Pengujian uji normalitas kedua dengan

melihat grafik *Normal Propability Plot* (P-Plot). Berikut ditampilkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dengan grafik histogram pada Gambar 11 berikut:



Gambar 11 Grafik *Normal Probability Plot* (Uji Normalitas Model Regresi 2). Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dianggap tidak normal. Pengujian uji normalitas ketiga dilakukan untuk lebih meyakinkan atas hasil dua grafik diatas, maka dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) seperti dijelaskan pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji Normalitas Model Regresi 2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,59304633
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,033
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* apabila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 21, hasil pengujian menunjukkan probabilitas sebesar 0,200 yang berarti dapat disimpulkan nilai residual data terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan membuktikan apakah terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Multikolinieritas dapat terdeteksi dengan melihat

reaksi atau gejala dalam perhitungan statistik, yaitu jika nilai *tolerance* lebih besar $\geq 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari atau sama dengan ≤ 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Berikut ditampilkan hasil pengujian uji multikolinieritas pada Tabel 22:

Tabel 22 Hasil Uji Multikolinieritas (Model Regresi 2)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDKI	,751	1,332
	LnDD	,713	1,403
	LnKA	,672	1,488
	KI	,750	1,333
	DAR	,301	3,327
	DER	,291	3,434

a. Dependent Variable: ROE

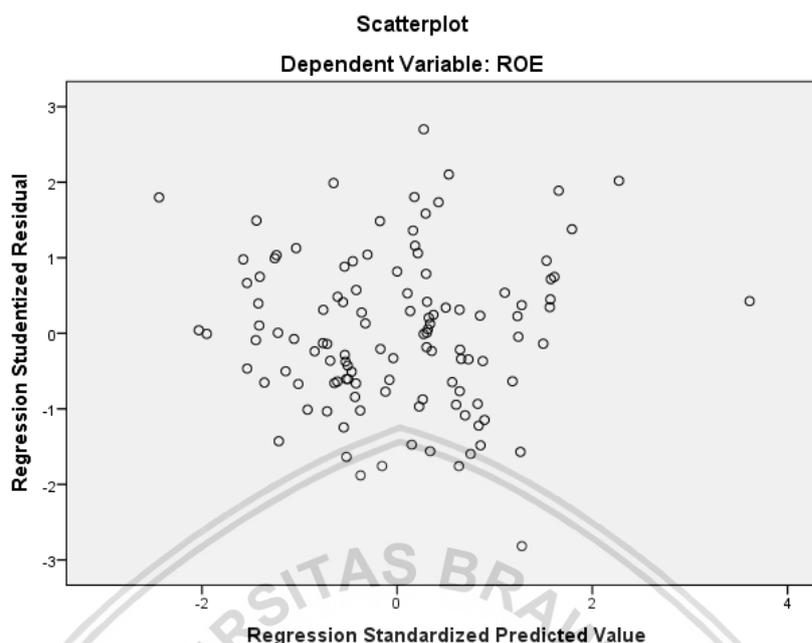
Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 22, dapat diketahui nilai *tolerance* dan VIF pada masing-masing variabel independen. Nilai *tolerance* variabel PDKI sebesar 0,751; variabel LnDD sebesar 0,713; variabel LnKA sebesar 0,672; variabel KI sebesar 0,750; variabel DAR sebesar 0,301; dan untuk variabel DER sebesar 0,291. Nilai VIF variabel PDKI sebesar 1,332; variabel DD sebesar 1,403; variabel KA sebesar 1,488; variabel KI sebesar 1,333; variabel DAR sebesar 3,327; dan nilai VIF variabel DER sebesar 3,434. Nilai *tolerance* keenam variabel independen masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0,1, sedangkan untuk nilai VIF

keenam variabel independen masing-masing memiliki nilai lebih kecil atau tidak melebihi 10. Hasil uji multikolinieritas Model Regresi 2 memperoleh nilai yang sama dengan uji multikolinieritas Model Regresi 1 karena kedua model regresi memiliki variabel independen yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian model regresi 2 ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi kesamaan (bersifat homogen) atau terdapat ketidaksamaan (bersifat heterogen) variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila data bersifat heterogen, maka model regresi tidak mampu meramalkan dengan akurat dikarenakan memiliki nilai residual yang tidak teratur. Jika terdapat pola khusus seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur maka menunjukkan terjadinya heteroskedastitas. Jika tidak terdapat pola khusus yang teratur, dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastitas. Analisis uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatter plot* yang dari nilai ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dan nilai SRESID (nilai residual, sumbu Y) seperti dijelaskan pada Gambar 12 berikut:



Gambar 12 Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot* (Model Regresi 2)

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 12 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Model Regresi 2.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar variabel antara kesalahan pengganggu periode t (periode tertentu) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (periode sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Durbin*

Watson dan *Run-Test*. Pengujian pertama menggunakan *Durbin Watson* yang dijelaskan pada tabel 23 Model Regresi 2 dibawah ini.

Tabel 23 Hasil Uji *Durbin Watson* (Model Regresi 2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684 ^a	,468	,438	4,91224	2,063

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 23, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (d) adalah sebesar 2,063. Syarat model regresi yang baik adalah tidak mengalami masalah autokorelasi, jika $du < d < 4-du$. Penelitian ini diketahui nilai dL dan dU dengan $k' = 6$ dan $n = 115$, dapat dilihat pada tabel *Durbin Watson* (t-tabel) nilai dL yaitu sebesar 1,5878 dan nilai dU sebesar 1,8068. Berdasarkan hasil uji *Durbin Watson*, maka diperoleh hasil $1,8068 (dU) < 2,063 (d) < 2,1932 (4-dU)$. Hasil ini menunjukkan nilai DW (d) terletak diantara dU dan 4-dU yang dapat disimpulkan bahwa Model Regresi 2 pada penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Pengujian kedua pada uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Run-Test*. Pengujian kedua menggunakan *Run-Test* dijelaskan pada Tabel 24 Model Regresi 2 berikut:

Tabel 24 Hasil Uji *Run Test* (Model Regresi 2)

Runs Test	
	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	,01655
Cases < Test Value	57
Cases >= Test Value	57
Total Cases	115
Number of Runs	63
Z	,941
Asymp. Sig. (2-tailed)	,347

a. Median

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 24 diketahui bahwa nilai test 0,01655 dengan probabilitas 0,347 signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Berdasarkan hasil dari kedua jenis pengujian autokorelasi diatas maka dapat disimpulkan penelitian Model Regresi 2 ini lolos uji autokorelasi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen mengetahui besarnya nilai dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam periode penelitian tersebut. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam model regresi. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh

Corporate Governance yang diproksikan dengan variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), struktur modal yang diproksikan dengan variabel independen *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap variabel dependen *Return On Assets* (ROA) untuk Model Regresi 1 dan variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE) untuk model regresi 2.

1) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1 ($Y_1 = \text{ROA}$)

Berikut disajikan hasil regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 25 berikut:

Tabel 25 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,575	3,469		-1,319	,190
	PDKI	,011	,012	,086	,911	,364
	LnDD	1,104	,302	,354	3,661	,000
	LnKA	-,208	,366	-,056	-,568	,571
	KI	,012	,005	,236	2,511	,014
	DAR	5,909	4,145	,212	1,426	,157
	DER	-,248	,078	-,481	-3,181	,002

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 25, secara sistematis hasil analisis regresi linier berganda model regresi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persamaan dari regresi linier berganda Model Regresi 1 adalah sebagai berikut:

$$ROA = -4,575 + 0,011 \text{ PDKI} + 1,104 \text{ LnDD} - 0,208 \text{ LnKA} + 0,012 \text{ KI} + 5,909 \text{ DAR} - 0,248 \text{ DER} + e$$

Berikut interpretasi dari hasil persamaan untuk Model Regresi 1:

1. α = nilai konstanta sebesar -4,575

Nilai konstanta persamaan ini bersifat negatif, nilai konstanta yang bersifat negatif menunjukkan bahwa variabel dependen *Y Return On Assets* (ROA) akan berkurang secara konstan jika variabel lainnya yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* bernilai nol (0). Nilai α menunjukkan apabila tidak ada variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maka nilai *Return On Asset* (ROA) sebesar 4,575%

2. $\beta_1 X_1 = 0,011 \text{ PDKI}$

Nilai koefisien regresi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah sebesar 0,011. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Assets* (ROA) akan naik sebesar 0,011, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap *Return On Asset* (ROA). Semakin besar nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka nilai ROA semakin tinggi.

3. $\beta_2 X_2 = 1,104 \text{ LnDD}$

Nilai koefisien regresi variabel Dewan Direksi (DD) adalah sebesar 1,104. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Dewan Direksi (DD) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Return On Assets* (ROA) akan naik sebesar 1,104, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Dewan Direksi (DD) terhadap *Return On Assets* (ROA). Semakin besar nilai Dewan Direksi, maka nilai ROA semakin tinggi.

4. $\beta_3 X_3 = -0,208 \text{ LnKA}$

Nilai koefisien variabel Komite Audit (KA) adalah sebesar -0,208. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Komite Audit (KA) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Return On Asset* (ROA) akan turun sebesar 0,208%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa terjadi pengaruh negatif antara Komite Audit (KA)

terhadap *Return On Assets* (ROA). Semakin besar nilai Komite Audit, maka nilai ROA semakin rendah.

5. $\beta_4 X_4 = 0,012$ KI

Nilai koefisien variabel Kepemilikan Institusional (KI) adalah sebesar 0,012. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Assets* (ROA) akan naik sebesar 0,012%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Kepemilikan Institusi (KI) terhadap *Return On Assets* (ROA). Semakin besar nilai kepemilikan institusi, maka nilai ROA semakin tinggi.

6. $\beta_5 X_5 = 5,909$ DAR

Nilai koefisien variabel *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebesar 5,909. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila *Debt to Asset Ratio* mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Asset* (ROA) akan naik sebesar 5,909%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara *Debt to Asset Ratio* (DAR) terhadap *Return On Asset* (ROA). Semakin besar nilai *Debt to Asset Ratio* (DAR), maka nilai ROA semakin tinggi.

7. $\beta_6 X_6 = -0,248$ DER

Nilai koefisien variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebesar -0,248. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila *Debt to Equity Ratio*

mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Assets* (ROA) akan turun sebesar 0,248%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa terjadi pengaruh negatif antara *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Return On Asset* (ROA). Semakin besar nilai *Debt to Equity Ratio* (DER), maka nilai ROA semakin rendah

2) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2 ($Y_2 = \text{ROE}$)

Berikut disajikan hasil regresi linier berganda pada Tabel 26:

Tabel 26 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-69,428	21,373		-3,248	,002
	PDKI	,135	,071	,178	1,893	,061
	LnDD	8,302	1,858	,432	4,468	,000
	LnKA	,063	2,257	,003	,028	,978
	KI	,062	,029	,206	2,185	,031
	DAR	66,485	25,533	,388	2,604	,011
	DER	-,572	,481	-,180	-1,189	,237

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 26, secara sistematis hasil analisis regresi linier berganda model regresi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Berdasarkan rumus perhitungan, maka persamaan dari regresi linier berganda Model Regresi 2 adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = -69,428 + 0,135 \text{ PDKI} + 8,302 \text{ Ln DD} + 0,063 \text{ Ln KA} + 0,062 \text{ KI} + 66,485 \text{ DAR} - 0,572 \text{ DER} + e$$

Berikut interpretasi dari hasil persamaan untuk Model Regresi 2:

1. α = nilai konstanta sebesar -69,428

Nilai konstanta persamaan ini bersifat negatif, nilai konstanta yang bersifat negatif menunjukkan bahwa variabel dependen *Y Return On Equity* (ROE) akan berkurang secara konstan jika variabel lainnya yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) bernilai nol (0). Nilai α menunjukkan apabila tidak ada variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maka nilai ROE sebesar 69,428%.

2. $\beta_1 X_1 = 0,135 \text{ DK}$

Nilai koefisien regresi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah sebesar 0,135. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan naik sebesar 0,135%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif

yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka nilai ROE semakin tinggi.

3. $\beta_2 X_2 = 8,302 \text{ LnDD}$

Nilai koefisien regresi variabel Dewan Direksi (DD) adalah sebesar 8,302. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Dewan Direksi (DD) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan naik sebesar 8,302%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Dewan Direksi (DD) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai Dewan Direksi, maka nilai ROE semakin tinggi.

4. $\beta_3 X_3 = 0,063 \text{ KA}$

Nilai koefisien variabel Komite Audit (KA) adalah sebesar 0,063. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Komite Audit (KA) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan naik sebesar 0,063%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa terjadi pengaruh negatif antara Komite Audit (KA) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai Komite Audit, maka nilai ROE semakin tinggi.

5. $\beta_4 X_4 = 0,062$ KI

Nilai koefisien variabel Kepemilikan Institusional (KI) adalah sebesar 0,062. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan naik sebesar 0,062%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Kepemilikan Institusi (KI) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai kepemilikan institusi, maka nilai ROE semakin tinggi.

6. $\beta_5 X_5 = 66,485$ DAR

Nilai koefisien variabel *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebesar 66,485. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila *Debt to Asset Ratio* mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan naik sebesar 66,485%, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara *Debt to Asset Ratio* (DAR) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai *Debt to Asset Ratio*, maka nilai ROE semakin tinggi.

7. $\beta_6 X_6 = -0,572$ DER

Nilai koefisien variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebesar -0,572. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila *Debt to Equity Ratio* mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Return On Equity* (ROE) akan turun sebesar 0,572%, dengan asumsi bahwa

variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa terjadi pengaruh negatif antara *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Return On Equity*. Semakin besar nilai *Debt to Equity Ratio*, maka nilai ROE semakin rendah.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah untuk memutuskan apakah hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah dua untuk masing-masing model regresi 1 dan 2. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 1 ($Y_1 = ROA$)

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (*adjusted R²*). Pemakaian nilai *Adjusted R square* (*adjusted R²*) dapat mengevaluasi model regresi terbaik karena *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi bernilai 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel independen mampu menerangkan variabel bebas semakin baik. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27 Koefisien Determinasi Model Regresi 1**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,332	,294	,77043	2,045

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (adjusted R²) sebesar 0,294 atau 29,4%, hasil menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh 29,4% terhadap *Return On Asset*, sedangkan sisanya sebesar 70,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk didalam model yang tidak masuk model dalam penelitian ini.

b) Uji Statistik F Model Regresi 1 (Y₁ = ROA)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji signifikansi dari koefisien determinasi yang menggambarkan adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji F dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan apabila hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebelumnya, mencari nilai F_{tabel} terlebih dahulu dengan rumus $F_{tabel} = k ; n-k$ (6 ; 115-6) maka $F_{tabel} = 6 ; 109$, sehingga dapat

dilihat pada tabel F nilai dari 6 ; 109 adalah sebesar 2,18. Berikut adalah hasil uji F Model Regresi 1 yang dijelaskan pada Tabel 28 di bawah ini :

Tabel 28 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38,292	6	6,382	7,058	,000 ^b
	Residual	97,662	108	,904		
	Total	135,954	114			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), DER, KI, LnDD, PDKI, LnKA, DAR

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 28, diperoleh hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 7,058 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} untuk penelitian ini adalah sebesar 2,18 sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi hasil uji $F < 0,05$. Hasil ini menerangkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dalam uji hipotesis ini dapat dinyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* diterima.

c) Uji Statistik t Model Regresi 1 ($Y_1 = ROA$)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (variabel independen) secara individual

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sebelumnya mencari nilai t_{tabel} dengan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 115 - 6 - 1) = t(0,025 ; 108) = 1,982$. Berikut adalah hasil uji t model regresi 1 yang dijelaskan pada Tabel 29 :

Tabel 29 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,575	3,469		-1,319	,190
	PDKI	,011	,012	,086	,911	,364
	LnDD	1,104	,302	,354	3,661	,000
	LnKA	-,208	,366	-,056	-,568	,571
	KI	,012	,005	,236	2,511	,014
	DAR	5,909	4,145	,212	1,426	,157
	DER	-,248	,078	-,481	-3,181	,002

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 29, dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) yaitu Dewan Direksi, Kepemilikan Institusi, dan *Debt to Equity*

Ratio (DER). Sementara tiga variabel independen lainnya berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

Berikut ini akan dijelaskan pembahasan lebih rinci hasil pengujian masing-masing variabel independen secara parsial:

(1) Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Pengujian variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,911 < 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,364 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) ditolak.

(2) Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Return On Asset* (ROA).

Pengujian variabel Dewan Direksi terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,661 > 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima.

(3) Pengaruh Komite Audit Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Pengujian variabel Komite Audit terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} (nilai t_{hitung} dimutlakkan) lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,568 < 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,571 > 0,05$ yang berarti

bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) ditolak.

(4) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Pengujian variabel Kepemilikan Institusional terhadap *Return On Asset* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,511 > 1,982). Nilai signifikan (sig) 0,014 < 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima.

(5) Pengaruh *Debt to Asset Ratio* Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Pengujian variabel *Debt to Asset Ratio* terhadap *Return On Asset* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,426 < 1,982). Nilai signifikan (sig) 0,157 > 0,05 yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) ditolak.

(6) Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Pengujian variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Return On Assets* (ROA) menunjukkan nilai t_{hitung} (nilai t_{hitung} dimutlakkan) lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,181 > 1,982). Nilai signifikan (sig) 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan

hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima.

2) Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 2 ($Y_2 = ROE$)

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (*adjusted R²*). Pemakaian nilai *Adjusted R square* (*adjusted R²*) dapat mengevaluasi model regresi terbaik karena *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi bernilai 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel independen mampu menerangkan variabel bebas semakin baik. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30 Koefisien Determinasi Model Regresi 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684 ^a	,468	,438	4,91224	2,063

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 30 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (*adjusted R²*) sebesar 0,438 atau 43,8%, hasil menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite

Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh 43,8% terhadap *Return On Equity*, sedangkan sisanya sebesar 56,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk didalam model yang tidak masuk model dalam penelitian ini.

b) Uji Statistik F Model Regresi 2 ($Y_2 = ROE$)

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan melihat signifikansi hasil dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebelumnya, mencari nilai F_{tabel} terlebih dahulu dengan rumus $F_{tabel} = k ; n-k$ (6 ; 115-6) maka $F_{tabel} = 6 ; 109$, sehingga dapat dilihat pada tabel F nilai dari 6 ; 109 adalah sebesar 2,18. Berikut adalah hasil uji F Model Regresi 2 yang dijelaskan pada Tabel 31 :

Tabel 31 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1434,878	6	239,146	6,968	,000 ^b
	Residual	3706,531	108	34,320		
	Total	5141,409	114			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), DER, KI, LnDD, PDKI, LnKA, DAR

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 31, diperoleh hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,968 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} untuk penelitian ini adalah sebesar 2,18 sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi hasil uji $F < 0,05$. Hasil ini menerangkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dalam uji hipotesis ini dapat dinyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusi, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* diterima.

c) Uji Statistik t Model Regresi 2 ($Y_2 = ROE$)

Kriteria pengambilan keputusan pada uji t dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dan melihat signifikansi hasil dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sebelumnya mencari nilai t_{tabel} dengan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 115 - 6 - 1) = t(0,025 ; 108) = 1,982$. Berikut adalah hasil uji t Model Regresi 2 :

Tabel 32 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-69,428	21,373		-3,248	,002
	PDKI	,135	,071	,178	1,893	,061
	LnDD	8,302	1,858	,432	4,468	,000
	LnKA	,063	2,257	,003	,028	,978
	KI	,062	,029	,206	2,185	,031
	DAR	66,485	25,533	,388	2,604	,011
	DER	-,572	,481	-,180	-1,189	,237

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Tabel 32, dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) yaitu Dewan Direksi dan *Debt to Asset Ratio*. Sementara empat variabel independen lainnya berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Berikut ini akan dijelaskan pembahasan lebih rinci hasil pengujian masing-masing variabel independen secara parsial:

- (1) Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($1,893 < 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,061 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang

menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ditolak.

(2) Pengaruh Proporsi Dewan Direksi Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel Dewan Direksi terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4,468 > 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima.

(3) Pengaruh Komite Audit Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel Komite Audit terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,028 < 1,982$). Nilai signifikansi (sig) $0,978 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ditolak.

(4) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel Kepemilikan Institusional terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($2,185 > 1,982$). Nilai signifikan (sig) $0,03 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan

bahwa Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima.

(5) Pengaruh *Debt to Asset Ratio* Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel *Debt to Asset Ratio* terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,604 > 1,982$). Nilai signifikan (sig) $0,01 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima.

(6) Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Pengujian variabel *Debt to Equity Ratio* terhadap *Return On Equity* (ROE) menunjukkan nilai t_{hitung} (nilai t_{hitung} dimutlakan) lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($1,189 < 1,982$). Nilai signifikan (sig) $0,237 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ditolak.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh *Corporate Governance* dan struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. *Corporate Governance* diprosikan oleh variabel proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen sedangkan struktur modal diprosikan oleh variabel *Debt to*

Asset Ratio (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan oleh dua macam rasio yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel dependen.

1. Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil ini dapat dilihat pada tabel perhitungan anova yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $7,058 > F_{tabel}$ sebesar 2,30 atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dengan nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,000, hasil ini menerangkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen *Return On Asset* (ROA). Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) diterima.

Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa organ dari penerapan *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris

independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional apabila mampu menjalankan fungsi dan perannya masing – masing dengan baik dan terkordinasi maka akan mampu meningkatkan profitabilitas, dalam artian sistem tata kelola perusahaan yang berjalan dengan baik akan mampu mempengaruhi besar kecilnya nilai profitabilitas perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber aktiva dan sumber modal berupa utang yang dimiliki perusahaan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan operasional perusahaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan.

Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dihasilkan dari performa laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit perusahaan perbankan yang dinilai berdasarkan kebijakan penggunaan aktiva, dan hasil perolehan rasio profitabilitas tersebut akan disampaikan kepada dewan direksi yang bertugas sebagai pengelola perusahaan. Komite audit juga menyampaikan hasil laporan keuangan kepada dewan komisaris independen untuk memantau kinerja dewan direksi dalam membuat kebijakan selanjutnya berdasarkan hasil profitabilitas dari laporan keuangan tersebut. Koordinasi kinerja antara dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit kaitannya dalam menghasilkan laba dan meningkatkan kinerja keuangan dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 menyebutkan salah satu tugas Komisaris Independen adalah bertanggung

jawab melakukan fungsi pengawasan kepada para pemegang saham yang terdiri dari pemegang saham pengendali, mayoritas maupun minoritas yang diatur dalam Rapat Umum pemegang saham (RUPS). Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen menyangkut dalam pengawasan penyalahgunaan hak-hak pemegang saham, dan masalah benturan kepentingan antara dewan direksi dan anggota dewan komisaris. Fungsi pengawasan juga dilakukan kepada peran pembantu komite audit untuk melakukan pengendalian audit internal laporan keuangan berdasarkan pertimbangan dan risiko yang ada. Komite audit akan melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajer keuangan dan operasional dalam melihat seberapa jauh laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan hasil dari laporan keuangan, manajer keuangan melihat perlu tidaknya menggunakan utang sebagai pembiayaan berdasarkan kondisi struktur modal sesuai dengan aktiva dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Keputusan menggunakan utang ini dikordinasikan dengan pengelola perusahaan berdasarkan pengawasan direksi dan komite audit, sehingga pengelola perusahaan dapat melihat sejauh mana laba dapat dihasilkan. Hal inilah yang menjelaskan bahwa *corporate governance* dan struktur modal secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

Hasil penelitian ini untuk konsep *corporate governance* sejalan dengan penelitian Rimardhani (2016) dan Hisamudin dan Tirta (2012) yang keduanya menemukan bahwa secara simultan mekanisme *corporate*

governance berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Terjadinya persamaan pengaruh antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas *corporate goverance* yang diukur melalui organ didalamnya yaitu Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Penelitian ini untuk variabel bebas dari konsep struktur modal memiliki persamaan hasil dengan penelitian Sukasa (2016) yang menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Tinggi rendahnya nilai rasio utang pada komposisi struktur modal dalam penggunaan total utang pada perusahaan perbankan akan menghasilkan beban tetap yang berupa bunga yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai rasio profitabilitas dalam penggunaan aktiva dan gambaran pengembalian bagi investor.

2. Pengaruh Secara Parsial Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Return On Asset (ROA)

a. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen (PDKI) dengan nilai koefisien variabel 0,011 berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi proporsi dewan komisaris independen

pada uji t sebesar 0,364 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,364 > sig t 0,05) dengan t_{hitung} 0,911 < t_{tabel} 1,982 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa peran dewan komisaris independen dalam perusahaan perbankan belum mampu bekerja secara optimal. Pengangkatan dewan komisaris independen dianggap hanya sebagai pelengkap dari Dewan Komisaris di perusahaan perbankan, namun masih belum secara optimal melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/ 2006.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zabri (2015), Sochib (2016), dan Putra (2017). Menurut Zabri (2015) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang nantinya akan berdampak positif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). adanya monitoring dari dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga akan rawan timbul kecurangan (*fraud*) dan mengesampingkan target utama perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas dan memaksimalkan kebutuhan *stakeholder*. Hasil

penelitian Zabri (2015) didukung dengan hasil penelitian Sohib (2016) yang melakukan penelitian di perusahaan perbankan umum swasta nasional dan menyatakan bahwa adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan perbankan hanya untuk memenuhi kebutuhan pejabat di perbankan sebagai antisipasi terhadap perkembangan organisasi dan perkembangan usaha bank, tetapi tidak untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan manajemen. Sohib (2016) dalam hasil penelitiannya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/ 2006, pasal 5 menyebutkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen paling kurang 50%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pada sampel perusahaan perbankan dalam penelitian ini rata-rata proporsi dewan komisaris independen mengalami penurunan, walaupun rata-rata presentase dewan komisaris independen sudah mencukupi sebesar 50%, namun masih terdapat beberapa bank yang proporsi dewan komisaris independennya masih dibawah 50% seperti yang ditunjukkan oleh tabel 8, hasil ini yang menyebabkan peran dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsi pemberian nasihat kepada dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan perbaikan laporan keuangan terkait dengan profitabilitas perusahaan kurang efektif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan isi *agency theory* yang di dalamnya menyatakan bahwa pemisahan kewenangan dan kepentingan antara kepemilikan perusahaan dan pengelola perusahaan menimbulkan

masalah keagenan. Hal ini berdampak pada hubungan dewan komisaris independen dan dewan direksi. Kaitannya dengan hasil penelitian ini adalah menurut Sutedi (2012:146) kekuatan independensi dewan komisaris masih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan dan wewenang dewan direksi yang lebih kuat. Dewan direksi enggan membagi informasi yang mengenai hasil pengelolaan perusahaan dan kinerja perusahaan. Kedudukan direksi yang kuat ini dimungkinkan karena mewakili peran pemegang saham mayoritas yang membuat fungsi pengawasan dewan komisaris independen kepada dewan direksi menjadi melemah dan cenderung tidak berfungsi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hisamudin dan Tirta (2012) dan Rimardhani (2016) yang hasil penelitian keduanya menunjukkan proposi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset* (ROA) hal ini dikarenakan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam akan menyebabkan kemungkinan penurunan kemampuan dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dengan organ *Corporate Governance*, namun karena jumlah proporsi yang semakin banyak dan beragam maka akan memudahkan tujuan untuk pemaksimalan profitabilitas.

b. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa dewan direksi (LnDD) dengan nilai koefisien variabel 1,104 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) karena nilai signifikansi dewan direksi pada uji t sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,000 < \text{sig } t < 0,05$) dengan $t_{\text{hitung}} 3,661 > t_{\text{tabel}} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dewan direksi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah dari dewan direksi dalam perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya laba atau profitabilitas perusahaan yang diperoleh berdasarkan pengukuran rasio *Return On Assets* (ROA). Dewan Direksi pada perusahaan perbankan ini dinilai telah mampu menjalankan tugas dan perannya dalam perusahaan perbankan yang mana dewan direksi bertindak sebagai mengkoordinasikan kegiatan kinerja antar direksi dan antar manajer perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung teori *agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976) yang dijelaskan bahwa tugas *agent* atau pengelola perusahaan termasuk dewan direksi diberi kewenangan oleh *principals* atau pemilik perusahaan untuk bertugas dan bertanggungjawab penuh mengelola jalannya perusahaan. Pengelolaan perusahaan termasuk mengelola dana dan mengambil keputusan. Pengelolaan dana yang

dilakukan tidak terlepas dari hasil laporan keuangan yang didalamnya terdapat kondisi jumlah aset dan keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari *return* pengembalian yang diukur berdasarkan laba bersih dan jumlah aset. Dewan direksi bertugas untuk memaksimalkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham.

Menurut Hamdani, (2016:87) direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG 2014 tercantum bahwa tugas dewan direksi adalah melaksanakan ketentuan pengelolaan usaha bank yang tercantum dalam anggaran dasar bank sehingga dewan direksi juga harus memperhatikan berapa total aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk bisa melihat laba atau profit yang kemungkinan bisa diperoleh. Selain itu dewan direksi juga bertugas menjalankan prinsip perbankan yang sehat dan sistem pengendalian internal manajemen usaha perbankan sehingga dewan direksi dapat memonitor kinerja para manajer dalam upaya pemaksimalan laba perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hisamudin dan Tirta (2012), Purno (2013) dan Javeed (2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisamudin dan Tirta (2012) yang meneliti mekanisme *Corporate Governance* di perusahaan perbankan syariah menyatakan bahwa dewan direksi dapat

mempengaruhi profitabilitas baik diukur melalui ROA ataupun ROE karena praktik *good corporate governance* akan mendorong bank umum syariah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan institusi dan keuangan syariah sesuai *best practice* yang berlaku karena dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh manajer untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil temuan Purno (2013) dan Javeed (2015) yang menyatakan bahwa semakin banyak dewan direksi maka pembagian tugas, wewenang dan pengawasan pengelolaan perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga terfokus untuk pencapaian peningkatan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rimardhani (2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan terutama dalam penggunaan aktiva.

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa komite audit (LnKA) dengan nilai koefisien variabel -0,208 berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA) karena nilai signifikansi komite audit pada uji t sebesar 0,571 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,690 > sig t 0,05) dengan $t_{hitung} 0,568 < t_{tabel} 1,982$ sehingga hipotesis yang

menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) ditolak. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya jumlah komite audit dalam perusahaan belum dapat menjamin perolehan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA).

Hasil ini mengindikasikan bahwa komite audit dalam perusahaan perbankan belum mampu secara penuh melakukan fungsi auditing sesuai keahlian untuk melihat adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan untuk menganalisis profitabilitas yang bisa diperoleh perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purno (2013), Rimardhani (2016), dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

Menurut Rimardhani (2016) dan Putra (2017) pembentukan komite audit dalam suatu perusahaan hanya atas dasar untuk pemenuhan regulasi, dimana regulasi mensyaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit untuk membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan pada perusahaan. Menurut Purno (2013) menyatakan bahwa pemilihan anggota komite audit hanya berdasarkan kedudukan kekerabatan sehingga pemantauan terhadap dewan direksi maupun manajer kurang maksimal, dengan kata lain komite audit masih sulit bersikap independen dan objektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan peraturan Surat Edaran Bapepam Kep

643/BL/2012 dalam Herdjono dan Megasari (2017) yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas komite audit kewenangannya dibatasi oleh fungsi komite audit yang hanya sekedar untuk membantu tugas dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun terhadap pengambilan keputusan terkait dengan hasil profitabilitas perusahaan. Kewenangan komite audit hanya sebatas rekomendasi perbaikan laporan keuangan kepada dewan komisaris .

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rini dan Ghozali (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. semakin besar jumlah komite audit memungkinkan tingkat audit kualitas pelaporan keuangan yang lebih valid dan semakin baik, serta pengawasan atau monitoring terhadap manajemen semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dapat diminimalisir dengan adanya komite audit.

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dengan nilai koefisien variabel 0,012 berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) karena nilai signifikansi kepemilikan institusional pada uji t sebesar 0,014 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,014 < \text{sig } t \ 0,05$) dengan $t_{\text{hitung}} \ 2,511 > t_{\text{tabel}} \ 1,982$ sehingga hipotesis

yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima. Hasil ini tercermin dari hasil presentase kepemilikan institusional perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian rata-rata lebih dari 50% seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 13. Tingginya presentase kepemilikan institusi akan meningkatkan tanggungjawab perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas karena pihak institusi (investor) yang tergabung telah bersedia menginvestasikan sahamnya di perusahaan perbankan dengan harapan mendapatkan tingkat *return* atau pengembalian yang tinggi bagi para investor.

Mengacu pada teori agensi atau *agency theory* menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Herdjono dan Megasari, 2016) peran kepemilikan institusional mampu meminimalisir terjadinya *agency conflict* yang terjadi antara *agent* (manajer) dan *principals* (pemegang saham). Kepemilikan saham institusional dianggap mampu pengawasan yang efektif untuk setiap kegiatan investasi yang dilakukan sehingga mengurangi potensi kecurangan dan menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan yang sebenarnya dihasilkan. Hasil ini juga didukung oleh teori stakeholders atau *stakeholders theory* yang disampaikan Hamdani (2016:37) menyatakan bahwa *stakeholders* termasuk para pemegang saham mayoritas memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk ikut membuat kerangka tata kelola yang baik untuk pencapaian

stabilitas. Apabila semakin banyak pemegang saham mayoritas institusi maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hisamudin dan Tirta (2012), Rimardhani (2016) dan Putra (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Menurut Rimardhani (2016) semakin tinggi kepemilikan institusional akan mampu memonitor perusahaan untuk lebih meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional mayoritas menyebabkan pengambilan keputusan, pemegang saham mayoritas lebih dominan memiliki kendali kuat dalam perusahaan. Menurut Putra (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap entitas bisnis, karena pihak institusi memiliki kepentingan terhadap investasi yang ditanamkannya. Dengan demikian akan terjadi pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan manajemen yang nantinya meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rini dan Ghozali (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pihak institusi dinilai masih lemah dalam melakukan upaya kontrol dan monitoring terhadap manajemen sebagai pihak yang mengelola investasi pada perusahaan, sehingga manajemen lebih leluasa dalam meningkatkan kepentingan pribadinya.

e. Pengaruh *Debt to Asset Ratio* Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa *Debt To Asset Ratio* (DAR) dengan nilai koefisien variabel 5,909 berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) karena nilai signifikansi *Debt To Asset Ratio* (DAR) pada uji t sebesar 0,157 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,157 > sig t 0,05$) dengan $t_{hitung} 1,426 < t_{tabel} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt To Asset Ratio* (DAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) ditolak. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *Debt To Asset Ratios* (DAR) tidak menentukan perolehan tingkat *Return On Assets* (ROA) yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori pendekatan laba bersih yang dikemukakan oleh Sudana (2009:144) bahwa semakin banyak tingkat utang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai dan laba perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Hanafi (2010:313) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Innocent (2014) dan Sukasa (2016) yang menunjukkan bahwa *Debt To Asset Ratio* (DAR)

berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hasil penelitian menurut Innocent yang meneliti pengaruh struktur modal yang diukur menggunakan rasio DAR dan DER terhadap ROA. Menurut Innocent (2014) yang melakukan penelitian pada perusahaan farmasi di Nigeria menyatakan tinggi rendahnya rasio DAR yang diperoleh perusahaan farmasi tidak terlalu mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan dengan cara utang untuk pemanfaatan aset pada perusahaan perbankan tidak memberikan banyak nilai tambahan untuk meningkatkan laba atau perfitabilitas perusahaan, hal ini didukung dengan hasil koefisien variabel rasio DAR yang menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA, artinya rasio ini bisa meningkatkan ROA, namun tidak meningkat secara maksimal

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pratheepkanth (2011) yang menunjukkan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian Pratheepkanth (2011) menunjukkan arah pergerakan yang berlawanan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *Debt to Asset Ratio* (DAR) maka akan menurunkan nilai *Return On Assets* (ROA) hal ini disebabkan apabila semakin tinggi tingkat utang perusahaan untuk membiayai aktiva maka akan menambah resiko yang semakin besar. Resiko perusahaan yang semakin besar akan ditutupi oleh laba bersih perusahaan sehingga nilai ROA semakin kecil.

f. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) dengan nilai koefisien variabel -0,248 berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) karena nilai signifikansi *Debt To Equity Ratio* (DER) pada uji t sebesar 0,002 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t $0,002 < \text{sig } t 0,05$) dengan $t_{\text{hitung}} 3,181 > t_{\text{tabel}} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt To Equity Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) diterima.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini berarti semakin tinggi nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) maka nilai *Return On Assets* (ROA) akan semakin kecil. Semakin tinggi utang yang digunakan untuk menambah modal sendiri maka akan menurunkan tingkat keuntungan perusahaan.

Hasil penelitian ini mengacu pada *pecking order theory* dalam Brealy et al. (2008:26) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan perusahaan karena diikuti dengan beban biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Beban biaya operasional ini muncul ketika perusahaan berusaha menambah modal sendiri untuk meningkatkan keuntungan dengan cara utang dan laba

bersih yang diterima perusahaan dimungkinkan cenderung akan dipotong karena perusahaan memutuskan untuk melunasi tingkat utangnya dan menutup beban biaya operasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratheepkanth (2012) dan Innocent (2014) yang menemukan pengaruh negatif signifikan variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Return On Assets* (ROA). Menurut Innocent (2014) kenaikan tingkat rasio DER akan memicu beban biaya operasional dan biaya pajak. Beban operasional muncul ketika perusahaan menggunkan asset, sehingga keuntungan yang diperoleh akan berkurang untuk menutupi biaya operasional.

3. Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Hasil ini dapat dilihat pada tabel perhitungan anova yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $6,968 > F_{tabel}$ sebesar 2,30 atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dengan nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,000, hasil ini menerangkan bahwa variabel

independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (LnDD), Komite Audit (LnKA), Kepemilikan Institusional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima.

Berdasarkan hasil uji simultan dapat dilihat bahwa organ penerapan *Corporate Governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas apabila keempat organ tersebut dapat berjalan pada fungsi dan perannya masing-masing dengan baik. Kemampuan perusahaan menggunakan struktur modal untuk kepentingan pengelolaan perusahaan menggunakan rasio utang yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) juga dapat memicu tinggi rendahnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan berdasarkan laba bersih perusahaan dan total modal sendiri atau yang diukur berdasarkan hasil dari rasio *Return On Equity* (ROE).

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG 2014 peran komisaris independen berfungsi dalam pengawasan kinerja auditor untuk mendukung perusahaan perbankan dalam memperoleh laba atau profit. Dewan direksi bertugas menjalankan prinsip manajemen perbankan yang sehat dan bertanggungjawab dalam pengelolaan perusahaan termasuk memonitor

anggaran dasar bank sehingga dapat memperhatikan berapa total ekuitas yang diperlukan oleh perusahaan untuk tercapainya laba atau profit. Menurut Sutedi (94:2012) Komite audit yang terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat dan melihat berapa laba atau profit yang diperoleh perusahaan. Komite audit harus memastikan laporan keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perbankan karena GCG, hal ini merupakan cerminan tanggung jawab bank kepada *stakeholder* nya dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Kepemilikan institusional yang sebagian besar dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dapat memonitor peningkatan investasi yang ditanamkan secara profesional sebagai kebijakan dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana investasi dengan harapan memperoleh peningkatan keuntungan atau profit. *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan total utang dan total aset sedangkan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan total utang dan total modal sendiri. Kedua rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kondisi struktur modal perusahaan dalam menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Mengacu pada teori pendekatan laba bersih semakin tinggi tingkat utang jangka panjang yang digunakan sebagai pembelanjaan perusahaan, maka keuntungan perusahaan akan semakin meningkat (Sudana, 2009:144). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin

tinggi nilai rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maka akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini untuk konsep *Corporate Governance* sejalan dengan penelitian Arifani (2012) dan Septiana (2016), hasil penelitian keduanya menemukan bahwa secara simultan mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Terjadinya persamaan pengaruh antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas *Corporate Governance* yang diukur melalui organ didalamnya yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Dalam penelitian ini untuk variabel bebas dari konsep struktur modal memiliki persamaan hasil dengan penelitian Mareta (2013) yang menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE).

4. Pengaruh Secara Parsial Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Internasional (KI), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

a. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dengan nilai koefisien variabel 0,135 berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE)

karena nilai signifikansi proporsi dewan komisaris independen pada uji t sebesar 0,061 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,061 > sig t 0,05) dengan t_{hitung} 1,893 < t_{tabel} 1,982 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* (ROE) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan perbankan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian. Apabila dilihat dari data penelitian, proporsi dewan komisaris independen telah sesuai dengan peraturan OJK, yang menyatakan minimal 30%, sedangkan data yang dijelaskan dalam statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata proporsi dewan komisaris independen dalam sampel perusahaan perbankan lebih dari 40%. Meskipun demikian, hal tersebut hal tersebut tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan apabila tugas dan fungsi dewan komisaris independen dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peraturan atau pedoman yang berlaku.

Hasil penelitian ini mengacu pada isi *agency theory* yang dijelaskan di dalam Sutedi (2012:13) bahwa pentingnya pemilik perusahaan dan pemegang saham menyerahkan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional (agent) menimbulkan masalah keagenan. Masalah yang timbul atau disebut *agency problem*

yang memunculkan biaya agensi atau *agency cost* disebabkan karena rasa ketidakpuasan pengelola perusahaan dalam memperoleh penghasilan bila dibandingkan dengan para pemegang saham dan pemilik perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Masalah ini memicu para pengelola perusahaan baik dewan direksi maupun manajer yang memiliki informasi perusahaan yang lebih besar, termasuk modal perusahaan, dan keuntungan perusahaan menjadi disalahgunakan. Ditambah dengan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris kepada dewan direksi untuk sepenuhnya mengelola perusahaan membuat kekuatan independensi dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan menjadi melemah, hal ini yang diindikasikan dewan komisaris independen tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang diukur dengan rasio *return on equity* (ROE).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdillah (2015), Zabri (2015) dan Septiana (2016) yang hasil penelitian ketiganya menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Menurut Abdillah (2015) keberadaan peran dewan komisaris independen hanyalah sebagai pelengkap untuk membantu tugas para komisaris lainnya dan tidak berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai upaya pencapaian profitabilitas. Menurut Zabri (2015) peran dewan komisaris

independen tidak menjamin perusahaan melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diharapkan bisa berdampak positif terhadap pencapaian profitabilitas perusahaan terutama dengan pengukuran ROE, hal ini disebabkan karena kurang kuatnya fungsi dominan komisaris independen sebagai pemantauan kinerja perusahaan kepada organ perusahaan lainnya seperti direksi dan komite audit. Septiana (2016) mengatakan penambahan anggota dewan komisaris independen dibentuk hanya sekedar sebagai pemenuhan kewajiban dan formalitas dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, kegiatan fungsi pengawasan atau monitoring dewan komisaris independen belum mampu mengurangi permasalahan *agency cost* di dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2013) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity* (ROE). Semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka semakin mudah para komisaris untuk melakukan fungsi monitoring terhadap kinerja direksi, para pemegang saham dan pihak manajer. Dewan komisaris independen diharapkan mampu menjadi wasit atau penengah untuk pemberian nasihat kepada pihak direksi, pemegang saham dan manajer terhadap masalah pengelolaan perusahaan termasuk dalam upaya pencapaian profitabilitas.

b. Pengaruh Dewan Direksi (LnDD) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa dewan direksi dengan nilai koefisien variabel 0,432 berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* (ROE) karena nilai signifikansi dewan direksi pada uji t sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,000 > sig t 0,05) dengan t_{hitung} 4,468 > t_{tabel} 1,982 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* (ROE) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dalam perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya laba atau profitabilitas perusahaan yang diperoleh berdasarkan pengukuran rasio *return on equity* (ROE). Dewan Direksi pada perusahaan perbankan dalam penelitian ini dinilai telah mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai pengkoordinasi kegiatan manajer dan pengelolaan perusahaan dengan baik sebagai upaya dalam pencapaian profitabilitas.

Apabila dilihat dari data penelitian dan hasil dari statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah dewan direksi pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah dewan direksi perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian berjumlah rata-rata sebesar lebih dari 2 orang. Jumlah anggota dewan direksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92

ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa dalam sebuah perusahaan wajib memiliki minimal 2 orang atau lebih dewan direksi untuk mengelola perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.05/2014 jumlah anggota dewan direksi minimal dalam perusahaan dikatakan baik adalah tiga orang untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik dalam pengelolaan usaha untuk pencapaian tujuan perusahaan yang salah satunya adalah untuk memperoleh profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hisamuddin dan Tirta (2012) dan Septiana (2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Menurut Hisamuddin dan Tirta (2012) semakin banyak jumlah dewan direksi maka akan semakin mudah berjalannya fungsi pengelolaan usaha karena dapat bekerja secara terkoordinasi dan menyeluruh serta terfokus pada tujuan perusahaan untuk pencapaian laba maksimum. Menurut Septiana (2016) jumlah anggota dewan direksi mempengaruhi hubungan antara pihak dewan direksi dan manajer. Semakin banyak jumlah dewan direksi maka akan dapat menekan terjadinya *agency problem* yang dilakukan oleh pihak manajer untuk menguntungkan kepentingan sendiri dari pihak manajer. Dewan direksi hendaknya dapat fokus pada tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadinya maupun kepentingan dari pihak manajer sehingga dewan direksi mampu mengontrol kegiatan usaha manajer dalam mengelola perusahaan untuk memperoleh profitabilitas secara berkesinambungan.

c. Pengaruh Komite Audit (LnKA) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa komite audit dengan nilai koefisien variabel 0,003 berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on equity* (ROE) karena nilai signifikansi komite audit pada uji t sebesar 0,978 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,978 > sig t 0,05) dengan t_{hitung} 0,028 < t_{tabel} 1,982 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ditolak. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan perbankan belum mampu menjamin terlaksananya tugas dan wewenang serta fungsi auditing secara optimal kaitannya dengan perolehan profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Veronica dan Utama (2005) dan Putra (2017) yang melakukan penelitian di perusahaan perbankan juga, menyatakan dalam hasil penelitian mereka bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on equity* (ROE). Menurut Veronica dan Utama (2005) pengangkatan komite audit hanya sebatas untuk pemenuhan regulasi saja untuk mengangkat citra perusahaan bukan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Putra (2017) yang menyatakan komite audit dalam perusahaan hanya sebatas mengawasi

apakah proses operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan memastikan apakah laporan keuangan yang diterbitkan tidak mengalami keterlambatan namun tidak berusaha secara optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan kaitannya dalam memperoleh profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan ROE.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arifani (2015) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE. Menurut Arifani (2015) komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal, sehingga komite audit dipandang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Adanya komite audit mampu melindungi kepentingan para pemegang saham dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer karena komite audit bertanggungjawab mengawasi kredibilitas dan integritas laporan keuangan perusahaan.

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dengan nilai koefisien variabel 0,206 berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) karena nilai signifikansi kepemilikan institusional pada uji t sebesar 0,031 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,03 < sig t 0,05) dengan $t_{hitung} 2,185 > t_{tabel} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa koefisien regresi kepemilikan institusional bernilai positif namun tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) atau dapat dikatakan kepemilikan institusional mempengaruhi besar kecilnya *Return On Equity* (ROE). Semakin tinggi nilai kepemilikan saham institusional perusahaan berpotensi dapat meningkatkan nilai profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arifani (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian Arifani (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional akan mendorong penguatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dorongan institusi untuk mengawasi manajemen sehingga memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusional pada umumnya memiliki proporsi yang lebih besar bila dibandingkan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajerial, sehingga memungkinkan pihak institusional yang sebagian berasal dari luar perusahaan menjadi *controller* untuk mengawasi tindakan manajer sehingga manajer tidak bertindak untuk mementingkan kepentingan atau mencari keuntungan sendiri. Fungsi *controller* ini yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama pencapaian profitabilitas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wulandari dalam Septiana (2016) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). menurut Wulandari dalam Septiana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusi dimana dimiliki oleh para pemegang saham mayoritas yang memiliki fungsi monitoring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan cenderung bertindak mengorbankan kepentingan saham minoritas. Hal tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penentuan kebijakan perusahaan dalam pencapaian profitabilitas. Ketidakseimbangan ini juga yang akan mengindikasikan timbulnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

e. Pengaruh *Debt to Asset Ratio* (DAR) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa *Debt To Asset Ratio* (DAR) dengan nilai koefisien variabel 0,388 berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) karena nilai signifikansi *Debt To Asset Ratio* (DAR) pada uji t sebesar 0,016 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai signifikansi (uji t 0,01 < sig t 0,05) dengan $t_{hitung} 2,437 > t_{tabel} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt To Asset Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) diterima. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya

nilai *debt to asset ratio* (DAR) dapat menentukan tingkat perolehan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan arah pengaruh yang positif. Kenaikan rasio *debt to asset ratio* (DAR) dinilai mampu menaikkan nilai rasio *Return On Equity* (ROE).

Hasil penelitian ini didukung teori pendekatan laba bersih yang dikemukakan oleh Sudana (2009:144) bahwa semakin banyak hutang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan maka nilai dan laba perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini juga mengacu pada teori *trade-off* yang menyatakan bahwa apabila perusahaan mampu menyeimbangkan *agency cost of financial distress* (biaya kebangkrutan) dan *tax advantage of debt financing* (beban pajak yang ditanggung) maka perusahaan telah mampu mencapai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal akan memungkinkan memudahkan memperoleh keuntungan karena tidak akan mengurangi laba yang diperoleh (Hardjito :2011). Teori ini juga mengatakan bahwa apabila perusahaan ingin mendapatkan perolehan laba lebih tinggi maka perusahaan harus melakukan pembiayaan melalui utang (Hamid et al : 2015). *Trade-off theory* juga mengatakan dalam Hanafi (2015:310) perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber dananya harus mewaspadai dan mengontrol tingkat penggunaan utang sebagai pembiayaan, karena semakin naik dan bertambah tingkat utang

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jabor (2005) dan Hamid et al (2015) yang keduanya menyatakan bahwa *Debt To Asset*

Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Jabor (2005) mengatakan peningkatan satu nilai rasio *Debt To Asset Ratio* (DAR) maka akan selalu diikuti peningkatan satu nilai rasio *Return On Equity* (ROE). Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menambah aset melalui utang dan diikuti dengan kenaikan laba perusahaan. Menurut Hamid et al (2015) bagi perusahaan selain kondisi ekonomi, kondisi jumlah aset yang dimiliki perusahaan sangat berpengaruh pada keputusan para investor untuk memberikan pinjaman. Pinjaman akan lebih mudah diberikan apabila aset perusahaan terus meningkat diiringi dengan peningkatan keuntungan, karena investor menganggap bahwa perusahaan tersebut telah berhasil memanfaatkan pembiayaan aset melalui utang yang diberikan sehingga keuntungan yang diperoleh akan terus meningkat. Menurut Sartono (2010:124) ROE merupakan rasio yang digunakan bagi pemegang saham untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pratheepkanth (2011) dan Bonatua (2015) yang menunjukkan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

f. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil uji t menunjukkan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) dengan nilai koefisien variabel -0,180 berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on equity* (ROE) karena nilai signifikansi *Debt To Equity Ratio* (DER) pada uji t sebesar 0,690 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari kriteria nilai signifikansi (uji t $(0,431) > \text{sig t } 0,05$) dengan t_{hitung} yang telah dimutlakkan $0,790 < t_{\text{tabel}} 1,982$ sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) ditolak. Nilai t_{hitung} memiliki tanda negatif yang menunjukkan DER memiliki pengaruh negatif terhadap ROE namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *target capital structure* yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2011:155) yang menyatakan menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas (ROE). Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori pendekatan laba bersih yang dikemukakan oleh Sudana (2009:144) bahwa semakin banyak tingkat utang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai dan laba perusahaan akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukasa (2016) yang menyatakan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh tidak

signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian ini didukung oleh *pecking order theory* yang disampaikan dalam Sjahrial (2014:284) yang mengatakan bahwa setiap perusahaan tidak mengejar suatu target rasio utang terhadap ekuitas. Berapapun tingkat tingkat utang yang digunakan tidak dimaksudkan untuk menambah ekuitas atau modal. Perusahaan hanya melakukan utang yang didasarkan pada kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan melalui utang dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan disimpan menjadi laba ditahan. Laba ditahan digunakan untuk mendanai proyek yang menguntungkan saja. Hal ini akan berakibat pada pengembalian atau keuntungan terhadap modal yang diinvestasikan pada perusahaan. Hasil penelitian ini juga mengacu pada kelamahan rasio ROE yang dijelaskan oleh Brigham dan Houston (2011:155) pertama ROE tidak dapat mempertimbangkan risiko dengan baik, kedua rasio ROE tidak bisa mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Prateepkanth (2011) dan Bonatua (2015) yang mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *Debt To Equity* ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity*. Semakin besar rasio DER maka akan semakin sedikit keuntungan yang akan diperoleh perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pada penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Corporate Governance* dan struktur modal terhadap Profitabilitas perusahaan pada sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan oleh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Struktur modal pada penelitian ini diproksikan oleh *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Adapun kesimpulan dari hasil peneltian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA).
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* (ROE).
3. Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel

bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen maka dapat menaikkan nilai *Return On Asset* (ROA) walaupun secara tidak signifikan.

4. Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai proporsi Dewan Direksi maka dapat menaikkan nilai *Return On Asset* (ROA).
5. Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel bernilai negatif menunjukkan semakin tinggi nilai Komite Audit maka dapat menurunkan nilai *Return On Asset* (ROA) walaupun secara tidak signifikan.
6. Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai proporsi Kepemilikan Institusional maka dapat menaikkan nilai *Return On Asset* (ROA).
7. *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai *Debt to Asset Ratio* (DAR) maka dapat menaikkan nilai *Return On Asset* (ROA) walaupun secara tidak signifikan.
8. *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Arah koefisien variabel bernilai negatif menunjukkan semakin tinggi nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) maka dapat menurunkan nilai *Return On Asset* (ROA).

9. Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen maka dapat menaikkan nilai *Return On Equity* (ROE) walaupun secara tidak signifikan.
10. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai Dewan Direksi maka dapat menaikkan nilai *Return On Equity* (ROE).
11. Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai Komite Audit maka dapat menaikkan nilai *Return On Equity* (ROE) walaupun secara tidak signifikan.
12. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai Kepemilikan Institusional maka dapat menaikkan nilai *Return On Equity* (ROE).
13. *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai positif menunjukkan semakin tinggi nilai *Debt to Asset Ratio* maka dapat menaikkan nilai *Return On Equity* (ROE).
14. *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Arah koefisien variabel bernilai negatif menunjukkan

semakin tinggi nilai *Debt to Equity Ratio* maka dapat menurunkan nilai *Return On Equity* (ROE) walaupun secara tidak signifikan.

B. Saran

Dari hasil pemaparan keterbatasan yang dapat ditemukan oleh peneliti maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian sejenis berikutnya antara lain:

1. Memperluas variasi variabel independen yang dijadikan faktor variabel dependen lebih kuat pengaruhnya, diluar variabel independen yang telah digunakan oleh peneliti, sehingga hasil yang didapatkan sebagian besar dapat menjelaskan pengaruh variasi dari variabel dependen dan memperoleh nilai koefisien *Adjusted R Square* yang lebih tinggi.
2. Mencari, menambah atau memperluas variasi variabel dependen selain variabel dependen jenis profitabilitas yang telah digunakan oleh peneliti sehingga didapatkan pengaruh yang lebih kuat dan signifikan
3. Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan data sekunder saja, melainkan menggunakan data-data primer yang dimiliki oleh perusahaan seperti pedoman penerapan dan pengaplikasian mekanisme *corporate governance* perbankan, kebijakan peraturan *corporate governance* di masing-masing perbankan, alat ukur skor indeks *corporate governance*, prosedur pengendalian internal keuangan perusahaan, laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit sehingga hasil yang didapat dari variasi variabel independen lebih valid dan beragam.

4. Bagi peneliti selanjutnya lebih melihat skema struktur modal pada perusahaan yang diteliti berdasarkan tingkat total utang, laba ditahan, dan total modal dan dintinjau dari total asset yang dimiliki perusahaan, karena berdasarkan hasil penelitian tingkat utang yan tinggi belum tentu dapat menaikkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan dan kondisi sebaliknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Peraturan

- Agung, Anak A.P. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Agoes, Sukrisno, & Ardana, I Cenik. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asian Development Bank (ADB). 2014. *ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assesment 2014*. Filipina: Asian Development Bank. Diakses melalui www.adb.org pada 5 Oktober 2017.
- _____. 2016. *ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assesment 2014*. Filipina: Asian Development Bank. Diakses melalui www.adb.org pada 5 Februari 2018.
- Boediono. 2006. *Sambutan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Brealey, A. Richard S *et al.* 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Brigham dan Houston. 2009. *Dasar – dasar Manajemen Keuangan*. Buku 1. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Dasar – dasar Manajemen Keuangan – Buku 1 – Edisi Kesepuluh*. Jakarta. Salemba Empat.
- Chourmain, Imam. 2008. *Acuan Normatif Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House
- CG Watch Special Report. 2016. *Ecosystems Matter: Asia's path to better home-grown governance*. CLSA & ACGA.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Ray Indonesia.
- Effendi, Muh Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- FCGI. 2011. *Peranan Dewan Komisairs dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Coprporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Edisi 2. Jilid II. FCGI.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 221*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mahmud M. 2015. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. 2010. *Pegantar Manajemen Keuangan Edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Keown, Arthur J *et al.* 2010. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan, Edisi ke sepuluh*. Jilid 2. Jakarta: Indeks.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia. 2004. *Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Perbankan Umum Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) 2004.
- Peraturan Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 1 ayat 6 tentang Pengertian *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 4 tentang Komisaris Independen.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Surat Putusan BAPEPAM (Badan Pengawas dan Pemeriksa Pasar Modal) Kep-29/PM/2004.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Syarat Sah Pengangkatan Komisaris Independen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.05/2014 tentang Syarat Sah Pengangkatan Dewan Direksi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.
- Riyanto, B. 2008. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Edisi Keempat. BPF. Yogyakarta.

- Rodoni, Ahmad dan Ali. 2014. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Sartono, R. Agus. 2010. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Singarimbus, M. dan Effendi, S. 2008. *Metode Penelitian Survei*: Jakarta. LP3ES.
- Siregar, Sofyan. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitanggang, J. P. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan – Dilengkapi Soal dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sjahrial, Dermawan. 2014. *Manajemen Keuangan Lanjutan Edisi Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sochib. 2016. *Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Statistik Perbankan Indonesia Volume 13 No : 01. 2014. Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- _____. Volume 15 No : 01. Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Sudana, I Made. 2009. *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*: Surabaya. Airlangga University Press.
- Sugiarto. 2009. *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan & Informasi Asimetri*. Yogyakarta: Graha Ayu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SBI/3/30/DPNP/2011. Perubahan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE/03-PM/2002. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Disusun untuk Komite Nasional Good Corporate Governance (KNKG).

Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin, Lukman. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan – Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tampubolon, Manahan. P. 2013. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 92 tentang Perseroan Terbatas.

Utari, D., Purwanti, dan Darsono. 2014. *Manajemen Keuangan – Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Zakarsyi, Moh. Wahyudin. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Zulganef. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis – Edisi Pertama*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Jurnal

Hamid, Masdiah Abdul, Azizah Abdullah, dan Nur atiqah Kamaruzzaman. 2015. *Capital Structure and Profitability in Family and Non-Family Firms: Malaysian Evidence*. Elsevier Procedia Economics and Finance, Vol 31Hal 44-55.

Hardjito, D. Agus. 2011. *Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Siasat Bisnis Universitas Islam Indonesia, Vol. 15 No. 2. Hal 187-196

Herdjono dan Indah Megasari. 2017. *The Effect of Corporate Governance on the Performance of a Company: Some Empirical Findings from Indonesia*. Journal of Management and Business Administration. Cntral Europe. De Gruyter International Journals, Vol 25 No.1. Hal 34-45.

Hisamudin, Nur dan M. Yayang Tirta K. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 10 Hal 109 – 138.

Innocent, Chinedu Enekwe dkk. 2014. *The Effect of Financial Leverage on Financial Performance : Evidence of Quoted Pharmaceutical Companies*

- in Nigeria*. IOSR Journal of Economisc and Finance, Vol. 5 No.3. Hal 17-25.
- Joshua Abor. 2005. *The Effect of Capital Structure on Profitability: an empirical analysis of listed frims in Ghana*. Emerald Insight: Journals Journal Risk and Finance, Vol 6 No 5 :
- Javeed Awais. 2015. *An Empirical Examination of the Impact of Corporate Governace Measures and Capital Structure on Firm Profitability in Pakistan*. International Journal Economic and Finance, Vol. 6 No 13. Hal 9-13.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure*. Jurnal of Financial Economics 3 (1976), pp 305-360
- Palaniappan G. 2017. *Determinants of Corporate Financial Performance relating to Board Characteristic of Corporate Governance in Indian Manufacturing Industry*. Journal Management and Business Economic, Emerald Insight Juornals, Vol 26. Hal 8-16.
- Pratheepkanth, Puwanenthiren. 2011. *Capital Structure and Financial Performance Evidence from Selected Business Companies in Colombo Stock Exchange Sri Lanka*. Journal of Arts. Science & Commerce Vol 2. Sri Lanka : Research World
- Puspitaningrum, Dara and Atmini, Sari. 2012. *Corporate Governance Mechanism and the level of Internet Financial Reporting: Evidence from Indonesia Companies*. Procedia Economics and Finance, Vol 2 No 157. Hal 2-8.
- Rini Tetty Sulestiyo dan Imam Gozali, 2012. *Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisararis Independen, dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan*. Diponegoro Journal of Accounting , Volume 1, No 1, Tahun 2012. Hal 1-12.
- Ujiyanto, M.A., & Pramuka, B.A. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Hal 26-28.
- Veronica, Sylvia, & Siddharta U. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba*. Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VII, IAI, Solo..
- Zabri, Shafie Mohamed & Ahmad, Kamila. 2015. *Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia*. Elsevier Procedia Economics and Finance. Vol 35 (2016). Hal 287-296.

Skripsi

- Abdillah, Ardhi. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Sebagai Pemenang Annual Report Award Periode 2010-2012 Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Arifany, Rizky. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Bonatua, Bop Harlim. 2013. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Listed di BEI Periode 2010-2013)*. Skripsi Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Mareta, Asty Dela. 2013. *Pengaruh Financial Leverage Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2000-2011)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Putra, Agung Santoso. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Rimardhani, Helfina. 2016. *“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Septiana, Nurul. 2016. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governace terhadap Profitabilitas Perusahaan”* (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2011-2014). Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Septiani, Sabrina. 2013. *Pengaruh Corporate Governance Dan Faktor Fundamental Terhadap Kebijakan Dividen Serta Implikasinya pada Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ 45)*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sukasa, Lolita. 2016. *Influence of Corporate Governance and Capital Structure on Financial Performance* (Studies on Companies that were Rated in

CGPI Listed on The Indonesia Stock Exchange For 2011-2015). Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Internet :

Asian Corporate Governance Association (ACGA). 2016. *Asian Corporate Governance Watch Market Score 2016: Ecosystems Matter* (http://www.acgaasia.org/upload/files/research_form/20170611190735_15.pdf). Diakses pada 2 Oktober 2017).

Asian Development Bank (ADB). 2014. ASEAN Corporate Governance Scorecard Contry Reports and Assesment 2014. (<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/185624/aseancgscorecard-2014.pdf>). Diakses pada 18 September 2017).

Bank Indonesia. Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum. (<https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/533f63de31c64b7ebd11320eb821094bpbi8406.pdf>). Diakses 20 Desember 2017).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/23/51-persen-utang-luar-negeri-mengalir-ke-sektor-keuangan>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/19/total-utang-luar-negeri-perbankan-indonesia-2010-2016>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/06/inilah-10-bank-dengan-aset-terbesar>

<http://www.idx.co.id/>. Diakses pada 9 Oktober 2017

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia (<http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-GCG-Perbankan.pdf>). Diakses pada 3 November 2017).

OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Perancis: . OECD Principles of Corporate Governance, diakses melalui (<http://www.oecd.org/> pada 20 September 2017).

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-ojk-tentang-tata-kelola-perusahaan-yang-baik-bagi-perusahaan-pembiayaan.aspx>). Diakses pada 20 Desember 2017).

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan->

ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx.
Diakses pada 22 Desember 2017).

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Statistik Perbankan Indonesia 2016.
(<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>). Diakses 13 Maret 2018



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perusahaan Sampel Terpilih

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	AGRO	PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.
2	BACA	PT. Bank Capital Indonesia Tbk.
3	BBCA	PT. Bank Central Asia Tbk.
4	BBKP	PT. Bank Bukopin Tbk.
5	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
6	BBNP	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
7	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
8	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara Tbk.
9	BDMN	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
10	BJBR	PT. Bank Pmebangunan Daerah Jabar Banten Tbk.
11	BJTM	PT. Bank Daerah Pembangunan Jawa Timur Tbk.
12	BMRI	PT. Bank Mandiri (Perseroan) Tbk.
13	BNBA	PT. Bank Bumi Arta Tbk.
14	BNGA	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
15	BNII	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
16	BSIM	PT. Bank Sinarmas Indonesia Tbk.
17	BTPN	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
18	BVIC	PT. Bank Victoria Internasional Tbk.
19	INPC	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.
20	MAYA	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
21	MCOR	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
22	MEGA	PT. Bank Mega Tbk.
23	NISP	PT. Bank OCBC NISP Tbk.



Lampiran 2 Return On Asset (X_{ROA}) dalam (%) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL ASET	EBIT	ROA (%)
AGRO	2012	2.020.070.117.500	51.471.054.000	2,5480
	2013	2.562.035.007.500	71.589.231.000	2,7942
	2014	3.192.595.742.000	85.353.649.000	2,6735
	2015	4.182.251.281.500	110.795.268.000	2,6492
	2016	5.688.980.360.500	141.265.512.000	2,4831
BACA	2012	5.180.558.000.000	62.561.000.000	1,20761
	2013	6.402.726.500.000	93.343.000.000	1,45786
	2014	8.195.526.000.000	98.896.000.000	1,20671
	2015	10.705.486.500.000	119.648.000.000	1,11763
	2016	13.183.305.500.000	126.025.000.000	0,95594
BBCA	2012	412.451.275.000.000	14.686.046.000.000	3,56067
	2013	469.649.385.000.000	17.815.606.000.000	3,79338
	2014	524.364.232.500.000	20.741.121.000.000	3,95548
	2015	573.398.331.000.000	22.657.114.000.000	3,95137
	2016	635.555.761.500.000	25.839.200.000.000	4,06561
BBKP	2012	61.436.646.500.000	1.059.370.000.000	1,72433
	2013	67.573.746.500.000	1.193.605.000.000	1,76637
	2014	74.254.465.500.000	971.121.000.000	1,30783
	2015	86.708.885.000.000	1.178.728.000.000	1,35941
	2016	99.886.252.000.000	1.357.170.000.000	1,35872
BBNI	2012	316.180.833.500.000	8.899.562.000.000	2,81471
	2013	359.979.160.500.000	11.278.165.000.000	3,133
	2014	401.614.261.500.000	13.524.310.000.000	3,36749
	2015	462.584.498.000.000	11.466.148.000.000	2,47871
	2016	555.813.584.000.000	14.302.905.000.000	2,57333
BBNP	2012	7.392.427.605.500	115.153.801.000	1,55773
	2013	9.098.972.145.500	141.923.108.000	1,55977
	2014	9.727.304.645.500	130.448.583.000	1,34106
	2015	9.040.993.623.500	87.009.213.000	0,96239
	2016	8.159.448.086.000	16.484.983.000	0,20204
BBRI	2012	502.554.220.000.000	23.638.833.000.000	4,70374
	2013	580.696.078.000.000	27.910.066.000.000	4,80631
	2014	714.069.010.500.000	30.859.073.000.000	4,32158
	2015	840.190.666.500.000	32.494.018.000.000	3,86746
	2016	941.035.369.000.000	33.973.770.000.000	3,61025

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL ASET	EBIT	ROA (%)
BBTN	2012	100.435.026.000.000	1.863.202.000.000	1,85513
	2013	121.459.161.500.000	2.140.771.000.000	1,76254
	2014	137.872.845.500.000	1.548.172.000.000	1,1229
	2015	158.191.776.500.000	2.541.886.000.000	1,60684
	2016	192.988.035.500.000	3.330.084.000.000	1,72554
BDMN	2012	148.862.870.000.000	5.486.679.000.000	3,68573
	2013	170.014.328.000.000	5.530.213.000.000	3,25279
	2014	189.972.970.500.000	3.553.534.000.000	1,87055
	2015	191.883.002.500.000	3.281.534.000.000	1,71017
	2016	181.072.071.000.000	4.393.037.000.000	2,42613
BJBR	2012	62.644.768.000.000	1.512.499.000.000	2,41441
	2013	70.899.555.500.000	1.752.874.000.000	2,47233
	2014	73.397.385.000.000	1.438.490.000.000	1,95987
	2015	82.266.983.500.000	1.766.399.000.000	2,14715
	2016	95.507.943.500.000	1.463.908.000.000	1,53276
BJTM	2012	26.979.354.500.000	1.001.341.000.000	3,71151
	2013	31.079.365.000.000	1.153.510.000.000	3,7115
	2014	35.522.291.500.000	1.375.836.000.000	3,87316
	2015	40.400.838.500.000	1.261.253.000.000	3,12185
	2016	42.918.290.500.000	1.028.216.000.000	2,39575
BMRI	2012	593.755.206.000.000	20.504.268.000.000	3,45332
	2013	684.359.235.000.000	24.061.837.000.000	3,51597
	2014	794.069.717.500.000	26.008.015.000.000	3,27528
	2015	882.551.541.000.000	26.369.430.000.000	2,98786
	2016	974.384.709.000.000	18.572.965.000.000	1,90612
BNBA	2012	3.223.383.000.000	77.467.000.000	2,40328
	2013	3.764.645.000.000	78.854.000.000	2,09459
	2014	4.600.547.000.000	70.541.000.000	1,53332
	2015	5.861.344.000.000	77.645.000.000	1,3247
	2016	6.844.219.500.000	106.483.000.000	1,55581
BNGA	2012	182.106.805.500.000	5.786.927.000.000	3,17777
	2013	208.139.445.000.000	5.832.017.000.000	2,80198
	2014	226.014.416.000.000	2.961.618.000.000	1,31037
	2015	236.005.837.500.000	1.141.004.000.000	0,48346
	2016	240.210.490.000.000	2.574.924.000.000	1,07194
BNII	2012	105.346.009.500.000	1.695.869.000.000	1,60981
	2013	128.159.829.500.000	2.184.224.000.000	1,7043

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL ASET	EBIT	ROA (%)
	2014	141.932.608.500.000	959.834.000.000	0,67626
	2015	150.468.739.500.000	1.545.023.000.000	1,02681
	2016	162.148.957.500.000	2.610.640.000.000	1,61003
BSIM	2012	15.905.274.000.000	285.479.000.000	1,79487
	2013	16.299.673.500.000	286.100.000.000	1,75525
	2014	19.353.502.000.000	200.895.000.000	1,03803
	2015	24.564.118.500.000	238.953.000.000	0,97277
	2016	29.530.657.000.000	493.630.000.000	1,67158
BTPN	2012	52.870.636.500.000	2.485.314.000.000	4,70075
	2013	64.377.502.500.000	2.868.855.000.000	4,4563
	2014	72.339.805.000.000	2.522.528.000.000	3,48705
	2015	78.027.200.000.000	2.432.611.000.000	3,11764
	2016	86.205.525.000.000	2.604.519.000.000	3,02129
BVIC	2012	13.077.701.698.000	252.594.217.000	1,93149
	2013	16.762.096.194.500	330.171.255.000	1,96975
	2014	20.268.117.109.500	121.532.701.000	0,59963
	2015	22.307.783.967.500	93.997.406.000	0,42137
	2016	24.625.333.467.000	92.860.786.000	0,37709
INPC	2012	19.872.103.000.000	139.810.000.000	0,70355
	2013	20.881.510.500.000	293.613.000.000	1,40609
	2014	22.333.510.500.000	180.166.000.000	0,80671
	2015	24.291.009.500.000	84.258.000.000	0,34687
	2016	25.669.593.500.000	92.424.000.000	0,36005
MAYA	2012	15.058.876.552.500	351.140.867.000	2,33179
	2013	20.591.061.706.500	509.628.250.000	2,475
	2014	30.094.581.166.000	580.328.464.000	1,92835
	2015	41.739.772.163.500	878.212.838.000	2,10402
	2016	54.072.527.873.000	1.087.199.550.000	2,01063
MCOR	2012	6.474.020.000.000	128.018.000.000	1,97741
	2013	7.206.230.000.000	118.708.000.000	1,6473
	2014	8.843.402.500.000	71.448.000.000	0,80792
	2015	9.929.356.000.000	96.528.000.000	0,97215
	2016	11.173.256.000.000	79.445.000.000	0,71103
MEGA	2012	63.564.067.500.000	1.566.014.000.000	2,46368
	2013	65.847.403.000.000	632.550.000.000	0,96063
	2014	66.561.794.500.000	697.981.000.000	1,04862
	2015	67.436.530.500.000	1.238.769.000.000	1,83694

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL ASET	EBIT	ROA (%)
	2016	69.378.426.000.000	1.545.423.000.000	2,22753
NISP	2012	69.488.067.000.000	1.222.241.000.000	1,75892
	2013	88.325.921.500.000	1.529.716.000.000	1,7319
	2014	100.310.610.000.000	1.776.712.000.000	1,77121
	2015	111.795.758.000.000	2.001.461.000.000	1,79028
	2016	129.338.371.500.000	2.351.102.000.000	1,81779

Lampiran 3 Return On Equity (XROE) dalam (%) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL EKUITAS	EAT	ROE (%)
AGRO	2012	359.770.359.500	33.026.578.000	9,179905
	2013	604.415.534.500	52.439.708.000	8,676102
	2014	870.464.053.000	59.407.934.000	6,824858
	2015	1.128.217.009.000	80.491.880.000	7,134432
	2016	1.644.331.982.500	103.003.152.000	6,264134
BACA	2012	633.288.000.000	47.714.000.000	7,534329
	2013	782.089.000.000	70.477.000.000	9,011379
	2014	940.291.500.000	74.530.000.000	7,926265
	2015	1.013.804.500.000	90.823.000.000	8,958631
	2016	1.184.228.000.000	93.457.000.000	7,891808
BBCA	2012	46.962.641.000.000	11.718.460.000.000	24,95273
	2013	57.932.310.000.000	14.256.239.000.000	24,60844
	2014	70.943.647.500.000	16.511.670.000.000	23,27435
	2015	83.772.778.500.000	18.035.768.000.000	21,52939
	2016	101.169.999.500.000	20.632.281.000.000	20,39368
BBKP	2012	4.685.418.000.000	834.719.000.000	17,81525
	2013	5.605.055.500.000	934.622.000.000	16,67463
	2014	6.517.424.500.000	726.808.000.000	11,15177
	2015	7.178.329.500.000	964.307.000.000	13,43359
	2016	8.536.555.500.000	1.090.635.000.000	12,77605
BBNI	2012	40.684.157.500.000	7.048.362.000.000	17,32459
	2013	45.604.398.000.000	9.057.941.000.000	19,86199
	2014	54.352.406.500.000	10.829.379.000.000	19,92438
	2015	69.729.765.000.000	9.140.532.000.000	13,10851
	2016	83.846.111.000.000	11.410.196.000.000	13,6085
BBNP	2012	622.085.107.500	85.429.831.000	13,73282

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL EKUITAS	EAT	ROE (%)
	2013	856.828.998.000	105.234.027.000	12,2818
	2014	1.095.249.911.500	96.532.495.000	8,813741
	2015	1.166.797.079.000	66.866.856.000	5,730804
	2016	1.196.501.230.000	8.108.625.000	0,677695
BBRI	2012	57.228.813.500.000	18.520.950.000.000	32,36298
	2013	71.982.149.000.000	21.344.000.000.000	29,6518
	2014	88.532.214.500.000	24.253.845.000.000	27,3955
	2015	105.432.304.000.000	25.410.788.000.000	24,10152
	2016	129.969.884.500.000	26.227.991.000.000	20,18005
BBTN	2012	8.800.257.000.000	1.363.962.000.000	15,49912
	2013	10.917.812.000.000	1.562.161.000.000	14,30837
	2014	11.881.579.500.000	1.115.592.000.000	9,389257
	2015	13.033.256.500.000	1.850.907.000.000	14,20142
	2016	16.495.321.500.000	2.618.905.000.000	15,87665
BDMN	2012	27.284.906.000.000	4.117.148.000.000	15,08947
	2013	30.143.147.000.000	4.159.320.000.000	13,79856
	2014	32.285.253.500.000	2.682.662.000.000	8,309249
	2015	33.616.186.500.000	2.469.157.000.000	7,345143
	2016	35.296.410.500.000	2.792.722.000.000	7,912198
BJBR	2012	5.697.969.500.000	1.193.304.000.000	20,94262
	2013	6.363.552.500.000	1.376.387.000.000	21,62922
	2014	6.900.936.000.000	1.120.035.000.000	16,23019
	2015	7.420.412.500.000	1.380.965.000.000	18,61035
	2016	8.715.723.000.000	1.153.225.000.000	13,23155
BJTM	2012	4.373.612.500.000	724.639.000.000	16,56843
	2013	5.602.884.500.000	824.312.000.000	14,71228
	2014	5.881.149.000.000	939.084.000.000	15,9677
	2015	6.169.548.000.000	884.503.000.000	14,33659
	2016	6.752.516.500.000	884.503.000.000	13,09886
BMRI	2012	69.204.998.500.000	16.043.618.000.000	23,18274
	2013	82.273.092.500.000	18.829.934.000.000	22,88711
	2014	96.817.579.000.000	20.654.783.000.000	21,33371
	2015	112.168.201.500.000	21.152.398.000.000	18,85775
	2016	136.430.782.000.000	14.650.163.000.000	10,73817
BNBA	2012	499.318.000.000	57.115.000.000	11,4386
	2013	543.453.500.000	56.197.000.000	10,34072
	2014	583.270.500.000	51.827.000.000	8,885586

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL EKUITAS	EAT	ROE (%)
	2015	918.003.500.000	56.950.000.000	6,20368
	2016	1.265.267.500.000	78.759.000.000	6,224692
BNGA	2012	20.510.701.500.000	4.249.861.000.000	20,72021
	2013	24.269.299.500.000	4.296.151.000.000	17,702
	2014	27.167.190.500.000	2.343.840.000.000	8,627466
	2015	28.563.540.500.000	427.885.000.000	1,498011
	2016	31.443.504.500.000	2.081.717.000.000	6,620499
BNII	2012	8.810.748.000.000	1.211.121.000.000	13,74595
	2013	11.037.947.000.000	1.570.316.000.000	14,22652
	2014	13.529.226.000.000	712.328.000.000	5,265105
	2015	14.884.629.500.000	1.143.562.000.000	7,682838
	2016	17.195.907.000.000	1.967.276.000.000	11,44037
BSIM	2012	1.560.288.000.000	227.906.000.000	14,60666
	2013	2.289.934.000.000	221.100.000.000	9,6553
	2014	2.957.371.000.000	154.932.000.000	5,238842
	2015	3.415.046.500.000	185.153.000.000	5,421683
	2016	4.072.966.500.000	370.651.000.000	9,100271
BTPN	2012	6.675.562.500.000	1.978.986.000.000	29,64523
	2013	8.820.896.000.000	2.131.101.000.000	24,15969
	2014	10.984.249.500.000	1.869.031.000.000	17,01555
	2015	12.992.246.500.000	1.752.609.000.000	13,48965
	2016	15.118.143.500.000	1.875.846.000.000	12,40791
BVIC	2012	1.340.652.961.500	205.571.047.000	15,33365
	2013	1.556.984.157.000	262.636.430.000	16,86828
	2014	1.702.302.455.500	105.699.344.000	6,209199
	2015	1.936.759.560.500	94.073.216.000	4,857248
	2016	2.369.980.471.500	100.360.474.000	4,234654
INPC	2012	1.545.834.000.000	133.349.000.000	8,626347
	2013	2.262.899.500.000	222.805.000.000	9,845996
	2014	2.639.739.000.000	112.376.000.000	4,257088
	2015	2.728.388.000.000	71.294.000.000	2,613045
	2016	3.595.079.500.000	72.843.000.000	2,026186
MAYA	2012	1.754.667.414.500	263.289.326.000	15,00508
	2013	2.129.031.577.500	385.351.499.000	18,09985
	2014	2.632.278.958.000	435.561.942.000	16,54695
	2015	3.719.653.223.500	652.324.636.000	17,53724
	2016	5.820.272.418.500	820.190.823.000	14,09197

Kode	Tahun	RATA-RATA TOTAL EKUITAS	EAT	ROE
MCOR	2012	656.649.500.000	94.081.000.000	14,32743
	2013	895.522.000.000	78.306.000.000	8,744174
	2014	1.127.759.000.000	52.876.000.000	4,68859
	2015	1.316.935.500.000	67.378.000.000	5,116272
	2016	1.904.958.000.000	22.178.000.000	1,164225
MEGA	2012	5.569.604.500.000	1.545.423.000.000	27,74745
	2013	6.190.663.000.000	524.780.000.000	8,47696
	2014	6.537.590.000.000	599.238.000.000	9,166038
	2015	9.236.935.000.000	1.052.771.000.000	11,39741
	2016	11.891.438.000.000	1.158.000.000.000	9,738099
NISP	2012	7.770.927.500.000	855.931.000.000	11,01453
	2013	11.245.660.500.000	1.094.486.000.000	9,732519
	2014	14.241.605.500.000	1.403.521.000.000	9,855076
	2015	15.677.356.500.000	1.467.981.000.000	9,363702
	2016	17.958.961.500.000	3.095.229.000.000	17,23501

Lampiran 4 Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_{PDKI}) dalam persen (%) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)
AGRO	2012	2	4	50,0000
	2013	3	5	60,0000
	2014	3	5	60,0000
	2015	3	5	60,0000
	2016	2	4	50,0000
BACA	2012	2	3	66,6667
	2013	2	3	66,6667
	2014	2	3	66,6667
	2015	2	3	66,6667
	2016	2	3	66,6667
BBKA	2012	3	5	60,0000
	2013	3	5	60,0000
	2014	3	5	60,0000
	2015	3	5	60,0000
	2016	3	5	60,0000
BBKP	2012	3	5	60,0000

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)
	2013	4	6	66,6667
	2014	4	7	57,1429
	2015	3	6	50,0000
	2016	3	6	50,0000
BBNI	2012	4	7	57,1429
	2013	4	7	57,1429
	2014	4	8	50,0000
	2015	5	8	62,5000
	2016	5	8	62,5000
BBNP	2012	2	4	50,0000
	2013	2	4	50,0000
	2014	2	4	50,0000
	2015	2	4	50,0000
	2016	2	4	50,0000
BBRI	2012	5	9	55,5556
	2013	4	8	50,0000
	2014	5	8	62,5000
	2015	5	8	62,5000
	2016	5	9	55,5556
BBTN	2012	3	6	50,0000
	2013	3	6	50,0000
	2014	3	6	50,0000
	2015	4	7	57,1429
	2016	3	7	42,8571
BDMN	2012	4	8	50,0000
	2013	4	8	50,0000
	2014	3	6	50,0000
	2015	4	7	57,1429
	2016	4	7	57,1429
BJBR	2012	4	6	66,6667
	2013	4	5	80,0000
	2014	4	7	57,1429
	2015	3	4	75,0000
	2016	4	5	80,0000
BJTM	2012	2	4	50,0000
	2013	2	4	50,0000

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)
	2014	2	4	50,0000
	2015	2	5	40,0000
	2016	2	5	40,0000
BMRI	2012	4	7	57,1429
	2013	4	7	57,1429
	2014	4	7	57,1429
	2015	4	8	50,0000
	2016	4	8	50,0000
BNBA	2012	2	3	66,6667
	2013	2	3	66,6667
	2014	2	3	66,6667
	2015	2	3	66,6667
	2016	2	3	66,6667
BNGA	2012	4	8	50,0000
	2013	4	8	50,0000
	2014	4	8	50,0000
	2015	4	8	50,0000
	2016	4	8	50,0000
BNII	2012	4	7	57,1429
	2013	3	6	50,0000
	2014	3	6	50,0000
	2015	3	6	50,0000
	2016	3	6	50,0000
BSIM	2012	2	3	66,6667
	2013	2	3	66,6667
	2014	2	3	66,6667
	2015	2	3	66,6667
	2016	2	3	66,6667
BTPN	2012	3	6	50,0000
	2013	3	6	50,0000
	2014	3	6	50,0000
	2015	3	6	50,0000
	2016	3	5	60,0000
BVIC	2012	3	4	75,0000
	2013	3	4	75,0000
	2014	3	4	75,0000

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)
	2015	3	4	75,0000
	2016	3	4	75,0000
INPC	2012	3	6	50,0000
	2013	3	6	50,0000
	2014	3	6	50,0000
	2015	3	6	50,0000
	2016	3	6	50,0000
MAYA	2012	3	6	50,0000
	2013	3	6	50,0000
	2014	3	5	60,0000
	2015	3	5	60,0000
	2016	2	5	40,0000
MCOR	2012	2	4	50,0000
	2013	2	3	66,6667
	2014	2	3	66,6667
	2015	2	3	66,6667
	2016	2	3	66,6667
MEGA	2012	2	3	66,6667
	2013	2	4	50,0000
	2014	2	3	66,6667
	2015	2	4	50,0000
	2016	2	4	50,0000
NISP	2012	4	8	50,0000
	2013	4	8	50,0000
	2014	4	8	50,0000
	2015	4	8	50,0000
	2016	4	8	50,0000

Lampiran 5 Ln Jumlah Dewan Direksi (X_{LnDD}) (orang) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Direksi (orang)	Ln Jumlah Dewan Direksi (orang)
AGRO	2012	5	1,6094
	2013	5	1,6094
	2014	5	1,6094
	2015	5	1,6094

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Direksi (orang)	Ln Jumlah Dewan Direksi (orang)
	2016	5	1,6094
BACA	2012	4	1,3863
	2013	5	1,6094
	2014	6	1,7918
	2015	6	1,7918
	2016	6	1,7918
BBCA	2012	10	2,3026
	2013	10	2,3026
	2014	10	2,3026
	2015	10	2,3026
	2016	11	2,3979
BBKP	2012	7	1,9459
	2013	7	1,9459
	2014	7	1,9459
	2015	7	1,9459
	2016	7	1,9459
BBNI	2012	10	2,3026
	2013	10	2,3026
	2014	10	2,3026
	2015	9	2,1972
	2016	10	2,3026
BBNP	2012	5	1,6094
	2013	5	1,6094
	2014	5	1,6094
	2015	5	1,6094
	2016	5	1,6094
BBRI	2012	11	2,3979
	2013	11	2,3979
	2014	11	2,3979
	2015	11	2,3979
	2016	11	2,3979
BBTN	2012	7	1,9459
	2013	7	1,9459
	2014	6	1,7918
	2015	8	2,0794
	2016	8	2,0794
BDMN	2012	12	2,4849

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Direksi (orang)	Ln Jumlah Dewan Direksi (orang)
	2013	11	2,3979
	2014	9	2,1972
	2015	7	1,9459
	2016	9	2,1972
BJBR	2012	6	1,7918
	2013	4	1,3863
	2014	7	1,9459
	2015	7	1,9459
	2016	7	1,9459
BJTM	2012	5	1,6094
	2013	5	1,6094
	2014	5	1,6094
	2015	5	1,6094
	2016	5	1,6094
BMRI	2012	11	2,3979
	2013	11	2,3979
	2014	11	2,3979
	2015	11	2,3979
	2016	10	2,3026
BNBA	2012	3	1,0986
	2013	3	1,0986
	2014	3	1,0986
	2015	3	1,0986
	2016	3	1,0986
BNGA	2012	12	2,4849
	2013	12	2,4849
	2014	11	2,3979
	2015	11	2,3979
	2016	10	2,3026
BNII	2012	9	2,1972
	2013	8	2,0794
	2014	8	2,0794
	2015	9	2,1972
	2016	8	2,0794
BSIM	2012	7	1,9459
	2013	6	1,7918
	2014	8	2,0794

Kode	Tahun	Jumlah Dewan Direksi (orang)	Ln Jumlah Dewan Direksi (orang)
	2015	8	2,0794
	2016	8	2,0794
BTPN	2012	10	2,3026
	2013	10	2,3026
	2014	10	2,3026
	2015	12	2,4849
	2016	7	1,9459
BVIC	2012	6	1,7918
	2013	7	1,9459
	2014	7	1,9459
	2015	6	1,7918
	2016	5	1,6094
INPC	2012	6	1,7918
	2013	6	1,7918
	2014	7	1,9459
	2015	7	1,9459
	2016	7	1,9459
MAYA	2012	6	1,7918
	2013	6	1,7918
	2014	6	1,7918
	2015	8	2,0794
	2016	9	2,1972
MCOR	2012	4	1,3863
	2013	5	1,6094
	2014	5	1,6094
	2015	5	1,6094
	2016	8	2,0794
MEGA	2012	8	2,0794
	2013	9	2,1972
	2014	9	2,1972
	2015	10	2,3026
	2016	8	2,0794
NISP	2012	9	2,1972
	2013	11	2,3979
	2014	10	2,3026
	2015	10	2,3026
	2016	10	2,3026

Lampiran 6 Ln Jumlah Komite Audit (X_{LnKA}) (orang) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit (orang)	Ln Jumlah Komite Audit (orang)
AGRO	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BACA	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BBKA	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BBKP	2012	4	1,386
	2013	4	1,386
	2014	4	1,386
	2015	5	1,609
	2016	5	1,609
BBNI	2012	4	1,386
	2013	4	1,386
	2014	3	1,099
	2015	4	1,386
	2016	3	1,099
BBNP	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BBRI	2012	8	2,079
	2013	8	2,079
	2014	6	1,792
	2015	6	1,792
	2016	6	1,792

Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit (orang)	Ln Jumlah Komite Audit (orang)
BBTN	2012	3	1,099
	2013	5	1,609
	2014	4	1,386
	2015	5	1,609
	2016	7	1,946
BDMN	2012	6	1,792
	2013	6	1,792
	2014	5	1,609
	2015	5	1,609
	2016	5	1,609
BJBR	2012	5	1,609
	2013	6	1,792
	2014	6	1,792
	2015	5	1,609
	2016	5	1,609
BJTM	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BMRI	2012	6	1,792
	2013	6	1,792
	2014	6	1,792
	2015	6	1,792
	2016	6	1,792
BNBA	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BNGA	2012	6	1,792
	2013	6	1,792
	2014	6	1,792
	2015	6	1,792
	2016	4	1,386
BNII	2012	5	1,609
	2013	4	1,386

Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit (orang)	Ln Jumlah Komite Audit (orang)
	2014	4	1,386
	2015	4	1,386
	2016	4	1,386
BSIM	2012	5	1,609
	2013	5	1,609
	2014	4	1,386
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
BTPN	2012	5	1,609
	2013	5	1,609
	2014	4	1,386
	2015	3	1,099
	2016	4	1,386
BVIC	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	5	1,609
	2016	5	1,609
INPC	2012	5	1,609
	2013	6	1,792
	2014	6	1,792
	2015	6	1,792
	2016	6	1,792
MAYA	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
MCOR	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099
	2016	3	1,099
MEGA	2012	3	1,099
	2013	3	1,099
	2014	3	1,099
	2015	3	1,099

Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit (orang)	Ln Jumlah Komite Audit (orang)
	2016	3	1,099
NISP	2012	4	1,386
	2013	5	1,609
	2014	4	1,386
	2015	4	1,386
	2016	3	1,099

Lampiran 7 Jumlah Kepemilikan Saham Institusional (X_{KI}) dalam (%) Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Jumlah saham institusional Lokal & Asing	Jumlah Saham Beredar	Jumlah Kepemilikan Saham Institusional (%)
AGRO	2012	3.373.223.402	3.618.095.578	93,2320
	2013	7.082.712.587	7.450.781.177	95,0600
	2014	7.076.869.100	7.450.773.700	94,9817
	2015	11.058.449.293	11.479.715.698	96,3303
	2016	14689776615	15.325.711.820	95,8505
BACA	2012	2.528.898.588	6.397.416.110	39,5300
	2013	2.363.205.511	6.397.416.110	36,9400
	2014	2.297.312.125	6.397.416.110	35,9100
	2015	2.210.202.669	6.404.528.162	34,5100
	2016	2.349.480.000	7.037.943.495	33,3830
BBCA	2012	11.625.990.000	24.655.010.000	47,1547
	2013	11.625.990.000	24.655.010.000	47,1547
	2014	11.625.990.000	24.655.010.000	47,1547
	2015	11.625.990.000	24.655.010.000	47,1547
	2016	11.625.990.000	24.655.010.000	47,1547
BBKP	2012	4.818.000.718	7.970.061.291	60,4512
	2013	5.069.809.990	8.500.687.441	59,6400
	2014	5.539.203.815	9.086.620.432	60,9600
	2015	5.408.431.307	9.086.620.432	59,5208
	2016	5.408.431.307	9.086.620.432	59,5208
BBNI	2012	18190195450	18.648.656.458	97,5416
	2013	17875195450	18.648.656.458	95,8525
	2014	18.425.281.054	18.648.656.458	98,8022
	2015	18.358.279.614	18.648.656.458	98,4429

Kode	Tahun	Jumlah saham institusional Lokal & Asing	Jumlah Saham Beredar	Jumlah Kepemilikan Saham Institusional (%)
	2016	18.325.401.608	18.648.656.458	98,2666
BBNP	2012	376.968.099	416.513.158	90,5057
	2013	553.993.223	676.833.882	81,8507
	2014	553.993.223	676.833.882	81,8507
	2015	554.773.223	676.833.882	81,9659
	2016	549.724.479	676.833.882	81,2200
BBRI	2012	24.306.028.938	24.669.162.000	98,5280
	2013	24.283.620.497	24.669.162.000	98,4372
	2014	24.183.179.509	24.669.162.000	98,0300
	2015	24.410.764.022	24.669.162.000	98,9525
	2016	24.390.747.452	24.669.162.000	98,8714
BBTN	2012	16.194.087.889	16.710.440.500	96,9100
	2013	10.085.539.423	10.564.853.500	95,4631
	2014	10.039.405.265	10.567.696.000	95,0009
	2015	10.217.205.025	10.582.345.000	96,5495
	2016	10.229.615.283	10.590.000.000	96,5969
BDMN	2012	7.069.517.360	9.584.643.365	73,7588
	2013	9.352.264.310	9.584.693.119	97,5750
	2014	7.107.837.960	9.584.643.365	74,1586
	2015	7.110.358.860	9.584.643.365	74,1849
	2016	7.087.777.795	9.584.643.365	73,9493
BJBR	2012	9.162.133.666	9.696.291.166	94,4911
	2013	9.292.734.807	9.696.291.166	95,8380
	2014	9.089.303.630	9.696.291.166	93,7400
	2015	9.089.303.630	9.696.291.166	93,7400
	2016	8.080.660.766	9.696.291.166	83,3376
BJTM	2012	13.889.334.982	14.917.684.982	93,1065
	2013	13.808.972.210	14.917.684.982	92,5678
	2014	14.009.654.410	14.917.684.982	93,9131
	2015	14.173.609.110	14.917.684.982	95,0121
	2016	13.571.847.310	14.945.057.582	90,8116
BMRI	2012	23.095.837.648	23.099.999.999	99,9820
	2013	22.811.249.999	23.099.999.999	98,7500
	2014	22.901.339.999	23.099.999.999	99,1400
	2015	23.047.146.606	23.099.999.999	99,7712
	2016	22.878.239.999	23.099.999.999	99,0400

Kode	Tahun	Jumlah saham institusional Lokal & Asing	Jumlah Saham Beredar	Jumlah Kepemilikan Saham Institusional (%)
BNBA	2012	2.100.000.000	2.310.000.000	90,9091
	2013	2.100.000.000	2.310.000.000	90,9091
	2014	2.100.000.000	2.310.000.000	90,9091
	2015	2.100.000.000	2.310.000.000	90,9091
	2016	2.100.000.000	2.310.000.000	90,9091
BNGA	2012	24.984.213.028	25.131.606.843	99,4135
	2013	24.385.324.638	25.131.606.843	97,0305
	2014	24.358.324.638	25.131.606.843	96,9231
	2015	24.358.324.638	25.131.606.843	96,9231
	2016	22.991.336.581	25.131.606.843	91,4838
BNII	2012	54.755.477.391	56.281.990.760	97,2877
	2013	65.909.370.930	67.746.840.730	97,2877
	2014	65.909.370.930	67.746.840.730	97,2877
	2015	65.909.370.930	67.746.840.730	97,2877
	2016	65.909.370.930	67.746.840.730	97,2877
BSIM	2012	6.843.751.668	10.283.836.238	66,5486
	2013	7.861.971.522	12.981.631.498	60,5623
	2014	7.760.971.522	14.040.168.349	55,2769
	2015	7.861.971.522	14.007.435.804	56,1271
	2016	8.941.161.979	15.251.704.336	58,6240
BTPN	2012	3.379.879.850	5.840.287.257	57,8718
	2013	3.438.282.723	5.840.287.257	58,8718
	2014	3.811.364.230	5.840.287.257	65,2599
	2015	3.051.983.001	5.840.287.257	52,2574
	2016	4.051.983.101	5.840.287.257	69,3799
BVIC	2012	3.525.694.369	6.604.344.442	53,3845
	2013	3.525.694.369	6.630.268.273	53,1757
	2014	4.034.592.772	7.139.166.980	56,5135
	2015	3.525.694.369	7.139.167.280	49,3852
	2016	5.376.094.915	8.671.048.162	62,0005
INPC	2012	6.168.319.152	8.575.076.227	71,9331
	2013	8.507.767.550	13.088.274.241	65,0030
	2014	6.696.599.588	13.088.274.241	51,1649
	2015	9.411.891.866	13.088.274.241	71,9109
	2016	13.373.550.587	15.796.193.049	84,6631
MAYA	2012	2.389.919.100	3.091.838.400	77,2977

Kode	Tahun	Jumlah saham institusional Lokal & Asing	Jumlah Saham Beredar	Jumlah Kepemilikan Saham Institusional (%)
	2013	2.862.179.506	3.478.318.200	82,2863
	2014	2.985.418.366	3.478.318.200	85,8294
	2015	3.769.226.119	4.304.418.773	87,5664
	2016	4.281.218.820	4.919.335.740	87,0284
MCOR	2012	826.268.154	4.282.838.507	19,2925
	2013	1.099.253.216	5.910.324.430	18,5989
	2014	1.099.253.216	5.910.894.430	18,5971
	2015	1.099.253.216	6.536.286.535	16,8177
	2016	10.122.087.169	16.631.460.751	60,8611
MEGA	2012	2.108.167.412	3.645.956.050	57,8221
	2013	4.026.599.755	6.963.775.206	57,8221
	2014	4.026.599.755	6.963.775.206	57,8221
	2015	4.026.599.755	6.963.775.206	57,8221
	2016	4.026.599.755	6.963.775.206	57,8221
NISP	2012	7.273.245.613	8.548.918.395	85,0780
	2013	9.760.695.612	11.472.648.486	85,0780
	2014	9.760.695.612	11.472.648.486	85,0780
	2015	9.760.695.612	11.472.648.486	85,0780
	2016	9.760.695.612	11.472.648.486	85,0780

Lampiran 8 (X_{DAR}) Debt To Asset Ratio Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Total Utang	Total Aset	Debt To Asset Ratio
AGRO	2012	3.668.215.679.000	4.040.140.235.000	0,9079
	2013	4.287.163.502.000	5.124.070.015.000	0,8367
	2014	5.481.169.891.000	6.385.191.484.000	0,8584
	2015	7.012.090.138.000	8.364.502.563.000	0,8383
	2016	9.441.709.181.000	11.377.960.721.000	0,8298
BACA	2012	5.008.389.000.000	5.666.177.000.000	0,8839
	2013	6.232.886.000.000	7.139.276.000.000	0,8730
	2014	8.277.583.000.000	9.251.776.000.000	0,8947
	2015	11.105.781.000.000	12.159.197.000.000	0,9134
	2016	12.892.374.000.000	14.207.414.000.000	0,9074
BBCA	2012	390.067.244.000.000	442.994.197.000.000	0,8805

Kode	Tahun	Total Utang	Total Aset	<i>Debt To Asset Ratio</i>
	2013	430.893.993.000.000	496.304.573.000.000	0,8682
	2014	472.550.777.000.000	552.423.892.000.000	0,8554
	2015	501.945.424.000.000	594.372.770.000.000	0,8445
	2016	560.556.687.000.000	676.738.753.000.000	0,8283
BBKP	2012	60.693.088.000.000	65.689.830.000.000	0,9239
	2013	63.244.294.000.000	69.457.663.000.000	0,9105
	2014	72.229.788.000.000	79.051.268.000.000	0,9137
	2015	86.831.323.000.000	94.366.502.000.000	0,9201
	2016	95.868.070.000.000	105.406.002.000.000	0,9095
BBNI	2012	289.778.215.000.000	333.303.506.000.000	0,8694
	2013	338.971.310.000.000	386.654.815.000.000	0,8767
	2014	341.148.654.000.000	416.573.708.000.000	0,8189
	2015	412.727.677.000.000	508.595.288.000.000	0,8115
	2016	492.701.125.000.000	603.031.880.000.000	0,8170
BBNP	2012	7.550.948.827.000	8.212.208.488.000	0,9195
	2013	8.933.337.468.000	9.985.735.803.000	0,8946
	2014	8.330.772.000.000	9.468.873.488.000	0,8798
	2015	7.417.621.089.000	8.613.113.759.000	0,8612
	2016	6.508.272.623.000	7.705.782.413.000	0,8446
BBRI	2012	470.571.858.000.000	535.209.156.000.000	0,8792
	2013	546.856.000.000.000	626.183.000.000.000	0,8733
	2014	704.217.592.000.000	801.955.021.000.000	0,8781
	2015	765.299.133.000.000	878.426.312.000.000	0,8712
	2016	856.831.836.000.000	1.003.644.426.000.000	0,8537
BBTN	2012	101.469.722.000.000	111.748.593.000.000	0,9080
	2013	119.612.977.000.000	131.169.730.000.000	0,9119
	2014	132.369.555.000.000	144.575.961.000.000	0,9156
	2015	157.947.485.000.000	171.807.592.000.000	0,9193
	2016	195.037.943.000.000	214.168.479.000.000	0,9107
BDMN	2012	127.057.997.000.000	155.791.308.000.000	0,8156
	2013	152.684.365.000.000	184.237.348.000.000	0,8287
	2014	162.691.069.000.000	195.708.593.000.000	0,8313
	2015	153.842.563.000.000	188.057.412.000.000	0,8181
	2016	137.708.758.000.000	174.086.730.000.000	0,7910
BJBR	2012	61.764.614.000.000	70.840.878.000.000	0,8719
	2013	60.896.825.000.000	70.958.233.000.000	0,8582

Kode	Tahun	Total Utang	Total Aset	<i>Debt To Asset Ratio</i>
	2014	63.884.725.000.000	75.836.537.000.000	0,8424
	2015	76.068.471.000.000	88.697.430.000.000	0,8576
	2016	87.019.826.000.000	102.318.457.000.000	0,8505
BJTM	2012	23.625.087.000.000	29.112.193.000.000	0,8115
	2013	27.327.874.000.000	33.046.537.000.000	0,8270
	2014	31.954.411.000.000	37.998.046.000.000	0,8409
	2015	36.508.170.000.000	42.803.631.000.000	0,8529
	2016	35.823.378.000.000	43.032.950.000.000	0,8325
BMRI	2012	559.863.119.000.000	635.618.708.000.000	0,8808
	2013	644.309.166.000.000	733.099.762.000.000	0,8789
	2014	750.195.111.000.000	855.039.673.000.000	0,8774
	2015	790.571.568.000.000	910.063.409.000.000	0,8687
	2016	885.336.286.000.000	1.038.706.009.000.000	0,8523
BNBA	2012	2.961.011.000.000	3.483.618.000.000	0,8500
	2013	3.481.269.000.000	4.045.672.000.000	0,8605
	2014	4.553.283.000.000	5.155.422.000.000	0,8832
	2015	5.333.398.000.000	6.567.266.000.000	0,8121
	2016	5.824.505.000.000	7.121.173.000.000	0,8179
BNGA	2012	174.760.569.000.000	197.412.481.000.000	0,8853
	2013	192.979.722.000.000	218.866.409.000.000	0,8817
	2014	204.714.729.000.000	233.162.423.000.000	0,8780
	2015	210.169.865.000.000	238.849.252.000.000	0,8799
	2016	207.364.106.000.000	241.571.728.000.000	0,8584
BNII	2012	106.105.415.000.000	115.772.908.000.000	0,9165
	2013	128.138.350.000.000	140.546.751.000.000	0,9117
	2014	128.668.415.000.000	143.318.466.000.000	0,8978
	2015	141.875.745.000.000	157.619.013.000.000	0,9001
	2016	147.406.296.000.000	166.678.902.000.000	0,8844
BSIM	2012	13.326.284.000.000	15.151.892.000.000	0,8795
	2013	14.693.195.000.000	17.447.455.000.000	0,8421
	2014	18.099.067.000.000	21.259.549.000.000	0,8513
	2015	24.199.077.000.000	27.868.688.000.000	0,8683
	2016	26.717.304.000.000	31.192.626.000.000	0,8565
BTPN	2012	51.356.205.000.000	59.090.132.000.000	0,8691
	2013	59.757.008.000.000	69.664.873.000.000	0,8578
	2014	60.749.900.000.000	75.014.737.000.000	0,8098

Kode	Tahun	Total Utang	Total Aset	<i>Debt To Asset Ratio</i>
	2015	64.053.233.000.000	81.039.663.000.000	0,7904
	2016	70.651.925.000.000	91.371.387.000.000	0,7732
BVIC	2012	12.883.648.176.000	14.352.840.454.000	0,8976
	2013	17.526.575.899.000	19.171.351.935.000	0,9142
	2014	18.434.623.095.000	21.364.882.284.000	0,8628
	2015	20.031.589.825.000	23.250.685.651.000	0,8615
	2016	22.174.911.584.000	25.999.981.283.000	0,8529
INPC	2012	18.621.443.000.000	20.558.770.000.000	0,9058
	2013	18.615.779.000.000	21.204.251.000.000	0,8779
	2014	20.771.764.000.000	23.462.770.000.000	0,8853
	2015	22.353.479.000.000	25.119.249.000.000	0,8899
	2016	21.795.549.000.000	26.219.938.000.000	0,8313
MAYA	2012	15.320.812.839.000	17.166.551.873.000	0,8925
	2013	21.603.247.419.000	24.015.571.540.000	0,8996
	2014	33.321.356.997.000	36.173.590.792.000	0,9212
	2015	42.718.880.883.000	47.305.953.535.000	0,9030
	2016	53.785.630.036.000	60.839.102.211.000	0,8841
MCOR	2012	5.739.581.000.000	6.495.246.000.000	0,8837
	2013	6.881.835.000.000	7.917.214.000.000	0,8692
	2014	8.549.452.000.000	9.769.591.000.000	0,8751
	2015	8.675.389.000.000	10.089.121.000.000	0,8599
	2016	9.861.207.000.000	12.257.391.000.000	0,8045
MEGA	2012	70.531.682.000.000	65.219.108.000.000	1,0815
	2013	60.357.193.000.000	66.475.698.000.000	0,9080
	2014	59.691.216.000.000	66.647.891.000.000	0,8956
	2015	56.707.975.000.000	68.225.170.000.000	0,8312
	2016	58.266.001.000.000	70.531.682.000.000	0,8261
NISP	2012	70.190.261.000.000	79.141.737.000.000	0,8869
	2013	83.970.261.000.000	97.510.106.000.000	0,8611
	2014	88.167.748.000.000	103.111.114.000.000	0,8551
	2015	104.069.055.000.000	120.480.402.000.000	0,8638
	2016	118.689.765.000.000	138.196.341.000.000	0,8588

Lampiran 9 (X_{DER}) Debt To Equity Ratio Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

Kode	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Debt To Equity Ratio
AGRO	2012	3.668.215.679.000	371.924.556.000	9,8628
	2013	4.287.163.502.000	836.906.513.000	5,1226
	2014	5.481.169.891.000	904.021.593.000	6,0631
	2015	7.012.090.138.000	1.352.412.425.000	5,1849
	2016	9.441.709.181.000	1.936.251.540.000	4,8763
BACA	2012	5.008.389.000.000	657.788.000.000	7,6140
	2013	6.232.886.000.000	906.390.000.000	6,8766
	2014	8.277.583.000.000	974.193.000.000	8,4969
	2015	11.105.781.000.000	1.053.416.000.000	10,5426
	2016	12.892.374.000.000	1.315.040.000.000	9,8038
BBCA	2012	390.067.244.000.000	51.897.942.000.000	7,5160
	2013	430.893.993.000.000	63.966.678.000.000	6,7362
	2014	472.550.777.000.000	77.920.617.000.000	6,0645
	2015	501.945.424.000.000	89.624.940.000.000	5,6005
	2016	560.556.687.000.000	112.715.059.000.000	4,9732
BBKP	2012	60.693.088.000.000	4.996.742.000.000	12,1465
	2013	63.244.294.000.000	6.213.369.000.000	10,1787
	2014	72.229.788.000.000	6.821.480.000.000	10,5886
	2015	86.831.323.000.000	7.535.179.000.000	11,5235
	2016	95.868.070.000.000	9.537.932.000.000	10,0512
BBNI	2012	289.778.215.000.000	43.525.291.000.000	6,6577
	2013	338.971.310.000.000	47.683.505.000.000	7,1088
	2014	341.148.654.000.000	61.021.308.000.000	5,5906
	2015	412.727.677.000.000	78.438.222.000.000	5,2618
	2016	492.701.125.000.000	89.254.000.000.000	5,5202
BBNP	2012	7.550.948.827.000	661.259.661.000	11,4190
	2013	8.933.337.468.000	1.052.398.335.000	8,4886
	2014	8.330.772.000.000	1.138.101.488.000	7,3199
	2015	7.417.621.089.000	1.195.492.670.000	6,2047
	2016	6.508.272.623.000	1.197.509.790.000	5,4348
BBRI	2012	470.571.858.000.000	64.637.298.000.000	7,2802
	2013	546.856.000.000.000	79.327.000.000.000	6,8937
	2014	704.217.592.000.000	97.737.429.000.000	7,2052
	2015	765.299.133.000.000	113.127.179.000.000	6,7649
	2016	856.831.836.000.000	146.812.590.000.000	5,8362

Kode	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	<i>Debt To Equity Ratio</i>
BBTN	2012	101.469.722.000.000	10.278.871.000.000	9,8717
	2013	119.612.977.000.000	11.556.753.000.000	10,3501
	2014	132.369.555.000.000	12.206.406.000.000	10,8443
	2015	157.947.485.000.000	13.860.107.000.000	11,3958
	2016	195.037.943.000.000	19.130.536.000.000	10,1951
BDMN	2012	127.057.997.000.000	28.733.311.000.000	4,4220
	2013	152.684.365.000.000	31.552.983.000.000	4,8390
	2014	162.691.069.000.000	33.017.524.000.000	4,9274
	2015	153.842.563.000.000	34.214.849.000.000	4,4964
	2016	137.708.758.000.000	36.377.972.000.000	3,7855
BJBR	2012	61.764.614.000.000	6.008.840.000.000	10,2790
	2013	60.896.825.000.000	6.718.265.000.000	9,0644
	2014	63.884.725.000.000	7.083.607.000.000	9,0187
	2015	76.068.471.000.000	7.757.218.000.000	9,8062
	2016	87.019.826.000.000	9.674.228.000.000	8,9950
BJTM	2012	23.625.087.000.000	5.487.106.000.000	4,3056
	2013	27.327.874.000.000	5.718.663.000.000	4,7787
	2014	31.954.411.000.000	6.043.635.000.000	5,2873
	2015	36.508.170.000.000	6.295.461.000.000	5,7991
	2016	35.823.378.000.000	7.209.572.000.000	4,9689
BMRI	2012	559.863.119.000.000	75.755.589.000.000	7,3904
	2013	644.309.166.000.000	88.790.596.000.000	7,2565
	2014	750.195.111.000.000	104.844.562.000.000	7,1553
	2015	790.571.568.000.000	119.491.841.000.000	6,6161
	2016	885.336.286.000.000	153.369.723.000.000	5,7726
BNBA	2012	2.961.011.000.000	522.505.000.000	5,6670
	2013	3.481.269.000.000	564.402.000.000	6,1681
	2014	4.553.283.000.000	602.139.000.000	7,5618
	2015	5.333.398.000.000	1.233.868.000.000	4,3225
	2016	5.824.505.000.000	1.296.667.000.000	4,4919
BNGA	2012	174.760.569.000.000	22.651.912.000.000	7,7150
	2013	192.979.722.000.000	25.886.687.000.000	7,4548
	2014	204.714.729.000.000	28.447.694.000.000	7,1962
	2015	210.169.865.000.000	28.679.387.000.000	7,3283
	2016	207.364.106.000.000	34.207.622.000.000	6,0619
BNII	2012	106.105.415.000.000	9.667.493.000.000	10,9755

Kode	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	<i>Debt To Equity Ratio</i>
	2013	128.138.350.000.000	12.408.401.000.000	10,3267
	2014	128.668.415.000.000	14.650.051.000.000	8,7828
	2015	141.875.745.000.000	15.119.208.000.000	9,3838
	2016	147.406.296.000.000	19.272.606.000.000	7,6485
BSIM	2012	13.326.284.000.000	1.825.608.000.000	7,2996
	2013	14.693.195.000.000	2.754.260.000.000	5,3347
	2014	18.099.067.000.000	3.160.482.000.000	5,7267
	2015	24.199.077.000.000	3.669.611.000.000	6,5945
	2016	26.717.304.000.000	4.476.322.000.000	5,9686
BTPN	2012	51.356.205.000.000	7.733.927.000.000	6,6404
	2013	59.757.008.000.000	9.907.865.000.000	6,0313
	2014	60.749.900.000.000	12.060.634.000.000	5,0370
	2015	64.053.233.000.000	13.923.859.000.000	4,6003
	2016	70.651.925.000.000	16.312.428.000.000	4,3312
BVIC	2012	12.883.648.176.000	1.469.192.278.000	8,7692
	2013	17.526.575.899.000	1.644.776.036.000	10,6559
	2014	18.434.623.095.000	1.759.828.875.000	10,4752
	2015	20.031.589.825.000	2.113.690.246.000	9,4771
	2016	22.174.911.584.000	2.626.270.697.000	8,4435
INPC	2012	18.621.443.000.000	1.937.327.000.000	9,6119
	2013	18.615.779.000.000	2.588.472.000.000	7,1918
	2014	20.771.764.000.000	2.691.006.000.000	7,7190
	2015	22.353.479.000.000	2.765.770.000.000	8,0822
	2016	21.795.549.000.000	4.424.389.000.000	4,9262
MAYA	2012	15.320.812.839.000	1.845.739.034.000	8,3006
	2013	21.603.247.419.000	2.412.324.121.000	8,9554
	2014	33.321.356.997.000	2.852.233.795.000	11,6825
	2015	42.718.880.883.000	4.587.072.652.000	9,3129
	2016	53.785.630.036.000	7.053.472.185.000	7,6254
MCOR	2012	5.739.581.000.000	755.665.000.000	7,5954
	2013	6.881.835.000.000	1.035.379.000.000	6,6467
	2014	8.549.452.000.000	1.220.139.000.000	7,0069
	2015	8.675.389.000.000	1.413.732.000.000	6,1365
	2016	9.861.207.000.000	2.396.184.000.000	4,1154
MEGA	2012	70.531.682.000.000	6.262.821.000.000	11,2620
	2013	60.357.193.000.000	6.118.505.000.000	9,8647

Kode	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	<i>Debt To Equity Ratio</i>
	2014	59.691.216.000.000	6.956.675.000.000	8,5804
	2015	56.707.975.000.000	11.517.195.000.000	4,9238
	2016	58.266.001.000.000	12.265.681.000.000	4,7503
NISP	2012	70.190.261.000.000	8.951.476.000.000	7,8412
	2013	83.970.261.000.000	13.539.845.000.000	6,2017
	2014	88.167.748.000.000	14.943.366.000.000	5,9001
	2015	104.069.055.000.000	16.411.347.000.000	6,3413
	2016	118.689.765.000.000	19.506.576.000.000	6,0846



Lampiran 10 Data Input SPSS Variabel Penelitian

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
AGRO	2012	50,0000	1,6094	1,0986	93,2320	0,9079	9,8628	2,5480	9,1799
	2013	60,0000	1,6094	1,0986	95,0600	0,8367	5,1226	2,7942	8,6761
	2014	60,0000	1,6094	1,0986	94,9817	0,8584	6,0631	2,6735	6,8249
	2015	60,0000	1,6094	1,0986	96,3303	0,8383	5,1849	2,6492	7,1344
	2016	50,0000	1,6094	1,0986	95,8505	0,8298	4,8763	2,4831	6,2641
BACA	2012	66,6667	1,3863	1,0986	39,5300	0,8839	7,6140	1,2076	7,5343
	2013	66,6667	1,6094	1,0986	36,9400	0,8730	6,8766	1,4579	9,0114
	2014	66,6667	1,7918	1,0986	35,9100	0,8947	8,4969	1,2067	7,9263
	2015	66,6667	1,7918	1,0986	34,5100	0,9134	10,5426	1,1176	8,9586
	2016	66,6667	1,7918	1,0986	33,3830	0,9074	9,8038	0,9559	7,8918
BBKA	2012	60,0000	2,3026	1,0986	47,1547	0,8805	7,5160	3,5607	27,0821
	2013	60,0000	2,3026	1,0986	47,1547	0,8682	6,7362	3,7934	24,6084
	2014	60,0000	2,3026	1,0986	47,1547	0,8554	6,0645	3,9555	23,2743
	2015	60,0000	2,3026	1,0986	47,1547	0,8445	5,6005	3,9514	21,5294
	2016	60,0000	2,3979	1,0986	47,1547	0,8283	4,9732	4,0656	20,3937
BBKP	2012	60,0000	1,9459	1,3863	60,4512	0,9239	12,1465	1,7243	17,8153
	2013	66,6667	1,9459	1,3863	59,6400	0,9105	10,1787	1,7664	16,6746
	2014	57,1429	1,9459	1,3863	60,9600	0,9137	10,5886	1,3078	11,1518
	2015	50,0000	1,9459	1,6094	59,5208	0,9201	11,5235	1,3594	13,4336
	2016	50,0000	1,9459	1,6094	59,5208	0,9095	10,0512	1,3587	12,7761
BBNI	2012	57,1429	2,3026	1,3863	97,5416	0,8694	6,6577	2,8147	17,3246

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
	2013	57,1429	2,3026	1,3863	95,8525	0,8767	7,1088	3,1330	19,8620
	2014	50,0000	2,3026	1,0986	98,8022	0,8189	5,5906	3,3675	19,9244
	2015	62,5000	2,1972	1,3863	98,4429	0,8115	5,2618	2,4787	13,1085
	2016	62,5000	2,3026	1,0986	98,2666	0,8170	5,5202	2,5733	13,6085
BBNP	2012	50,0000	1,6094	1,0986	90,5057	0,9195	11,4190	1,5577	13,7328
	2013	50,0000	1,6094	1,0986	81,8507	0,8946	8,4886	1,5598	12,2818
	2014	50,0000	1,6094	1,0986	81,8507	0,8798	7,3199	1,3411	8,8137
	2015	50,0000	1,6094	1,0986	81,9659	0,8612	6,2047	0,9624	5,7308
	2016	50,0000	1,6094	1,0986	81,2200	0,8446	5,4348	0,2020	0,6777
BBRI	2012	55,5556	2,3979	2,0794	98,5280	0,9195	7,2802	4,7037	32,3630
	2013	50,0000	2,3979	2,0794	98,4372	0,8946	6,8937	4,8063	29,6518
	2014	62,5000	2,3979	1,7918	98,0300	0,8798	7,2052	4,3216	27,3955
	2015	62,5000	2,3979	1,7918	98,9525	0,8612	6,7649	3,8675	24,1015
	2016	55,5556	2,3979	1,7918	98,8714	0,8446	5,8362	3,6103	20,1801
BBTN	2012	50,0000	1,9459	1,0986	96,9100	0,9080	9,8717	1,8551	15,4991
	2013	50,0000	1,9459	1,6094	95,4631	0,9119	10,3501	1,7625	14,3084
	2014	50,0000	1,7918	1,3863	95,0009	0,9156	10,8443	1,1229	9,3893
	2015	57,1429	2,0794	1,6094	96,5495	0,9193	11,3958	1,6068	14,2014
	2016	42,8571	2,0794	1,9459	96,5969	0,9107	10,1951	1,7255	15,8767
BDMN	2012	50,0000	2,4849	1,7918	73,7588	0,8156	4,4220	3,6857	15,0895
	2013	50,0000	2,3979	1,7918	97,5750	0,8287	4,8390	3,2528	13,7986
	2014	50,0000	2,1972	1,6094	74,1586	0,8313	4,9274	1,8705	8,3092

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
	2015	57,1429	1,9459	1,6094	74,1849	0,8181	4,4964	1,7102	7,3451
	2016	57,1429	2,1972	1,6094	73,9493	0,7910	3,7855	2,4261	7,9122
BJBR	2012	66,6667	1,7918	1,6094	94,4911	0,8719	10,2790	2,4144	20,9426
	2013	80,0000	1,3863	1,7918	95,8380	0,8582	9,0644	2,4723	21,6292
	2014	57,1429	1,9459	1,7918	93,7400	0,8424	9,0187	1,9599	16,2302
	2015	75,0000	1,9459	1,6094	93,7400	0,8576	9,8062	2,1472	18,6104
	2016	80,0000	1,9459	1,6094	83,3376	0,8505	8,9950	1,5328	13,2315
BJTM	2012	50,0000	1,6094	1,0986	93,1065	0,8115	4,3056	3,7115	16,5684
	2013	50,0000	1,6094	1,0986	92,5678	0,8270	4,7787	3,7115	14,7123
	2014	50,0000	1,6094	1,0986	93,9131	0,8409	5,2873	3,8732	15,9677
	2015	40,0000	1,6094	1,0986	95,0121	0,8529	5,7991	3,1218	14,3366
	2016	40,0000	1,6094	1,0986	90,8116	0,8325	4,9689	2,3958	13,0989
BMRI	2012	57,1429	2,3979	1,7918	99,9820	0,8808	7,3904	3,4533	23,1827
	2013	57,1429	2,3979	1,7918	98,7500	0,8789	7,2565	3,5160	22,8871
	2014	57,1429	2,3979	1,7918	99,1400	0,8774	7,1553	3,2753	21,3337
	2015	50,0000	2,3979	1,7918	99,7712	0,8687	6,6161	2,9879	18,8577
	2016	50,0000	2,3026	1,7918	99,0400	0,8523	5,7726	1,9061	10,7382
BNBA	2012	66,6667	1,0986	1,0986	90,9091	0,8500	5,6670	2,4033	11,4386
	2013	66,6667	1,0986	1,0986	90,9091	0,8605	6,1681	2,0946	10,3407
	2014	66,6667	1,0986	1,0986	90,9091	0,8832	7,5618	1,5333	8,8856
	2015	66,6667	1,0986	1,0986	90,9091	0,8121	4,3225	1,3247	6,2037
	2016	66,6667	1,0986	1,0986	90,9091	0,8179	4,4919	1,5558	6,2247

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
BNGA	2012	50,0000	2,4849	1,7918	99,4135	0,8853	7,7150	3,1778	20,7202
	2013	50,0000	2,4849	1,7918	97,0305	0,8817	7,4548	2,8020	17,7020
	2014	50,0000	2,3979	1,7918	96,9231	0,8780	7,1962	1,3104	8,6275
	2015	50,0000	2,3979	1,7918	96,9231	0,8799	7,3283	0,4835	1,4980
	2016	50,0000	2,3026	1,3863	91,4838	0,8584	6,0619	1,0719	6,6205
BNI	2012	57,1429	2,1972	1,6094	97,2877	0,9165	10,9755	1,6098	13,7459
	2013	50,0000	2,0794	1,3863	97,2877	0,9117	10,3267	1,7043	14,2265
	2014	50,0000	2,0794	1,3863	97,2877	0,8978	8,7828	0,6763	5,2651
	2015	50,0000	2,1972	1,3863	97,2877	0,9001	9,3838	1,0268	7,6828
	2016	50,0000	2,0794	1,3863	97,2877	0,8844	7,6485	1,6100	11,4404
BSIM	2012	66,6667	1,9459	1,6094	66,5486	0,8795	7,2996	1,7949	14,6067
	2013	66,6667	1,7918	1,6094	60,5623	0,8421	5,3347	1,7552	9,6553
	2014	66,6667	2,0794	1,3863	55,2769	0,8513	5,7267	1,0380	5,2388
	2015	66,6667	2,0794	1,0986	56,1271	0,8683	6,5945	0,9728	5,4217
	2016	66,6667	2,0794	1,0986	58,6240	0,8565	5,9686	1,6716	9,1003
BTPN	2012	50,0000	2,3026	1,6094	57,8718	0,8691	6,6404	4,7007	29,6452
	2013	50,0000	2,3026	1,6094	58,8718	0,8578	6,0313	4,4563	24,1597
	2014	50,0000	2,3026	1,3863	65,2599	0,8098	5,0370	3,4871	17,0156
	2015	50,0000	2,4849	1,0986	52,2574	0,7904	4,6003	3,1176	13,4897
	2016	60,0000	1,9459	1,3863	69,3799	0,7732	4,3312	3,0213	12,4079
BVIC	2012	75,0000	1,7918	1,0986	53,3845	0,8976	8,7692	1,9315	15,3337
	2013	75,0000	1,9459	1,0986	53,1757	0,9142	10,6559	1,9697	16,8683

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
	2014	75,0000	1,9459	1,0986	56,5135	0,8628	10,4752	0,5996	6,2092
	2015	75,0000	1,7918	1,6094	49,3852	0,8615	9,4771	0,4214	4,8572
	2016	75,0000	1,6094	1,6094	62,0005	0,8529	8,4435	0,3771	4,2347
INPC	2012	50,0000	1,7918	1,6094	71,9331	0,9058	9,6119	0,7035	8,6263
	2013	50,0000	1,7918	1,7918	65,0030	0,8779	7,1918	1,4061	9,8460
	2014	50,0000	1,9459	1,7918	51,1649	0,8853	7,7190	0,8067	4,2571
	2015	50,0000	1,9459	1,7918	71,9109	0,8899	8,0822	0,3469	2,6130
	2016	50,0000	1,9459	1,7918	84,6631	0,8313	4,9262	0,3601	2,0262
MAYA	2012	50,0000	1,7918	1,0986	77,2977	0,8925	8,3006	2,3318	15,0051
	2013	50,0000	1,7918	1,0986	82,2863	0,8996	8,9554	2,4750	18,0998
	2014	60,0000	1,7918	1,0986	85,8294	0,9212	11,6825	1,9283	16,5470
	2015	60,0000	2,0794	1,0986	87,5664	0,9030	9,3129	2,1040	17,5372
	2016	40,0000	2,1972	1,0986	87,0284	0,8841	7,6254	2,0106	14,0920
MCOR	2012	50,0000	1,3863	1,0986	19,2925	0,8837	7,5954	1,9774	14,3274
	2013	66,6667	1,6094	1,0986	18,5989	0,8692	6,6467	1,6473	8,7442
	2014	66,6667	1,6094	1,0986	18,5971	0,8751	7,0069	0,8079	4,6886
	2015	66,6667	1,6094	1,0986	16,8177	0,8599	6,1365	0,9721	5,1163
	2016	66,6667	2,0794	1,0986	60,8611	0,8045	4,1154	0,7110	1,1642
MEGA	2012	66,6667	2,0794	1,0986	57,8221	1,0815	11,2620	2,4637	27,7474
	2013	50,0000	2,1972	1,0986	57,8221	0,9080	9,8647	0,9606	8,4770
	2014	66,6667	2,1972	1,0986	57,8221	0,8956	8,5804	1,0486	9,1660
	2015	50,0000	2,3026	1,0986	57,8221	0,8312	4,9238	1,8369	11,3974

Kode	Tahun	PDKI (X1)	LnDD (X2)	LnKA (X3)	KI (X4)	DAR (X6)	DER (X7)	ROA (Y1)	ROE (Y2)
	2016	50,0000	2,0794	1,0986	57,8221	0,8261	4,7503	2,2275	9,7381
NISP	2012	50,0000	2,1972	1,3863	85,0780	0,8869	7,8412	1,7589	11,0145
	2013	50,0000	2,3979	1,6094	85,0780	0,8611	6,2017	1,7319	9,7325
	2014	50,0000	2,3026	1,3863	85,0780	0,8551	5,9001	1,7712	9,8551
	2015	50,0000	2,3026	1,3863	85,0780	0,8638	6,3413	1,7903	9,3637
	2016	50,0000	2,3026	1,0986	85,0780	0,8588	6,0846	1,8178	17,2350



Lampiran 11 Hasil Analisis Data *Output* IBM SPSS 24

1. Analisis Statistik Deskriptif

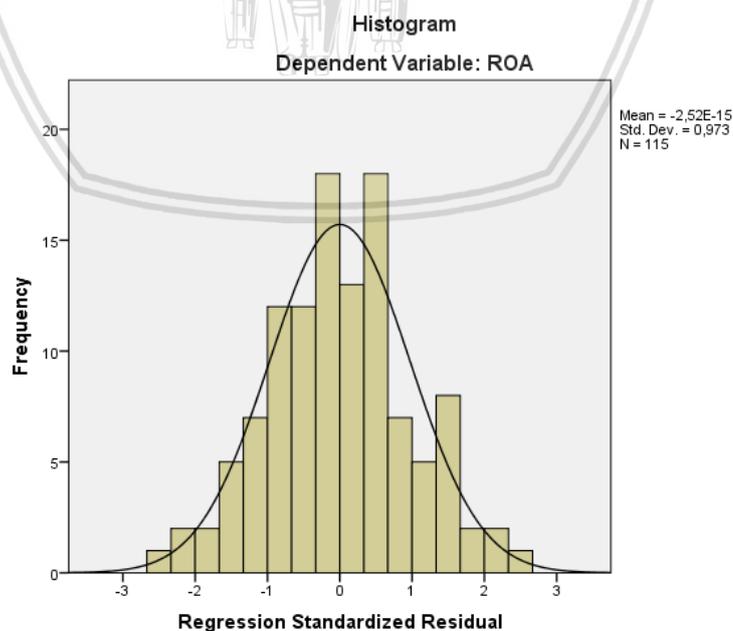
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDKI	115	40,0000	80,0000	57,094559	8,8603333
LnDD	115	1,0986	2,4849	1,978622	,3497722
LnKA	115	1,0990	2,0790	1,373113	,2965720
KI	115	16,8177	99,9820	76,516937	22,1751623
DAR	115	,7732	1,0815	,869568	,0391938
DER	115	3,7855	12,1465	7,370077	2,1143401
ROA	115	,2020	4,8063	2,125470	1,0920525
ROE	115	,6777	32,3630	13,184677	6,7156594
Valid N (listwise)	115				

2. Analisis Statistik Inferensial

Uji Asumsi Klasik

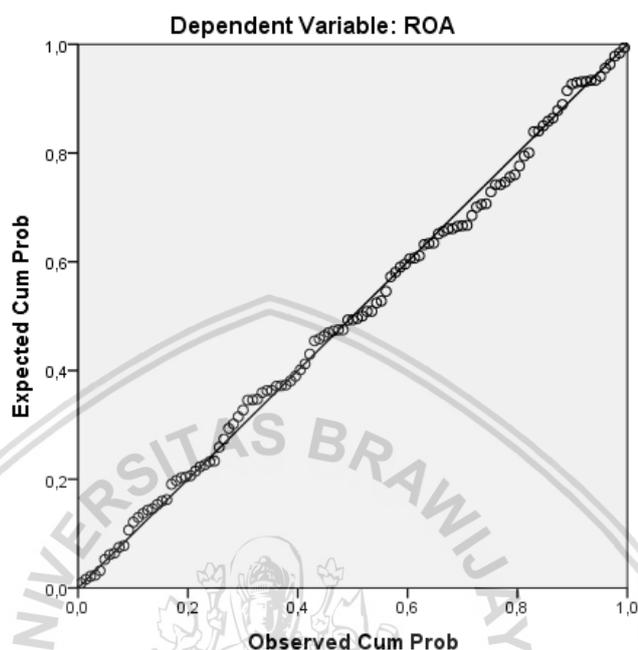
a) Uji Normalitas Model Regresi $Y_1 = ROA$

1) Histogram



2) Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Model Regresi $Y_1 = ROA$

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



3) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Model Regresi $Y_1 = ROA$

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91316058
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,035
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

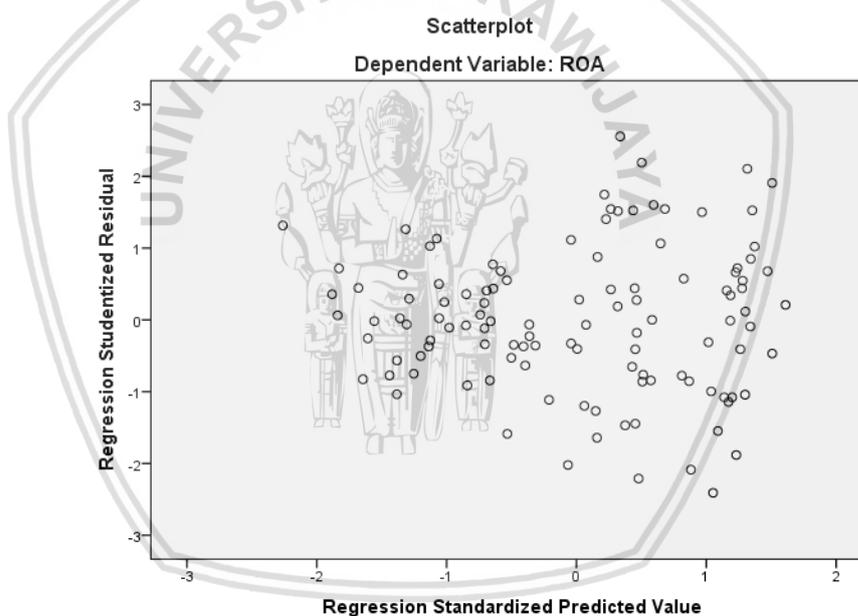
d. This is a lower bound of the true significance

b) Uji Multikolinieritas Model Regresi $Y_1 = ROA$

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	PDKI	,751	1,332
	LnDD	,713	1,403
	LnKA	,672	1,488
	KI	,750	1,333
	DAR	,301	3,327
	DER	,291	3,434

a. Dependent Variable: ROA

c) Uji Heteroskedastitas *Scatterplot* Model Regresi $Y_1 = ROA$ 

d) Uji Autokorelasi

1) Uji Durbin Watson Model Summary^b Model Regresi $Y_1 = ROA$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,332	,294	,77043	2,045

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROA

2) Hasil Uji *Run Test* Model Regresi $Y_1 = ROA$ **Runs Test**

	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	-,06160
Cases < Test Value	57
Cases >= Test Value	57
Total Cases	115
Number of Runs	56
Z	-,376
Asymp. Sig. (2-tailed)	,707

a. Median

3. Hasil Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (*Model Summary*) Model Regresi 1 $Y_1 = ROA$

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,332	,294	,77043	2,045

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROA

b) Uji F Model Regresi 1 $Y_1 = ROA$

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38,292	6	6,382	7,058	,000 ^b
	Residual	97,662	108	,904		
	Total	135,954	114			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), DER, KI, LnDD, PDKI, LnKA, DAR

c) Uji t Model Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	-4,575	3,469		-1,319	,190
PDKI	,011	,012	,086	,911	,364
LnDD	1,104	,302	,354	3,661	,000
LnKA	-,208	,366	-,056	-,568	,571
KI	,012	,005	,236	2,511	,014
DAR	5,909	4,145	,212	1,426	,157
DER	-,248	,078	-,481	-3,181	,002

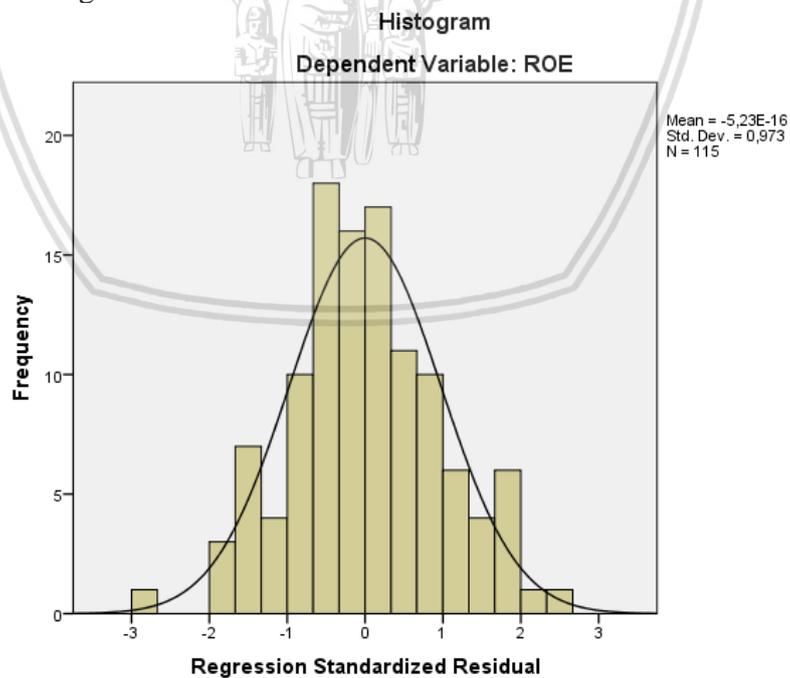
a. Dependent Variable: ROA

4. Statistik Inferensial

Uji Asumsi Klasik

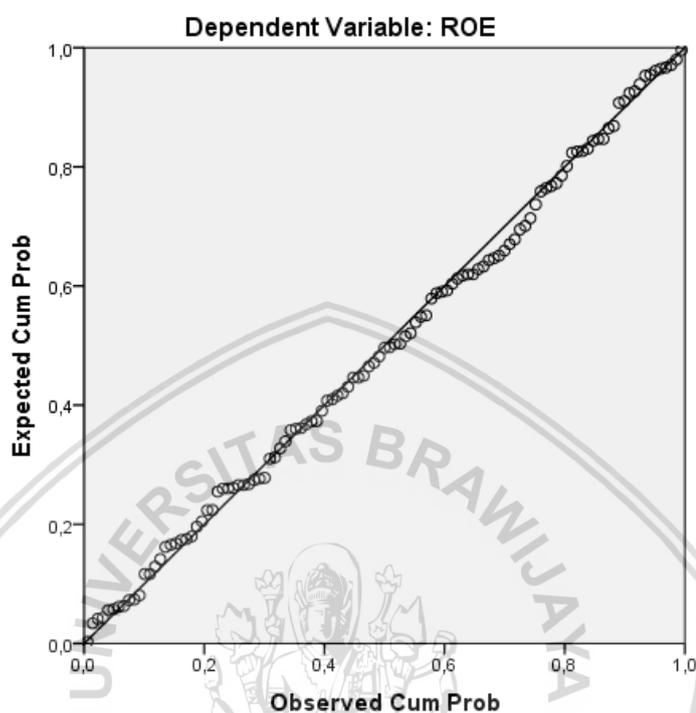
a) Uji Normalitas Model Regresi $Y_2 = ROE$

1) Histogram



- 2) Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Model Regresi $Y_2 = ROE$

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



- 3) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Model Regresi $Y_2 = ROE$

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,59304633
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,033
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b) Uji Multikolinieritas Model Regresi $Y_2 = ROE$ **Coefficients^a**

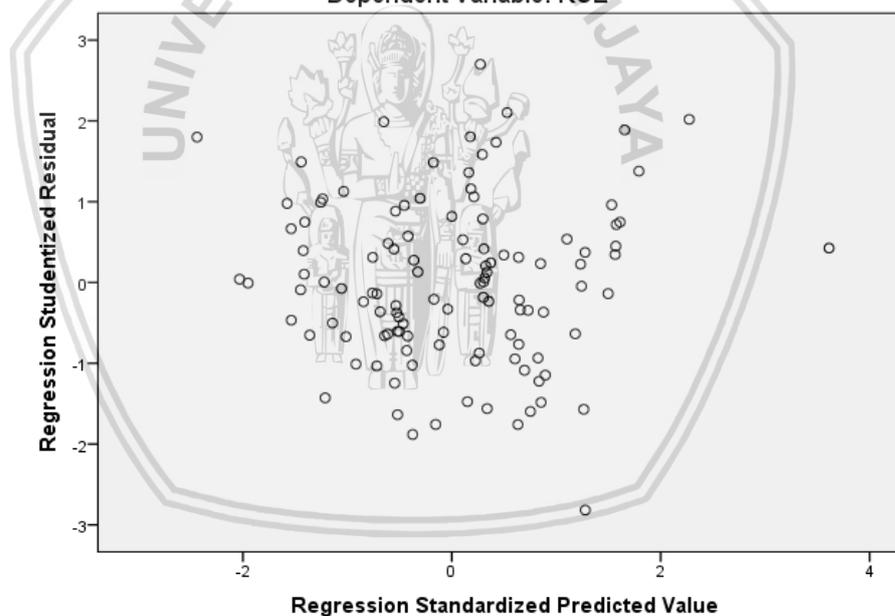
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDKI	,751	1,332
	LnDD	,713	1,403
	LnKA	,672	1,488
	KI	,750	1,333
	DAR	,301	3,327
	DER	,291	3,434

a. Dependent Variable: ROE

c) Uji Heteroskedastitas

Scatterplot

Dependent Variable: ROE



d) Uji Autokorelasi

1) Uji Durbin Watson Model Summary^b Model Regresi $Y_2 = ROE$ **Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684 ^a	,468	,438	4,91224	2,063

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROE

2) Hasil Uji *Run Test* Model Regresi $Y_2 = ROE$ **Runs Test**

	Unstandardized Predicted Value
Test Value ^a	,01655
Cases < Test Value	57
Cases >= Test Value	57
Total Cases	115
Number of Runs	63
Z	,941
Asymp. Sig. (2-tailed)	,347

a. Median

5. Hasil Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (*Model Summary*) Model Regresi 2 $Y_2 = ROE$

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684 ^a	,468	,438	4,91224	2,063

a. Predictors: (Constant), DER, KI, LnKA, PDKI, LnDD, DAR

b. Dependent Variable: ROE

b) Uji F Model Regresi 2 $Y_2 = ROE$

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1434,878	6	239,146	6,968	,000 ^b
	Residual	3706,531	108	34,320		
	Total	5141,409	114			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), DER, KI, LnDD, PDKI, Ln KA, DAR

c) Uji t Model Regresi 2 $Y_2 = ROE$

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-69,428	21,373		-3,248	,002
	PDKI	,135	,071	,178	1,893	,061
	LnDD	8,302	1,858	,432	4,468	,000
	LnKA	,063	2,257	,003	,028	,978
	KI	,062	,029	,206	2,185	,031
	DAR	66,485	25,533	,388	2,604	,011
	DER	-,572	,481	-,180	-1,189	,237

a. Dependent Variable: ROE

